



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas karunia dan rahmat-Nya, maka Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dapat disusun.

Perubahan Rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 ini merupakan pedoman dalam perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode 5 (lima) tahun yang di dasarkan pada perubahan kebijakan terkait nomenklatur urusan kabupaten/kota yang dimutakhirkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan juga hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebelumnya untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran terhadap agenda, misi dan visi program prioritas pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai dokumen induk perencanaan tingkat perangkat daerah, Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah. Tujuan, strategi, dan kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selanjutnya akan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Demikian Dokumen Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 disusun dengan harapan agar dokumen ini dapat dijadikan acuan dalam perencanaan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

sehingga dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar.

Benteng, 2023

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19740626 199311 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	(2)
Daftar Isi	(4)
BAB I PENDAHULUAN.....	(7)
1.1. Latar Belakang	(7)
1.2. Landasan Hukum	(9)
1.3. Maksud dan Tujuan.....	(16)
1.4. Sistematika Penulisan.....	(17)
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	(19)
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah.....	(19)
2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah	(74)
2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	(76)
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah.....	(114)
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH.....	(124)
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah	(124)
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	(125)
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	(131)
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	(135)
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	(137)
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	(144)
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah.....	(144)
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	(148)
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	(159)
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	(217)
BAB VIII PENUTUP	(221)

DAFTAR TABEL / GRAFIK

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.....(78)
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.....(80)
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah.....(124)
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....(129)
Tabel 3.3	Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis.....(141)
Tabel 3.4	Nilai Skala Kriteria(142)
Tabel 3.5	Rata-rata Skor Isu-Isu Strategis.....(143)
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kab Kepulauan Selayar.....(146)
Tabel 4.2	Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar(147)
Tabel 5.1	Kekuatan,Kelemahan,Peluang, dan Tantangan Pada Sekretariat Daerah Kab Kepulauan Selayar.....(149)
Tabel 5.2	Pemetaan Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal....(151)
Tabel 5.3	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kab Kepulauan Selayar..... (153)
Tabel 5.4	Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kab Kepulauan Selayar..... (155)
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kab Kepulauan Selayar.....(167)
Tabel 6.2	Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kab Kepulauan Selayar berdasarkan Kepmendagri Nomor:050-5889 Tahun 2021(188)

Tabel 6.3	Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kab Kepulauan Selayar berdasarkan Kepmendagri Nomor:900.1.5.5-1317 Tahun 2023.....	(224)
Tabel 7.1	Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD Sekretariat Daerah Kab Kepulauan Selayar.....	(265)
Tabel 7.2	Perubahan Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD Sekretariat Daerah Kab Kepulauan Selayar	(266)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kab Kepulauan Selayar	(73)
----------	--	------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode 5 (lima tahun), yaitu sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran sekretariat daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja sekretariat daerah 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikator program dan kegiatan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun melalui proses teknokratik, *top-down*, *bottom-up*,

partisipatif dan politis yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 selain berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, juga memperhatikan keselarasan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, telaahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta memperhatikan faktor pendukung dan penghambat yang ada, yang merupakan hasil analisis eksternal dan internal, maupun masukan para *stakeholders*.

Selanjutnya Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan SKPD (Renja SKPD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta laporan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan

Jangka Pendek Daerah, dan membantu pimpinan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan, dan kemajuan Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) Dan / Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4310); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) Dan / Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) Dan / Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);

31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1)
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 322);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);

37. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
38. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 670 Tahun 2021 Nomor 670).

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

1. Sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026; dan
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

b. Tujuan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

1. Tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Sekretaris Daerah untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

2. Memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
4. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antar bagian dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan dokumen Renstra;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Berisi Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Kinerja Pelayanan sampai saat ini, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, telaahan terhadap Visi, Misi, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, telaahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu 2021-2026;

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu 2021–2026 berdasarkan visi misi RPJMD;

BabVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah

Bab VIII PENUTUP

Bab ini dikemukakan tentang penjabaran Renstra Perangkat Daerah lebih lanjut dalam bentuk Renja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah bersama BAPPELITBANGDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, serta keterlibatan *stakeholder* pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Kedudukan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diatur dalam Peraturan Daerah Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) selanjutnya diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113), dimana tugas dan fungsinya diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Tugas Pokok Sekretariat Daerah adalah membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif sesuai ketentuan perundang-undangan, terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan Tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Daerah mempunyai Fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait Tugas dan Fungsinya.

Untuk uraian Tugas, meliputi:

- a. merencanakan program kerja lingkup Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat terkait bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, bidang perekonomian dan pembangunan, serta bidang administrasi umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan perumusan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah untuk dijadikan pedoman penyusunan kebijakan daerah;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, serta

- pembinaan dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah sesuai rencana strategis untuk dipergunakan sebagai bahan pelaksanaan Tugas;
- h. mengoordinasikan penyelenggaraan bidang perekonomian dan pembangunan yang meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa sesuai rencana strategis untuk dipergunakan sebagai bahan pelaksanaan Tugas;
 - i. mengoordinasikan penyelenggaraan bidang administrasi umum meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan organisasi, perencanaan dan keuangan, serta umum dan protokol sesuai rencana strategis untuk dipergunakan sebagai bahan pelaksanaan Tugas;
 - j. mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pekerjaan berjalan - Osebagaimana mestinya;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 - l. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tugas perangkat daerah;
 - m. menyelenggarakan pelaksanaan penegakan disiplin aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - o. menyelenggarakan pembinaan administrasi pemerintahan dan pengembangan sumber daya aparatur pemerintah kabupaten;

- p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara lingkup Sekretariat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. menyelenggarakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai Tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, serta penyusunan produk hukum daerah yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan Tugas tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai Fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
- b. pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
- d. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pengembangan sumber daya aparatur bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat; dan

- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, meliputi:

- a. merencanakan program kerja lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat terkait bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
- f. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai rencana strategis untuk kelancaran pelaksanaan Tugas;
- g. mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- i. mengoordinasikan penyusunan produk hukum daerah;
- j. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam rencana program jangka menengah Daerah, rencana strategis,

rencana kerja tahunan, serta dokumen perencanaan lainnya di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat sebagai bahan pelaporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa mendatang;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- n. menyelenggarakan penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pengembangan sumber daya aparatur lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- o. menyelenggarakan evaluasi kinerja unit lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terhadap rencana kerja yang telah disusun sebagai bahan perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- r. menyelenggarakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1. Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai Tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan Tugas Kepala Bagian Pemerintahan melaksanakan Fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama; dan

- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Bagian Pemerintahan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bagian Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bagian Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang Tugasnya;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama;
- g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama;
- h. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama;
- i. mengoordinasikan perumusan rancangan produk hukum daerah bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama;
- j. merumuskan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama;

- k. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- l. memfasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
- m. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran wilayah kecamatan dan/atau kelurahan;
- n. melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan, serta nama lain dan/atau pemindahan ibukota kecamatan;
- o. melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;
- p. menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;
- q. mengoordinasikan penyusunan bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat;
- r. mengoordinasikan penyusunan bahan kebijakan pengelolaandana kelurahan;
- s. mengoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- t. menghimpun informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- u. memfasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal organisasi perangkat daerah;
- v. melakukan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- w. memfasilitasi pengusulan izin dan cuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- x. mengoordinasikan penyusunan bahan laporan akhir masa jabatan Kepala Daerah;

- y. melakukan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- z. melakukan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif;
- aa. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- bb. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama ;
- cc. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara di Bagian Pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dd. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bagian Pemerintahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ee. melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai Tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang keagamaan, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan Fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait di bidang keagamaan, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang keagamaan, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya;

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. melakukan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
- g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
- h. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
- i. mengoordinasikan perumusan rancangan produk hukum daerah bidang keagamaan, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
- j. merumuskan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang keagamaan, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
- k. menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- l. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- m. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
- n. melakukan pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan kerjasama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;

- o. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan forum kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan serta kerjasama antar lembaga keagamaan;
- p. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan musyawarah antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
- q. melakukan koordinasi kerjasama sosial kemasyarakatan serta konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
- r. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan;
- s. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar meliputi kesehatan, sosial, dan pendidikan;
- t. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar meliputi kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja, komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- u. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- v. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang keagamaan, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;

- w. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara di Bagian Kesejahteraan rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- x. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- y. melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang Tugasnya.

2.3. Bagian Hukum

Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai Tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Hukum melaksanakan Fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Bagian Hukum, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bagian Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bagian Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;
- g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;
- i. merumuskan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi;
- j. memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah;

- k. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- l. menyiapkan bahan penjelasan Kepala Daerah dalam proses penetapan Peraturan Daerah;
- m. menyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah;
- n. melakukan pembinaan penyusunan produk hukum daerah;
- o. menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum daerah;
- p. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah;
- q. melakukan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- r. melakukan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur Pemerintah Daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- s. melakukan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam penanganan perkara hukum;
- t. melakukan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia;
- u. menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum;
- v. melakukan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- w. menghimpun serta mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan Daerah;
- x. melakukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- y. memberikan pelayanan administrasi informasi produk hukum;

- z. melakukan sosialisasi, penyuluhan dan deseminasi produk hukum daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
- aa. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bagian Hukum;
- bb. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;
- cc. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara di Bagian Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dd. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bagian Hukum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ee. melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai Tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/jasa yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan Fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/jasa;
- b. pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam,

- administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/jasa;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa;
 - d. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa; dan
 - e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan Tugasnya.

Uraian Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan, meliputi:

- a. merencanakan program kerja lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat terkait bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa;

- f. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai rencana strategis untuk kelancaran pelaksanaan Tugas;
- g. mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/jasa sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan yang menjadi visi dan misi Pemerintah Daerah dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta dokumen perencanaan lainnya dalam lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa;
- l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;

- m. menyelenggarakan penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan aparatur di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/jasa;
- n. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. menyelenggarakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai Tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, perekonomian dan sumber daya alam yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan Fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan badan usaha milik daerah

- dan badan layanan umum daerah, kebijakan perekonomian, dan sumber daya alam;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, kebijakan perekonomian, dan sumber daya alam;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, kebijakan perekonomian, dan sumber daya alam;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, kebijakan perekonomian dan sumber daya alam; dan
 - e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, kebijakan perekonomian dan sumber daya alam;
- g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, perekonomian dan sumber daya alam;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, kebijakan perekonomian dan sumber daya alam;
- i. mengoordinasikan perumusan rancangan produk hukum daerah bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, kebijakan perekonomian dan sumber daya alam;
- j. merumuskan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, kebijakan perekonomian dan sumber daya alam;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro kecil menengah, koordinasi penanaman modal, perizinan dan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang sumber daya alam yang meliputi pertanian, pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan dan

- perikanan dan lingkungan hidup, serta energi sumber daya mineral;
- m. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah;
 - n. melakukan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah;
 - o. menyusun bahan dan data serta analisa pengembangan pariwisata, koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan;
 - p. mengoordinasikan penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan pariwisata, koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan;
 - q. melakukan fasilitasi dan pembinaan di bidang pengembangan pariwisata, koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan;
 - r. menyusun bahan dan data serta analisa di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
 - s. melakukan fasilitasi dan pembinaan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - t. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - u. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - v. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan

- badan layanan umum daerah, kebijakan perekonomian dan sumber daya alam;
- w. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara lingkup Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - x. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - y. melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang Tugasnya.

3.2. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai Tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi dan pelaporan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan Fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan;

- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bagian Administrasi Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
- g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;

- h. melaksanakan penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
- i. mengoordinasikan perumusan rancangan produk hukum daerah bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
- j. merumuskan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang penyusunan program, pengendalian program serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- k. melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan sinergitas program pembangunan daerah;
- l. melakukan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan daerah;
- m. melakukan penyusunan program pembangunan dalam rangka mengembangkan akses pembangunan daerah;
- n. melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan dalam rangka mengurangi risiko dan kerugian pihak lain dalam rangka kelancaran program pembangunan daerah;
- o. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah;
- p. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka mengurangi tingkat risiko dan kerugian akibat pelaksanaan program pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta;
- q. mengendalikan sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta;
- r. menyusun rencana monitoring dan pelaporan program pembangunan daerah;

- s. melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
- t. mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
- u. menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan kebijakan program pembangunan daerah;
- v. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan;
- w. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi dan pelaporan;
- x. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara lingkup Bagian Administrasi Pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- y. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- z. melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Bagian Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai Tugas membantu Asisten Perencanaan dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah,

dan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan Fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- h. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- i. mengoordinasikan perumusan rancangan produk hukum daerah bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

- j. merumuskan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- k. melakukan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
- l. melakukan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- m. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- n. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
- o. melakukan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh unit kerja pengadaan barang/jasa;
- p. melakukan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- q. mengelola informasi kontrak;
- r. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
- s. melakukan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel unit kerja pengadaan barang/jasa;
- t. melakukan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
- u. melakukan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- v. melakukan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang/jasa;

- w. melakukan analisis beban kerja unit unit kerja pengadaan barang/jasa;
- x. melakukan pengelolaan personil unit kerja pengadaan barang/jasa
- y. melakukan pengembangan sistem insentif personel unit kerja pengadaan barang/jasa;
- z. memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
- aa.melakukan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- bb.melakukan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- cc. melakukan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain sistem informasi rencana umum pengadaan, sistem pengadaan secara elektronik, e-katalog, e-monev, sistem informasi kinerja penyedia;
- dd.melakukan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
- ee.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- ff. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa
- gg. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara lingkup Bagian pengadaan Barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- hh. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ii. melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai Tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Administrasi Umum melaksanakan Fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan;
- b. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang organisasi;
- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan; dan
- g. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum dan protokol, serta

perencanaan dan keuangan yang berkaitan dengan Tugasnya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. merencanakan program kerja lingkup Asisten Administrasi Umum sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Asisten Administrasi Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat terkait bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan;
- f. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Asisten Administrasi Umum;
- g. mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang organisasi;
- i. menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan;
- j. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- k. mengoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja perangkat daerah dalam rangka pelaporan capaian kinerja instansi serta penerapan reformasi birokrasi;
- l. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan perencanaan dan keuangan lingkup Sekretariat Daerah;

- m. mengoordinasikan urusan umum dan protokol dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan operasional Sekretariat Daerah;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- o. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan;
- p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara lingkup Asisten Administrasi Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Asisten Administrasi Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. menyelenggarakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai Tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan kinerja yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Organisasi melaksanakan Fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan kinerja;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan kinerja;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan kinerja;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan kinerja; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Asisten administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bagian Organisasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bagian Organisasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisa jabatan,

- pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi dan kinerja;
- g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan kinerja;
 - h. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi dan kinerja;
 - i. mengoordinasikan perumusan rancangan produk hukum daerah bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi dan kinerja;
 - j. merumuskan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi dan kinerja;
 - k. menyiapkan bahan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja;
 - l. mengoordinasikan perumusan dan penyusunan Tugas dan Fungsi jabatan perangkat daerah;
 - m. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan unit pelaksana teknis daerah;
 - n. menyusun standar kompetensi jabatan;
 - o. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
 - p. menyusun kajian akademik terhadap usulan penataan organisasi Perangkat daerah;
 - q. menyusun profil kelembagaan perangkat daerah;
 - r. menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja;

- s. melaksanakan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- t. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;
- u. menghimpun dan memfasilitasi standar operasional prosedur yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah;
- v. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
- w. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik;
- x. mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
- y. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah daerah;
- z. menyusun road map reformasi birokrasi;
- aa. melakukan fasilitasi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- bb. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan budaya kerja;
- cc. mengoordinasikan peningkatan budaya kerja;
- dd. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi dan kinerja;
- ee. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tugas dan Fungsi perangkat daerah;
- ff. menyiapkan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur bidang

- kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan kinerja;
- gg. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bagian Organisasi;
 - hh. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara lingkup Bagian Organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bagian Organisasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - jj. melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2. Bagian Umum dan Protokol

Bagian Umum dan Protokol dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai Tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi, dan penyiapan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, protokol dan komunikasi pimpinan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Umum dan Protokol melaksanakan Fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan protokol;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

- kebijakan daerah terkait urusan umum dan protokol;
- d. penyiapan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, protokol dan komunikasi pimpinan dan
 - e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bagian Umum dan Protokol sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bagian Umum dan Protokol untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah yang terkait dengan urusan umum dan protokol yang meliputi tata usaha pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, serta protokol dan komunikasi pimpinan;
- g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang protokol dan komunikasi pimpinan;
- h. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang terkait dengan bidang umum dan protokol;
- i. melaksanakan kegiatan pengelolaan penghubung pemerintah daerah untuk kelancaran hubungan yang terkait dengan informasi dan komunikasi antar lembaga agar tercipta hubungan koordinasi sinkronisasi

- pelaksanaan Tugas pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan pihak-pihak lainnya;
- j. mengoordinasikan bahan perumusan kebijakan, penyusunan rencana dan program di bidang tata usaha pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, serta protokol dan komunikasi pimpinan;
 - k. melaksanakan program dan kegiatan di bidang ketatausahaan pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta protokol dan komunikasi pimpinan;
 - l. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan manajemen kepegawaian lingkup sekretariat daerah dan staf ahli;
 - m. memfasilitasi dan mengoordinasikan dengan perangkat daerah terhadap pemanfaatan ruang pertemuan/rapat;
 - n. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis tata kelola Bagian Umum dan Protokol;
 - o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bagian Umum dan Protokol;
 - p. menyiapkan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur bidang tata usaha pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, serta protokol dan komunikasi pimpinan;
 - q. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara lingkup Bagian Umum dan Protokol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bagian Umum dan Protokol serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- s. melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2.1. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian

Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Protokol dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli dan kepegawaian yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat dinas;

- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat dinas;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi dan manajemen kepegawaian aparatur sipil negara lingkup sekretariat daerah dan staf ahli, antara lain data dan informasi manajemen kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia aparatur, penilaian kinerja aparatur sipil negara, kepangkatan, penegakan peraturan disiplin aparatur sipil negara/absensi aparatur sipil negara dan administrasi kepegawaian lainnya;
- j. menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi kepegawaian, manajemen dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan penegakan disiplin aparatur sipil negara lingkup Sekretariat Daerah dan Staf Ahli;
- k. melaksanakan dan/atau melakukan kerjasama pengembangan sumber daya manusia aparatur melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis aparatur sipil negara;
- l. mengoordinir pelaksanaan kegiatan tata usaha yang meliputi penerimaan, pencataan, pemeriksaan, pengaturan dan penyampaian naskah dinas, serta melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tugas yang terkait dengan Tugas dan tanggung jawab Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan kebutuhan Sekretariat Daerah meliputi alat tulis kantor, penggandaan dan percetakan serta

mengatur tamu yang akan menghadap kepemimpinan dan pelaksanaan suatu acara termasuk makan minum rapat dan tamu;

- n. melakukan sosialisasi kepada aparatur sipil negara lingkup Sekretariat Daerah terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- o. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan tata usaha pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli dan manajemen kepegawaian;
- p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian;
- q. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara lingkup Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melakukan penyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melakukan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2.2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Protokol dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan

kebijakan daerah yang terkait urusan rumah tangga dan perlengkapan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan urusan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah serta Sekretaris Daerah;
- g. melakukan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan rapat-rapat;
- h. melakukan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta menjaga kebersihan kantor di lingkup Sekretariat Daerah;
- i. melakukan kebijakan pengadaan barang/perlengkapan untuk kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah;
- j. melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati, Kantor Sekretariat Daerah, serta kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan;
- k. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan pemeliharaan rumah dinas

Bupati dan Wakil Bupati, serta rumah dinas Sekretaris Daerah;

- l. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Bupati dan Wakil Bupati, serta Sekretariat Daerah;
- m. mengoordinir kebersihan, keamanan dan ketertiban, kenyamanan, keserasian rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, serta melaksanakan pemeliharaan pengawasan rumah jabatan pimpinan;
- n. melaksanakan inventarisasi barang/perlengkapan pada gedung/kantor, kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya;
- o. melakukan pengurusan dan penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan kendaraan dinas antara lain surat tanda nomor kendaraan, Pajak Kendaraan, Jasa Raharja dan kir kendaraan;
- p. mengatur tempat dan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan bagi rapat dan pertemuan lainnya pada Sekretariat Daerah;
- q. menyiapkan dan mendistribusikan kebutuhan bahan bakar minyak dan suku cadang kendaraan dinas agar setiap saat siap untuk dipergunakan;
- r. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- s. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. melakukan penyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- u. melakukan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2.3. Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Protokol dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah yang terkait dengan urusan protokol dan komunikasi pimpinan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol dan komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
- g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan serta dokumentasi;
- h. melaksanakan tata cara protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah;

- i. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
- j. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- k. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
- l. menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;
- m. memberikan masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi tertentu;
- n. memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan/atau arahan pimpinan;
- o. menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati;
- p. menyiapkan dan mengandakan bahan materi rapat dan bahan materi kebijakan;
- q. menyusun naskah sambutan pidato Bupati dan Wakil Bupati;
- r. mendokumentasikan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati serta melakukan penyusunan notulen rapat Bupati dan Wakil Bupati;
- s. memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
- t. melakukan pemberdayaan kantor penghubung pemda sebagai media penghubung antar kementerian/lembaga dan pihak terkait dalam rangka kelancaran informasi, komunikasi, koordinasi dan kerjasama serta sinkronisasi pelaksanaan Tugas pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- u. mengoordinasikan penyiapan pelaksanaan perjalanan dinas pimpinan dan aparatur, serta melakukan

inventarisasi pelaksanaan perjalanan dinas termasuk laporan perjalanan dinas, dokumentasi serta distribusi bahan perjalanan dinas pimpinan dan aparatur lingkup Sekretariat Daerah;

- v. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
- w. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara lingkup Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- x. melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- y. melakukan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang Tugasnya.

4.3. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai Tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan penyiapan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, serta akuntansi, aset dan pelaporan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan Fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, serta akuntansi, aset dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas Bagian lingkup Sekretariat Daerah;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, serta akuntansi, aset dan pelaporan;
- d. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, serta akuntansi, aset dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah yang terkait dengan bidang perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, serta akuntansi, aset dan pelaporan;
- g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas Bagian lingkup Sekretariat Daerah;

- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang terkait dengan bidang perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, serta akuntansi, aset dan pelaporan;
- i. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Sekretariat Daerah;
- j. melakukan pembuatan laporan hasil pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah lingkup Sekretariat Daerah;
- k. menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, aset dan laporan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah;
- l. melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, verifikasi anggaran, akuntansi, aset dan pelaporan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah;
- m. melakukan pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah;
- n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- o. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyiapan bahan penyusunan, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan lingkup Sekretariat Daerah, penerapan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan nota keuangan Pemerintah Daerah serta laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat Daerah;

- p. mengoordinasikan pelaksanaan penatausahaan, perbendaharaan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah lingkup Sekretariat Daerah;
- q. mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pelaporan keuangan triwulan, semester dan laporan keuangan akhir tahun terkait kegiatan lingkup Sekretariat Daerah;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian Tugas pemegang kas/pembantu pemegang kas bendahara dan bendahara pembantu;
- s. melakukan evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, verifikasi anggaran, akuntansi, aset dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan lingkup Sekretariat Daerah;
- t. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis tata kelola Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- u. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- v. menyiapkan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, serta akuntansi, aset dan pelaporan;
- w. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara lingkup Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- x. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- y. melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang Tugasnya.

5. Jabatan Fungsional

- 5.1. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yaitu jabatan Fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5.2. Pengangkatan Pejabat fungsional pada Sekretariat Daerah dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5.3. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan Tugas, maka pada masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat membentuk Sub Koordinator

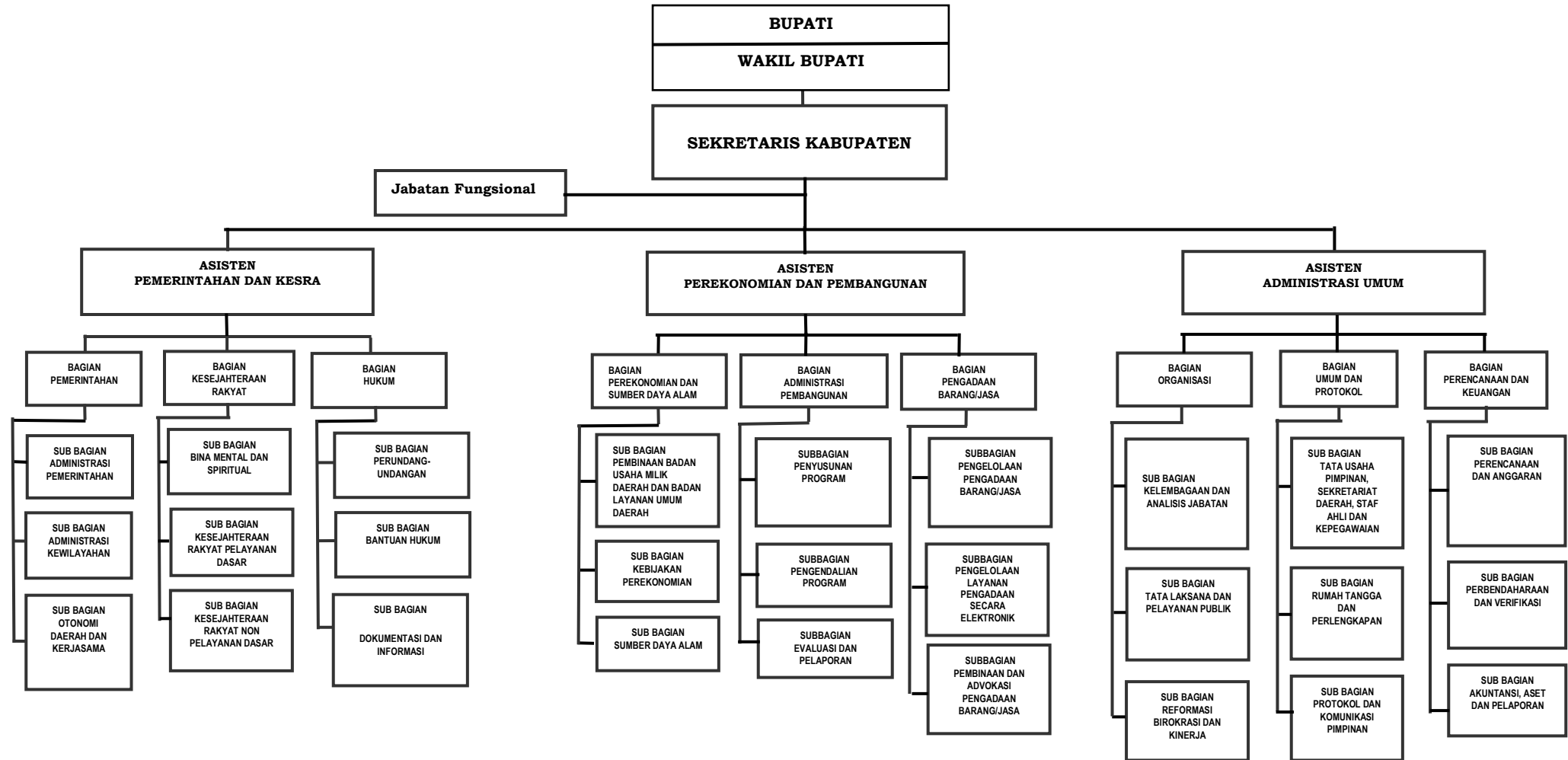
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana dipaparkan dibawah ini :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesra, terdiri dari :
 - 1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3. Bagian Pengadaan barang/Jasa, terdiri dari :

- a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 - 1. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Bagian Umum dan Protokol, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
 - 3. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari :
 - a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Jabatan Fungsional
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional;

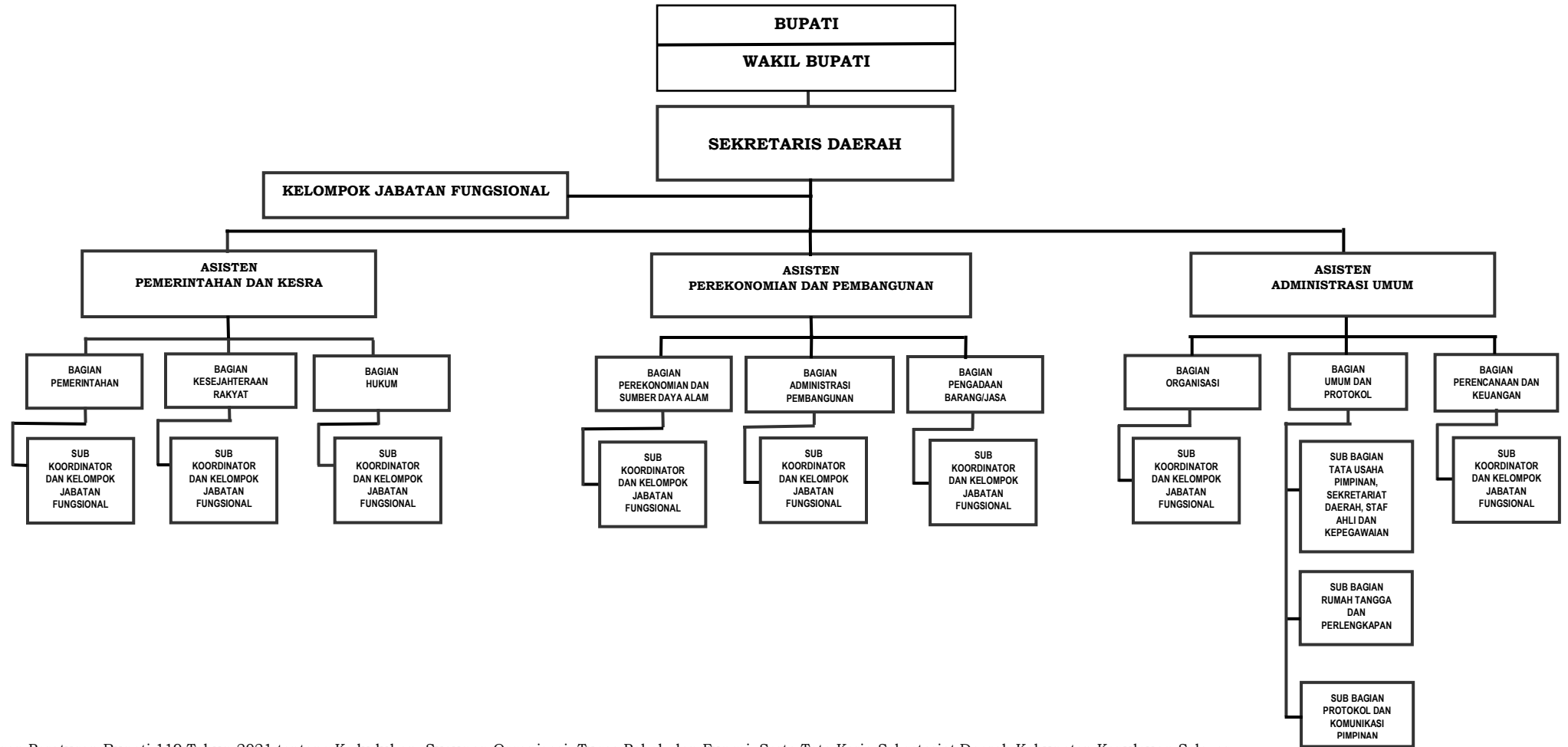
Adapun Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dijabarkan sebagai berikut

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



Sesuai dengan Peraturan Bupati 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



Sesuai dengan Peraturan Bupati 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai Sumber Daya Aparatur, PNS sebanyak 137 orang, PTT sebanyak 77 orang, dan Tenaga Sukarela sebanyak 41 orang, yang dirinci berdasarkan golongan, eselon dan pendidikan sebagai berikut :

1. Klasifikasi menurut Golongan ;

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	20 Orang
2	Golongan III	68 Orang
3	Golongan II	46 Orang
4	Golongan I	3 Orang
5	PTT	77 Orang
6	Tenaga Sukareal	41 Orang

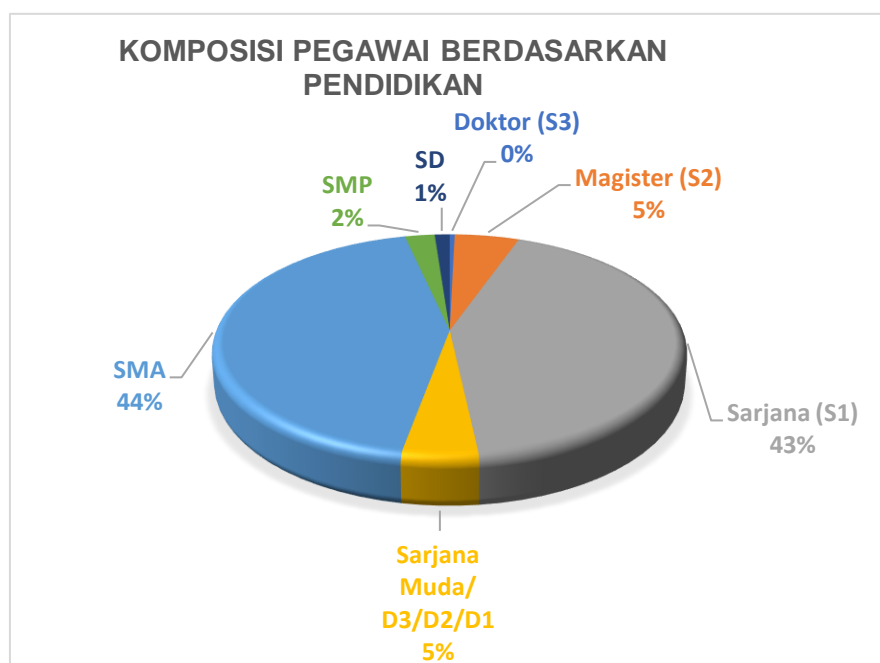
2. Klasifikasi menurut jabatan;

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Eselon II/A	0 Orang
2	Eselon II/B	8 Orang
3	Eselon III/A	10 Orang
4	Eselon IV/A	32 Orang
5	Staf	87 Orang

3. Klasifikasi menurut pendidikan;

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata 3	1 Orang
2	Strata 2	13 Orang
3	Strata 1	109 Orang
4	Sar Mud/DIII/DII/DI	12 Orang
5	SLTA	111 Orang
6	SLTP	6 Orang
7	Sekolah Dasar	3 Orang

Untuk tingkat Pendidikan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki SDM dengan tingkat Pendidikan sebagai berikut : - Pendidikan S3 sebanyak 1 Orang atau 0,39%, - Pendidikan S2 sebanyak 13 Orang atau 5,09%, - Pendidikan S1 sebanyak 109 Orang atau 42,75%, Sarjana Muda/DIII/DII/DI sebanyak 12 Orang atau 4,70%,- Pendidikan SLTA sebanyak 111 Orang atau 43,53%, - Pendidikan SLTP sebanyak 6 Orang atau 2,35%, - Pendidikan SD sebanyak 3 Orang atau 1,18%



2.2.2.Asset / Modal

Asset/Modal yang dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, meliputi;

Data Asset Sekretariat Daerah :

No.	Nama Asset	Jumlah
1	Kendaraan Roda Empat	63 Unit
2	Kendaraan Roda Dua	132 Unit
3	Kursi	487 Buah
4	Meja	199 Buah
5	Lemari	100 Buah
6	AC	60 Buah
7	Televisi	30 Buah
8	Komputer	33 Buah
9	Laptop	61 Buah

10	Notebook	34 Buah
11	Printer	73 Buah
12	Kamera	27 Buah
13	CCTV	24 Buah
14	Sofa	21 Buah
15	Filling Kabinet	20 Buah
16	Mesin Ketik	5 Buah
17	Telpon	34 Buah
18	Rak Kayu	17 Buah
20	Kipas Angin	30 Buah
21	Faxmile	6 Buah
22	Kulkas	19 Buah
23	Meja Komputer	12 Buah
24	Loudspeaker	10 Buah
25	Mixer PVC	6 Buah
26	Buku	293 Buah
27	Bangunan Gedung	28 Uah

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dapat dibagi dalam tiga peran utama yaitu:

1. Pelayanan sebagai pengambil kebijakan

Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan yang ditangani Sekretariat Daerah merupakan unit kerja penentu dalam menyusun dan merumuskan kebijakan pembangunan daerah, administrasi pemerintahan, kemasyarakatan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana/prasarana pemerintah daerah yang diimplementasikan ke dalam rencana strategis sekretariat daerah.

2. Pelayanan sebagai koordinator pembangunan daerah

Pelayanan sebagai koordinator perumusan kebijakan pembangunan daerah, Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai peran koordinatif yang melibatkan

para pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

3. Pelayanan Administrasi

Sekretariat Daerah melakukan kajian, telaahan, evaluasi kebijakan, serta penyediaan data dan informasi sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan pelayanan administratif kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Taget NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah kebijakan yang dikoordinasikan dan penyelenggaraan administrasi yang dikendalikan pada bidang pemerintahan	-	-	100	100	100	100	100	100	0,60	0,91	0,89	0,99	0,91	0,60	0,91	0,89	0,99	0,91
2	Jumlah kebijakan yang dikoordinasikan dan penyelenggaraan administrasi yang dikendalikan pada bidang pembangunan	-	-	100	100	100	100	100	100	0,93	0,98	0,72	0,97	0,97	0,93	0,98	0,72	0,97	0,97
3	Jumlah kebijakan yang dikoordinasikan dan penyelenggaraan administrasi yang dikendalikan pada bidang ekonomi	-	-	100	100	100	100	100	100	0,91	0,75	0,95	0,97	1,00	0,91	0,75	0,95	0,97	1,00
4	Jumlah kebijakan yang dikoordinasikan dan penyelenggaraan administrasi yang dikendalikan pada bidang kesra	-	-	100	100	100	100	100	100	0,98	0,94	0,99	0,96	1,00	0,98	0,94	0,99	0,96	1,00
5	Jumlah kebijakan yang dikoordinasikan dan penyelenggaraan administrasi yang dikendalikan pada bidang organisasi dan kepegawaian	-	-	100	100	100	100	100	100	0,99	1,00	0,94	1,00	0,87	0,99	1,00	0,94	1,00	0,87
6	Jumlah cabang olah raga dan pemuda yang berprestasi level provinsi, nasional dan internasional pada bidang pemuda dan olah raga	-	-	-	100	100	100	100	100	1,00	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0
7	Jumlah kebijakan yang dikoordinasikan dan penyelenggaraan administrasi yang dikendalikan pada bidang hukum	-	-	100	100	100	100	100	100	0,93	0,96	0,82	0,98	0,96	0,93	0,96	0,82	0,98	0,96
8	Cakupan kegiatan kehumasan dan protokoler yang dilaksanakan	-	-	100	100	100	100	100	100	0,99	0,98	0,95	1,00	0,97	0,99	0,98	0,95	1,00	0,97
9	Cakupan kebutuhan perlengkapan dan administrasi umum yang terpenuhi	-	-	100	100	100	100	100	100	0,97	0,90	0,93	0,96	0,97	0,97	0,90	0,93	0,96	0,97
10	Jumlah kebijakan yang dikoordinasikan dan penyelenggaraan administrasi yang dikendalikan pada bidang keuangan	-	-	100	100	100	100	100	100	0,90	0,93	0,87	0,93	0,99	0,90	0,93	0,87	0,93	0,99
11	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di Lembaga eksekutif (Eselon I dan II)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas dapat diketahui bahwa pada target dan realisasi beberapa indikator kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sudah mencapai target dengan baik untuk setiap tahunnya (2016-2020) dengan realisasi capaian rata-rata di atas 82% karena telah mencapai hampir 100% seperti pada indikator ke empat sampai dengan indikator ke sepuluh dengan target yang ditetapkan sebesar 100% yang diperoleh berdasarkan perbandingan dari realisasi yang telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja dimaksud dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan program pembangunan yang dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan terkait dalam mendukung pelayanan kesekretariatan secara maksimal sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan target tanpa ada permasalahan. Sedangkan untuk beberapa indikator yang belum memenuhi target yaitu indikator yang pertama pada tahun pertama (2016) yang realisasi capaiannya hanya sebesar 60%, indikator kedua pada tahun ketiga (2018) dengan realisasi capaiannya hanya 72%, dan indikator ketiga pada tahun kedua (2017) yang hanya mencapai 75%, disebabkan oleh faktor anggaran yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan kegiatan dan adanya perubahan kebijakan serta peniadaan kegiatan yang dianggap tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	SEKRETARIAT DAERAH																	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,040,000,000	1,207,812,800	1,200,000,000	991,000,000	921,070,800	690,599,582	1,041,003,302	1,121,647,605	957,406,351	914,214,705	66.40	86.19	93.47	96.61	99.26	-99.11	-98.68
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	200,000,000	5,000,000	0	0		163,450,000	0	0	0	0.00	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1,925,000,000	3,118,804,000	2,715,000,000	3,504,000,000	2,292,088,400	1,888,303,737	2,996,242,456	2,714,810,200	3,503,331,011	2,292,012,140	98.09	96.07	99.99	99.98	100.00	-98.81	-98.79
	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	1,934,700,000	2,504,866,000	2,400,000,000	2,920,387,150	2,630,070,800	663,416,443	2,375,942,987	2,196,262,891	2,634,670,920	2,578,645,480	34.29	94.85	91.51	90.22	98.04	-98.64	-96.11
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	620,000,000	832,000,000	826,000,000	1,022,000,000	1,020,000,000	341,038,375	830,902,384	825,759,231	1,021,593,513	1,019,041,596	55.01	99.87	99.97	99.96	99.91	-98.35	-97.01
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60,000,000	82,950,000		30,000,000	30,000,000	50,665,199	71,399,545	62,251,360	25,290,000	26,973,500	84.44	86.08	#VALUE!	84.30	89.91	-99.50	-99.47
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	90,300,000	110,330,000	90,000,000	75,000,000	100,000,000	99,574,950	109,944,000	89,761,000	74,984,000	99,594,000	110.27	99.65	99.73	99.98	99.59	-98.89	-99.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	30,000,000	83,000,000	30,000,000	50,000,000	70,000,000	10,646,000	82,758,000	29,879,000	49,995,000	70,000,000	35.49	99.71	99.60	99.99	100.00	-97.67	-93.42
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	20,000,000	72,000,000	20,000,000	40,000,000	60,000,000	2,645,000	71,955,000	19,727,000	39,825,000	60,000,000	13.23	99.94	98.64	99.56	100.00	-97.00	-77.32
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	15,000,000	18,150,000	15,000,000	25,000,000	45,000,000	11,489,982	18,150,000	14,748,500	24,975,000	45,000,000	76.60	100.00	98.32	99.90	100.00	-97.00	-96.08
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Studio dan Komunikasi	20,000,000	24,200,000	20,000,000	20,000,000	40,000,000	12,185,000	24,184,000	19,980,000	19,950,000	40,000,000	60.93	99.93	99.90	99.75	100.00	-98.00	-96.72
	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Perlengkapannya	300,000,000	523,800,000	400,000,000	630,000,000	450,000,000	295,191,023	523,800,000	399,755,500	629,848,000	449,999,000	98.40	100.00	99.94	99.98	100.00	-98.50	-98.48

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100,000,000	171,000,000	130,000,000	72,000,000	80,000,000	68,600,000	148,900,000	114,540,200	71,500,000	44,250,000	68.60	87.08	88.11	99.31	55.31	-99.20	-99.35
	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	230,000,000	403,000,000	303,000,000	350,000,000	530,000,000	223,695,000	392,710,000	302,950,000	349,950,000	445,930,000	97.26	97.45	99.98	99.99	84.14	-97.70	-98.01
	Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	50,000,000	105,000,000	100,000,000	150,000,000	196,880,000	0	62,262,615	97,649,800	103,132,200	195,800,000	0.00	59.30	97.65	68.75	99.45	-96.06	0.00
	Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA	65,000,000	78,650,000	70,000,000	30,000,000	15,000,000	180,000	5,354,950	69,340,000	28,800,000	4,655,000	0.28	6.81	99.06	96.00	31.03	-99.77	-74.14
	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	45,000,000	110,000,000	72,000,000	50,000,000	150,000,000	35,700,000	702,350	71,850,000	44,250,000	129,000,000	79.33	0.64	99.79	88.50	86.00	-96.67	-96.39
	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	250,000,000	495,000,000	332,000,000	500,000,000	850,000,000	169,850,000	473,849,100	331,680,500	476,925,000	798,425,000	67.94	95.73	99.90	95.39	93.93	-96.60	-95.30
	Koordinasi dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	700,000,000	1,100,000,000	1,350,000,000	1,389,000,000	806,943,300	669,781,790	1,002,859,500	1,349,806,179	1,338,991,532	771,876,049	95.68	91.17	99.99	96.40	95.65	-98.85	-98.85
	Penerimaan Tamu-tamu Pemda	850,000,000	1,725,000,000	723,000,000	1,735,000,000	1,022,040,000	829,152,150	1,564,241,031	722,577,420	1,733,663,700	1,021,039,479	97.55	90.68	99.94	99.92	99.90	-98.80	-98.77
	Peningkatan Kapasitas Bupati/Wakil Bupati	40,000,000	100,000,000	150,000,000	10,000,000	0	25,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	62.50	100.00	66.67	0.00	0.00	-	-
	Koordinasi Pemerintahan Bupati/wakil Bupati	90,000,000	323,010,514	324,000,000	10,000,000	0	0	0	323,145,310	10,000,000	0	0.00	0.00	99.74	100.00	0.00	-	0.00
	Belanja Rumah Tangga Bupati/Wakil Bupati	350,000,000	423,500,000	610,000,000	660,000,000	610,000,000	216,294,722	423,495,729	609,995,645	659,997,090	609,954,350	61.80	100.00	100.00	100.00	99.99	-98.26	-97.18
	Penyediaan Bahan Kesehatan/Obat-obatan	350,000,000	423,500,000	350,000,000	0	0	59,380,157	304,062,400	61,488,390	0	0	16.97	71.80	17.57	0.00	0.00	-	-
	Tunjangan Asuransi	150,000,000	36,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	Medical Chekup	0	0	160,000,000	61,188,050	69,929,200	0	0	0	6,555,500	26,130,000	0.00	0.00	0.00	10.71	37.37	0.00	0.00
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	99,200,000	0	0.00	0.00	0.00	99.20	0.00	0.00	0.00
	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	0	0	0	0	400,000,000	0	0	0	0	380,177,883	0.00	0.00	0.00	0.00	95.04	0.00	0.00

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan		
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
	BAGIAN PEMERINTAHAN																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,000,000	1,500,000	0	0	0	0	720,000	0	0	0	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00
	- Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	25,000,000	20,000,000	40,480,000	15,000,000	23,375,000	24,997,500	20,000,000	14,680,000	15,000,000	23,375,000	99.99	100.00	36,26	100.00	100.00	-99.07	-99.06	
	- Pelaksanaan Penunjang Adm. Perkantoran												0.00						
2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	-
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	25,000,000	24,500,000	19,000,000	5,000,000		25,000,000	24,500,000	19,000,000	5,000,000	0	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	-	100.00	-
	- Pengadaan Peralatan gedung kantor	52,000,000	35,000,000	30,000,000	20,000,000	25,000,000	50,187,000	32,340,500	28,996,000	19,697,800	15,939,400	96,51	92,4	96,65	98,49	63,76	-99.52	-99.68	
	- Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												0.00						
	- Peningkatan Kapasitas Camat, Kepala Desa/ Lurah dalam Pembuatan Surat Tanah	50,000,000	0	0	0	0	41,372,550	0	0	0	0	82,74	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	-
4	Program Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah																		
	- Rapat Koordinasi pejabat Pemerintah Daerah	120,000,000	108,500,000	75,000,000	100,000,000	60,000,116	88,012,400	107,105,400	74,235,400	99,925,000	58,627,300	73,34	98,71	99,98	99,9	97,71	-99.50	-99.33	
	- Penyusunan Lakip Setda	40,000,000	30,000,000	0	0	0	40,000,000	30,000,000	0	0	0	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	-
	- Penyusunan Laporan Presensi Kegiatan Bupati Kepulauan selayar	80,000,000	50,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	79,701,800	50,000,000	29,945,200	31,591,900	26,111,200	99,62	100.00	86,56	90,26	74,6	-99.56	-99.67	
	- Rapat Kerja Camat	35,000,000	30,000,000	15,000,000	13,147,000	0	35,000,000	30,000,000	15,000,000	13,147,000	0	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	-	100.00	-

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan	75,000,000	75,000,000	54,000,000	44,420,000	0	71,798,250	75,000,000	53,995,000	44,420,000	0	95,73	100,00	99,9	100,00	0,00	-100,00	-100,00
	- Penyusunan Renstra Setda	50,000,000	40,000,000	0	0	0	50,000,000	40,000,000	0	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	- Penyusunan RENJA	0	0	0	10,000,000	5,000,000	0	0	0	10,000,000	5,000,000	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	- Penyusunan SOP	0	0	0	10,000,000	5,000,000	0	0	0	10,000,000	5,000,000	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	- Penyusunan Laporan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)	50,000,000	0	0	0	0	48,620,000	0	0	0	0	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	- Pelantikan, Serah Terima Jabatan dan Lepas Sambut Bupati Terpilih	495,000,000	0	0	0	0	149,755,300	0	0	0	0	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	- Penyusunan Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Forum Group Discussion Unsur Pimpinan Daerah	0	50,000,000	172,000,000	115,000,000	92,625,000	0	47,525,000	170,625,000	115,000,000	92,625,000	0,00	95,05	99,2	100,00	100,00	0,00	0,00
	- Penerapan dan Pencapaian SPM	0	0	45,000,000	38,800,000	35,000,000	0	0	44,344,900	38,638,400	33,497,100	0,00	0,00	98,54	99,58	95,7	0,00	0,00
	- Pelaksanaan Kegiatan Forgedasi (Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia)	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	14,211,000	0	0,00	0,00	0,00	94,74	0,00	0,00	0,00
5	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah																	
	- Perencanaan Pengadaan Tanah	140,000,000	0	0	0	0	135,824,300	0	0	0	0	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	- Persiapan Pengadaan Tanah	184,179,200	0	0	0	0	103,513,300	0	0	0	0	56,2	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	- Pelaksanaan Pengadaan Tanah	1,300,000,000	0	0	0	0	400,000,000	0	0	0	0	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	- Pensertifikatan Tanah-tanah Aset Pemda	105,000,000	0	0	0	0	95,615,450	0	0	0	0	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	- Pemasangan Patok dan Pemberian Identitas Tanah-tanah Milik Pemda	100,000,000	0	0	0	0	96,044,000	0	0	0	0	96,000	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	- Pemagaran Tanah Aset Pemda di Takabonerate	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	- Pengadaan Tanah Lokasi Pustu Desa Pulo Madu Kecamatan Pasilambena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Peninjauan Lokasi Bandara Perintis Kayuadi	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan																	
	- Fasilitas Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan	100,000,000	0	0	0	0	93,979,800	0	0	0	0	93,970	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
7	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah																	
	- Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan APKASI	35,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-99,29	0,00
	- Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fasilitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah Kepulauan dan Pesisir	0	150,000,000	100,000,000	50,000,000	35,000,000	0	66,231,500	54,523,000	49,872,100	33,394,800	0,00	44,15	54,52	99,74	95,41	0,00	0,00
	- Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	0	0	40,000,000	0	0	0	0	36,526,800	0	0	0,00	0,00	91,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Program Penataan Daerah Otonomi Baru																	
	- Penetapan Kecamatan Percontohan	85,000,000	75,500,000	54,000,000	65,000,000	0	82,075,000	75,500,000	54,000,000	65,000,000	0	96,6	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
	- Pembinaan Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran di Kecamatan	35,000,000	35,000,000	15,000,000	20,000,000	0	34,949,400	35,000,000	13,650,000	20,000,000	0	99,9	100,00	91,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
	- Koordinasi dan Fasilitas Penyiapan Data dan Informasi FIPO	134,820,800	0	0	0	0	129,712,900	0	0	0	0	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	- Pembakuan Nama Rupa Bumi	100,000,000	60,000,000	50,000,000	35,000,000	28,483,000	93,178,500	58,675,900	44,344,800	34,297,300	28,447,400	93,2	97,79	88,68	97,99	99,86	-99,72	-99,69
	- Koordinasi dan Fasilitas Pelaksanaan PATEN	50,000,000	45,000,000	30,000,000	0	0	44,491,050	44,346,800	29,721,200	0	0	88,98	98,54	99,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	- Penetapan dan Penegasan Batas Daerah	100,000,000	45,000,000	75,000,000	40,000,000	40,000,000	60,101,150	44,694,300	68,964,000	39,987,300	39,854,300	60,1	99,32	91,95	99,97	99,64	-99.60	-99.34
	- Pengadaan dan Pemasangan Nama Jalan di ibukota Kecamatan Daratan	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	- Pengadaan dan Pemasangan Nomor Rumah di ibukota Kecamatan Daratan	184,000,000	0	0	0	0	183,475,000	0	0	0	0	99,71	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	- Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah	150,000,000	0	0	0	0	128,200,000	0	0	0	0	85,46	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	BAGIAN HUKUM																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	10,000,000	15,000,000	21,480,000	21,653,000	14,993,731	7,000,000	14,997,300	2,880,000	21,645,200	14,984,000	70.00	99.98	13.41	99.96	99.94	-98.50	-97.86
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7,050,000	5,000,000	0	1,174,000	3,640,000	5,430,000	4,950,000	0	400,000	3,600,000	77.02	99.00	0.00	34.07	98.90	-99.48	-99.34
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0	0	5,000,000	5,000,000	6,000,000	0	0	5,000,000	2,000,000	6,000,000	0.00	0.00	100.00	40.00	100.00	0.00	0.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	10,000,000	10,000,000	6,000,000	6,000,000	0	7,096,800	8,953,700	5,259,500	4,512,000	0	70.97	89.54	87.66	75.20	0.00	-100.00	-100.00
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan																	
	Penyusunan Himpunan Produk Hukum Daerah	20,000,000	20,000,000	25,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	20,000,000	25,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-99.50	-99.50
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH)	40,000,000	50,000,000	30,000,000	50,000,000	44,000,000	40,000,000	49,892,300	27,820,400	49,942,400	43,758,600	100.00	99.78	92.73	99.88	99.45	-98.90	-98.91

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Program Peningkatan Aktivitas Penyediaan Produk Hukum																	
	Penyusunan Ranperda	110,000,000	171,800,000	119,000,000	146,173,000	100,000,000	51,589,400	171,772,300	116,367,600	146,026,000	100,000,000	46.90	99.98	97.79	99.90	100.00	-99.09	-98.06
	Penyusunan Rancangan Peraturan Pelaksanaan Perda	40,000,000	100,000,000	40,000,000	140,000,000	50,000,000	31,454,800	99,754,300	39,999,000	139,967,900	49,550,320	78.64	99.75	100.00	99.98	99.10	-98.75	-98.42
	Sosialisasi Perda	45,000,000	48,200,000	40,000,000	0	49,465,000	45,000,000	48,200,000	34,750,000	0	49,465,000	100.00	100.00	86.88	0.00	100.00	-98.90	-98.90
	Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah	50,000,000	75,000,000	40,000,000	120,000,000	40,000,000	49,958,400	74,307,664	39,691,800	112,673,240	39,896,602	99.92	99.08	99.23	93.89	99.74	-99.20	-99.20
	Pelaksanaan RANHAM	30,000,000	50,000,000	40,000,000	40,000,000	35,000,000	30,000,000	49,224,900	39,293,800	39,825,000	34,645,200	100.00	98.45	98.23	99.56	98.99	-98.83	-98.85
	Penyelenggaraan Kadarkum	70,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	37,000,000	70,000,000	39,608,000	33,241,540	37,737,525	33,180,108	100.00	99.02	83.10	94.34	89.68	-99.47	-99.53
	Sosialisasi/Pelaporan DBH Pajak Rokok	0	0	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0	149,950,000	149,761,700	150,000,000	0.00	0.00	99.97	99.84	100.00	0.00	0.00
	Asistensi/Evaluasi Produk Hukum Desa	0	0	25,000,000	21,000,000	0	0	0	22,950,000	20,999,400	0	0.00	0.00	91.80	100.00	0.00	0.00	0.00
	Workshop Penyusunan Produk Hukum Desa	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	24,412,000	25,375,000	0	0.00	0.00	81.37	84.58	0.00	0.00	0.00
	Program Identifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat																	
	Penanganan Sengketa Litigasi dan Non Litigasi Pemerintah Kab. Kep. Selayar	0	0	300,000,000	215,000,000	232,500,000	0	0	262,456,220	205,556,801	197,497,634	0.00	0.00	87.49	95.61	84.95	0.00	0.00
	Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masy. Miskin	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Program Peningkatan Aktivitas Pengawasan																	
	Pembahasan Tindak Lanjut LHP Pejabat Pengawasan Pemerintah	100,000,000	156,626,000	100,000,000	152,156,100	100,000,000	60,220,350	156,306,500	99,042,300	149,673,554	99,373,400	60.22	99.80	99.04	98.37	99.37	-99.00	-98.35
	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Tingkat Bakorwil	25,000,000	35,000,000	40,000,000	19,643,900	20,000,000	21,478,000	34,953,600	39,179,900	19,643,900	18,683,700	85.91	99.87	97.95	100.00	93.42	-99.20	-99.13
	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Sulsel	40,000,000	50,000,000	40,000,000	70,000,000	36,000,000	40,000,000	49,700,000	37,064,100	69,975,000	35,647,600	100.00	99.40	92.66	99.96	99.02	-99.10	-99.11

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Penyusunan Data Tindak Lanjut LHP APFP	0	0	30,000,000	15,000,000	10,000,000	0	0	29,093,100	15,000,000	9,697,000	0.00	0.00	96.98	100.00	96.97	0.00	0.00
	Penyelenggaraan Penagihan Kerugian Negara/Daerah	0	0	30,000,000	8,200,000	10,000,000	0	0	29,820,000	8,200,000	10,000,000	0.00	0.00	99.40	100.00	100.00	0.00	0.00
	Sosialisasi /Bimtek LHKPN Bagi Pejabat Penyelenggaraan Negara	0	0	30,000,000	50,000,000	40,000,000	0	0	29,939,275	49,749,800	39,135,000	0.00	0.00	99.80	99.50	97.84	0.00	0.00
	Penanganan Perkara dan Proses Hukum Kerugian Daerah	75,000,000	350,000,000	0	0		75,000,000	295,181,408	0	0		100.00	84.34	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Tingkat Regional	25,000,000	2,924,000	0	0		25,000,000	2,924,000	0	0	0	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	100.00
	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Tingkat Kabupaten	25,000,000	450,000	0	0		25,000,000	450,000	0	0	0	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	100.00
	BAGIAN PEMBANGUNAN																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3,000,000	0	0	0	0	2,880,000	0	0	0	0	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	- Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	20,000,000	15,000,000	68,510,000	17,900,000	15,000,000	20,000,000	15,000,000	24,073,800	15,400,000	13,360,584	100.00	100.00	35.14	86.03	89.07	-99.07	-9.59
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
	- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	0	40,000,000	0	0	0	0	29,635,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Pengadaan Peralatan Gedung kantor	29,000,000	0	30,000,000	30,000,000	10,000,000	29,000,000	0	32,968,000	30,000,000	10,000,000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	-23.36	-23.64
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	34,547,000	10,000,000	40,000,000	29,052,000	52,315,525	27,068,110	9,238,040	39,243,195	29,042,817	43,783,954	78.35	92.38	98.11	99.97	83.69	73.41	12.82
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5,000,000	5,000,000	10,000,000	1,953,000	4,150,000	455,000	1,565,000	5,898,345	1,710,000	4,128,000	9.10	31.30	58.98	87.56	99.47	118.02	19.13

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	- Pengelolaan/Pengoperasian Jaringan Internet LPSE	165,000,000	0	0	0	0	158,660,587	0	0	0	0	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Pengadaan Tambahan Server LPSE	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
	- Pendidikan dan Pelatihan Formal, Bimtek dan Sosialisasi	25,000,000	10,000,000	35,000,000	97,624,534	33,968,475	7,489,800	9,993,109	34,800,000	90,938,738	33,968,475	29.96	99.93	99.43	93.15	100.00	4.78	-98.54
	- Study Banding	0	0	0	73,324,000	0	0	0	0	71,374,000	0	0.00	0.00	0.00	97.34	0.00	0.00	0.00
	- Pembekalan Materi dan Ujian Sertifikasi Pengadaan	46,953,000	0	0	0	0	46,953,000	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH																	
	- Pembinaan Administrasi Kegiatan Pembangunan	85,000,000	0	0	0	0	82,858,000	0	0	0	0	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Penyusunan Buku Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan Daerah	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Konsultasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Pembangunan	30,000,000	0	0	0	0	21,683,000	0	0	0	0	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Pembinaan dan Operasional ULP	221,000,000	0	0	0	0	210,368,882	0	0	0	0	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Pembinaan dan Operasional LPSE	55,000,000	0	0	0	0	51,100,000	0	0	0	0	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Monitoring dan Evaluasi kegiatan/Proyek Pembangunan	80,000,000	0	0	0	0	78,800,000	0	0	0	0	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
5	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan																	
	- Pembinaan dan Koordinasi Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA dan E-Monev)	35,000,000	0	0	0	17,100,000	33,698,310	0	0	0	0	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99	0.00
	- Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan DAK	20,000,000	0	0	0	0	13,393,000	0	0	0	0	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Koordinasi dan Pembinaan Jasa Konstruksi	20,000,000	0	0	0	0	17,746,200	0	0	0	0	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan																	
	- Penyusunan Kebijakan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Penyusunan Kebijakan Pedoman Pelaksanaan Kontrak Kerja Pemerintah	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017	12,500,000	0	0	0	0	12,500,000	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Penyusunan Pedoman Kontrak Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017	12,500,000	0	0	0	0	12,500,000	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Bidang Pembangunan																	
	- Pembinaan Administrasi Kegiatan Pembangunan	0	65,000,000	30,000,000	24,605,500	20,013,000	0	63,575,000	12,525,000	21,844,500	17,063,000	0.00	97.81	41.75	88.78	85.26	0.00	0.00
	- Penyusunan Dokumen Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan Daerah	0	15,000,000	15,000,000	27,765,500	10,000,000	0	14,970,000	15,000,000	27,347,257	9,780,497	0.00	99.80	100.00	98.49	97.80	0.00	0.00

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	- Konsultasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Pembangunan	0	40,000,000	70,000,000	86,495,500	68,094,120	0	40,000,000	70,000,000	86,495,500	68,094,000	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	- Monitoring dan Evaluasi kegiatan/Proyek Pembangunan	0	65,000,000	100,000,000		110,000,000	0	65,000,000	97,100,000	0	109,300,000	0.00	100.00	97.10	0.00	99.36	0.00	0.00
	- Monitoring dan Evaluasi kegiatan/Proyek Pembangunan di Kepulauan	0	0	0	79,831,000	0	0	0	0	79,831,000	0	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	- Monitoring dan Evaluasi kegiatan/Proyek Pembangunan di Daratan	0	0	0	38,840,000	0	0	0	0	38,840,000	0	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	- Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan DAK	0	15,000,000	30,000,000	39,264,000	32,452,000	0	14,815,518	28,559,049	37,654,000	31,727,000	0.00	98.77	95.20	95.90	0.00	0.00	0.00
	- Koordinasi dan Pembinaan Jasa Konstruksi	0	15,000,000	30,000,000	0	0	0	0	21,992,444	0	0	0.00	0.00	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2018	0	17,500,000	0	0	0	0	17,500,000	0	0	0	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Penyusunan Pedoman Kontrak Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2018	0	17,500,000	0	0	0	0	17,500,000	0	0	0	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Dukungan Peningkatan Kompetensi Tenaga Konstruksi	0	0	25,000,000	10,000,000	0	0	0	0	9,850,000	0	0.00	0.00	0.00	98.50	0.00	0.00	0.00
	- Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2018	0	0	25,000,000	0	0	0	0	12,782,000	0	0	0.00	0.00	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Penyusunan Kebijakan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2019	0	0	25,000,000	0	0	0	0	4,164,000	0	0	0.00	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Penyusunan Kebijakan Pedoman Penyusunan Kontrak Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2019	0	0	25,000,000	0	0	0	0	4,345,000	0	0	0.00	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	0	0	0	7,300,500	7,300,500	0	0	0	3,701,500	5,420,500	0.00	0.00	0.00	50.70	74.25	0.00	0.00
	- Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	0	0	0	17,680,000	0	0	0	0	17,680,000	0	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	- Lokakarya Mini (Lokmin) Evaluasi Pembangunan	0	0	0	90,515,000	130,515,000	0	0	0	90,515,000	130,455,000	0.00	0.00	0.00	100.00	99.95	0.00	0.00

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
	- Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	77,711,600	96,000,000	77,400,000	132,074,000	103,400,000	55,924,100	93,550,400	73,013,900	131,346,600	103,070,700	71.96	97.45	94.33	99.45	99.68	-98.67	-98.16
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
	- Pengadaan kendaraan dinas/operasional																	
	- Pengadaan Peralatan Gedung kantor	15,938,400	40,000,000	0	15,000,000	0	15,938,400	40,000,000	0	15,000,000	0	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00	-100.00
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	65,000,000	106,250,000	62,200,000	84,500,000	58,750,000	62,910,750	102,963,500	61,754,400	81,890,815	55,843,300	96.79	96.91	99.28	96.91	95.05	-99.10	-99.11
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4,000,000	5,000,000	3,000,000	6,000,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000	3,000,000	5,980,000	3,000,000	100.00	100.00	100.00	99.67	100.00	-99.25	-99.25
	- Pengadaan Peralatan kantor	0	0	0	0	13,593,000	0	0	0	0	13,590,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial																	
	- Pemberiaan Santunan kepada Anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan RI dan Onderstand	252,000,000	252,000,000	207,500,000	0	0	252,000,000	231,000,000	201,425,000	0	0	100.00	91.67	97.07	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	- Pembinaan Siswa Terhadap bahaya Narkoba	92,000,000	0	0	0	0	92,000,000	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	- Pembinaan UKS Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar	90,270,000	85,000,000				90,270,000	85,000,000				100.00	100.00				-100.00	-100.00

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	- Reword Bagi Individu Berprestasi																	
4	Program Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Agama																	
	- Pelaksanaan Safari Ramadhan di Kecamatan Daratan	98,750,00 0	80,000,00 0	34,950,00 0	0	0	98,750,00 0	80,000,00 0	34,950,00 0	0	0	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	- 100.00	- 100.00
	- Pelaksanaan Zikir dan Doa Akhir Tahun	60,000,00 0	50,000,00 0	0	0	0	60,000,00 0	50,000,00 0	0	0	0	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	- 100.00	- 100.00
	- Sosialisasi Zakat	75,000,00 0	0	0	0	0	75,000,00 0	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 100.00	- 100.00
	- Peningkatan Pengelolaan BAZNAS Kabupaten	0	96,000,00 0	0	0	0	0	96,000,00 0	0	0	0	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Program Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara																	
	- Peringatan Hari-hari Besar Nasional	127,000,00 00	100,000,00 00	82,100,00 0	0	0	126,600,00 00	97,900,00 0	82,100,00 0	0	0	99.69	97.90	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- peringatan Hari-hari Besar Islam	85,000,00 0	0	0	0	0	84,760,00 0	0	0	0	0	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Program Pemahaman tentang Narkoba dan HIV/AIDS																	
	- Pelaksanaan Hari Anti Narkoba dan HIV/AIDS	40,000,00 0	25,000,00 0	0	0	0	40,000,00 0	25,000,00 0	0	0	0	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	- 100.00	- 100.00
	- Pelaksanaan Penyuluhan Tentang HIV/AIDS	70,000,00 0	25,000,00 0	0	0	0	65,620,00 0	25,000,00 0	0	0	0	93.74	100.00	0.00	0.00	0.00	- 100.00	- 100.00
7	Program Pelayanan Kehidupan Beragama																	

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	- Pengelolaan dan Evaluasi kepada Pendidik Tilawa Qur'an, Kaligrafi, Hafidz, Kitab Kuning dan Imam Masjid Agung	100,000,000	85,000,000	60,000,000	0	0	99,330,000	85,000,000	60,000,000	0	0	99.33	100.00	100.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	- Pembinaan Pendidikan Al-Qur'an	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	- Pelaksanaan Pemberangkatan Jamaah Haji	145,000,000	145,000,000	152,500,000	157,200,000	0	144,813,000	145,000,000	152,186,000	157,200,000	0	99.87	100.00	99.79	100.00	0.00	-100.00	-100.00
	- Pelaksanaan Pemulangan Jamaah Haji	145,000,000	145,000,000	152,500,000	157,200,000	0	144,551,000	145,000,000	151,396,000	157,096,400	0	99.69	100.00	99.28	99.93	0.00	-100.00	-100.00
	- Pelaksana Manasik Haji																	
	- Pelaksanaan Bimbingan Penyelenggaraan Jenazah	72,600,000	150,000,000	0	0	0	72,600,000	145,269,800	0	0	0	100.00	96.85	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	- Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi	200,000,000	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0	199,278,300	0	0	100.00	0.00	99.64	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	- Pelaksanaan STQ Tingkat Provinsi	0	110,000,000	0	0	0	0	109,990,000	0	0	0	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Seleksi MTQ Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar	65,000,000	0	18,000,000	0	0	65,000,000	0	18,000,000	0	0	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	- Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar	0	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0	0	0	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Pembinaan Qari-Qariah	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	- Pelaksanaan Seleksi Guru BTQ	0	130,000,000	0	0	0	0	130,000,000	0	0	0	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Pembinaan Guru BTQ dan Qari-Qariah	90,000,000	0	0	0	0	89,429,000	0	0	0	0	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	- Pelaksanaan Ujian Munaqasyah	100,000,000	90,000,000	45,000,000	0	0	100,000,000	90,000,000	44,110,000	0	0	100.00	100.00	98.02	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	- Pembuatan Ijazah Santri-santri Pendidikan Al-Qur'an	25,000,000	20,000,000	10,000,000	0	0	25,000,000	20,000,000	10,000,000	0	0	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	- Pelaksannan Verifikasi Proposal Rumah-rumah Ibadah	35,000,000	30,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	34,325,000	29,950,000	8,700,000	9,875,000	10,000,000	98.07	99.83	87.00	98.75	100.00	-99.71	-99.71

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	- Pembinaan Rohani Islam	0	50,000,000	20,000,000	0	0	0	50,000,000	20,000,000	0	0	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Pengelolaan dan Evaluasi Kegiatan Pendidikan AL-Qur'an	0	837,750,000	0	0	0	0	837,625,000	0	0	0	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Pelaksanaan Peringatan Nuzul Qur'an	0	38,000,000	0	0	0	0	38,000,000	0	0	0	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Pelaksanaan Peringatan Isra' Miraj	0	38,000,000	0	0	0	0	38,000,000	0	0	0	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Pelaksanaan Peringatan Maulid NABI Muhammad SAW	0	38,000,000	0	0	0	0	38,000,000	0	0	0	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Pelaksanaan Peringatan Tahun Baru Islam	0	38,000,000	0	0	0	0	38,000,000	0	0	0	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Fasilitas Penyediaan Al-Qur'an Per Juz, Tafsir, Iqra', dan Buku Tuntunan Sholat untuk Masjid, TPA dan Majelis Ta'lim	0	150,000,000	150,000,000	50,000,000	0	0	146,101,900	40,047,800	0	0	0.00	0.00	97.40	80.10	0.00	0.00	0.00
	- Pengelolaan Pendidikan Al-Qur'an (Insentif Guru BTQ)	0	0	1,018,000,000	0	0	0	1,017,475,000	0	0	0	0.00	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama																	
	- Pelaksanaan Ujian Munaqasyah	0	0	0	45,000,000	0	0	0	0	44,300,000	0	0.00	0.00	0.00	98.44	0.00	0.00	0.00
	- Peringatan Hari-Hari Besar Islam	0	0	0	105,000,000	0	0	0	0	104,950,000	0	0.00	0.00	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00
	- Pelaksanaan Safari Ramadhan di Kecamatan Daratan	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	39,750,000	0	0.00	0.00	0.00	99.38	0.00	0.00	0.00
	- Pelaksanaan Safari Ramadhan di Kecamatan Kepulauan	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	19,900,000	0	0.00	0.00	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00
	- Pelaksanaan Zikir dan Doa Akhir Tahun	0	0	0	23,500,000	0	0	0	0	21,465,000	0	0.00	0.00	0.00	91.34	0.00	0.00	0.00
	- Pembinaan Rohani	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	34,000,000	0	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
	- Pembuatan Ijazah Pendidikan Al-Qur'an	0	0	0	10,000,000	5,000,000	0	0	0	10,000,000	5,000,000				100.00	100.00	0.00	0.00

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	- Pelaksanaan STQ Tingkat Provinsi	0	0	0	115,000,000	0	0	0	0	114,200,000	0	0.00	0.00	0.00	99.30	0.00	0.00	0.00
	- Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi	0	0	0	0	299,064,000	0	0	0	0	298,397,900	0.00	0.00	0.00	0.00	99.78	0.00	0.00
	- Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten	0	0	0	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	- Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten	0	0	0	0	44,400,000	0	0	0	0	44,400,000	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	- Peningkatan Pengelolaan BAZNAS Kabupaten	0	0	0	81,250,000	0	0	0	0	81,250,000	0	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	- Pengelolaan dan Evaluasi kepada Pendidik Tilawa Qur'an, Kaligrafi, Hafidz, Kitab Kuning dan Imam Masjid Agung	0	0	0	58,400,000	27,600,000	0	0	0	58,400,000	27,600,000	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	- Gerakan Sadar Zakat	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	49,000,000	0	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
	- Pembinaan Kader Penyelenggaraan Jenazah	0	0	0	79,835,000	0	0	0	0	79,485,000	0	0.00	0.00	0.00	99.56	0.00	0.00	0.00
	- Pengelolaan Pendidikan Al-Qur'an (Insentif Guru BTQ)	0	0	0	1,013,500,000	901,000,000	0	0	0	984,250,000	900,950,000	0.00	0.00	0.00	97.11	99.99	0.00	0.00
9	Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan																	
	- Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
10	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pembangunan Bidang Kesra																	
	- Pemberiaan Santunan kepada Anggota Veteran Pejuang	0	0	0	184,800,000	155,950,000	0	0	0	184,800,000	155,950,000	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	- Peringatan Hari-hari Besar Nasional	0	0	0	105,000,000	75,000,000	0	0	0	103,700,000	75,000,000	0.00	0.00	0.00	98.76	100.00	0.00	0.00
	- Pelaksanaan Hari Anti Narkoba	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan		
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
	BAGIAN EKONOMI																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
	Pelaksanaan penunjang administrasi perkantoran	47,000,000	41,495,000	39,240,000	26,375,000	23,705,000	39,622,750	41,186,000	3,480,000	26,375,000	23,705,000	84.30	99.26	8.87	100.00	100.00	-16%	-12%	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	40,000,000					35,816,000					89.54						-100%	-100%
	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	10,000,000	5,000,000	12,000,000	20,000,000		10,000,000	5,000,000	12,000,000	20,000,000		100.00	100.00	100.00	100.00	26%	26%	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47,500,000	49,600,000	16,200,000	36,665,000	38,041,639	45,940,850	48,688,592	16,175,000	34,124,239	37,320,000	96.72	98.16	99.85	93.07	98.10	-5%	-5%	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3,595,000	3,000,000	5,000,000	5,425,000	10,000,000	3,359,000	2,996,000	5,000,000	4,850,000	10,000,000	93.44	99.87	100.00	89.40	100.00	29%	31%	
3.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan																		
	Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Dana Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	25,286,000	0	0	0	0	24,486,000	0	0	0	0	96.84							
	Koordinasi, Pengendalian Dan Pengawasan Distribusi Raskin	75,000,000					73,500,000					98.00							
4.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat																		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	170,319,250					169,669,250					99.62							
	Penyusunan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok, Sosialisasi Perda Kawasan tanpa Rokok dan Pemantauan Label Cukai Rokok	72,799,750					27,711,500					38.07							
5.	Program Pengembangan Data dan Informasi																		

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Sentra-Sentra Industri UKM dan PKL	120,000,000					119,028,800					99.19						
	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Distribusi BBM dan Gas Elpiji	110,000,000					109,505,000					99.55						
	Koordinasi Pembinaan BUMD dan Investasi Daerah	48,500,000					47,940,000					98.85						
	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	60,000,000					51,706,700					86.18						
	Koordinasi dan Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok	55,000,000					50,260,000					91.38						
6.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																	
	Koordinasi Pembinaan Industri Rumah Tangga	50,000,000					43,297,000					86.59						
	Temu Usaha di Bidang Ekonomi	45,000,000					43,750,000					97.22						
	Peningkatan Promosi dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah																	
	Koordinasi Peningkatan Kerjasama Pihak Ketiga					30,000,000				29,649,400					98.83			
	Koordinasi Peningkatan Pengelolaan BUMD					52,670,000				52,670,000					100.00			
7.	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Bidang Ekonomi																	
	Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Dana Pernerdayaan Ekonomi Rakyat		200,000,000	135,000,000				119,300,000	135,000,000			59.65	100.00				-33%	13%
	Koordinasi, Pemantauan Dan Pengawasan Distribusi Raskin		80,000,000					79,178,000				98.97						
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Distribusi BBM dan Gas Elpiji		80,000,000	45,000,000	50,000,000	77,711,000		79,242,900	44,972,700	49,901,609	77,705,567	99.05	99.94	99.80	99.99		-1%	-1%
	Koordinasi Pembinaan BUMD dan Investasi Daerah		60,000,000	50,000,000				50,281,900	49,828,400			83.80	99.66				-17%	-1%

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)		70,000,000	90,000,000	76,000,000			68,975,000	89,670,208	66,581,989			98.54	99.63	87.61		4%	-2%
	Koordinasi dan Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok		50,000,000	40,000,000	25,000,000			47,800,000	39,700,000	24,225,000			95.60	99.25	96.90		-29%	-29%
	Koordinasi Pembinaan Industri Rumah Tangga		60,000,000					51,248,400					85.41					
	Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Sentra-Sentra Industri UKM dan PKL		170,000,000	40,000,000				166,938,560	39,850,000				98.20	99.63			-76%	-76%
	Koordinasi Updating Data lingkup Ekonomi		30,000,000	35,000,000		12,700,000		26,428,000	33,800,000		12,700,000		88.09	96.57			-35%	-31%
	Monitoring dan Evaluasi KUR Daerah		50,000,000	30,000,000				48,861,800	29,314,200				97.72	97.71			-40%	-40%
	Study Kelayakan Ekonomi dan Keuangan Persiapan Kawasan Ekonomi Khusus Selayar Bidang Pariwisata		250,000,000					12,682,600					5.07					
	Pemantauan Label Cukai Rokok (DBH-CHT)		81,249,000					72,190,400					88.85					
	Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai (DBH-CHT)		215,905,000	109,665,000				206,828,800	108,947,508				95.80	99.35			-49%	-47%
	Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Program Gratis		50,000,000	30,000,000				34,207,000	28,265,000				68.41	94.22			-40%	-17%
	Peningkatan Promosi, Kerjasama Industri dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah			65,000,000					65,000,000				100.00					
	Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha			30,000,000		19,630,000			29,788,000		19,440,000			99.29		99.03	-35%	-35%
	Workshop Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah			50,000,000					49,533,000				99.07					
	Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)					87,860,000					87,847,253					99.99		
8.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial																	
	Penyediaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang terkena			109,665,000					108,218,515				98.68					

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	penyakit akibat dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya																	
9.	Program Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan																	
	Koordinasi, Sosialisasi, Evaluasi dan Penagihan Tunggakan Kredit Dana Pemberdayaan Ekonomi Rakyat				275,000,000	160,000,000				274,650,000	160,000,000				99.87	100.00	-42%	-42%
	Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Program Gratis				23,475,000					20,395,000					86.88			
	Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Sentra-Sentra Industri UKM dan PKL				38,550,000					38,549,000					100.00			
	Koordinasi Updating Data Lingkup Ekonomi				21,950,000					12,874,000					58.65			
	Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)				43,475,000					39,733,864					91.39			
	Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha				25,000,000					21,287,000					85.15			
	Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Sentra-Sentra Produksi UKM dan PKL					32,275,000					32,225,000					99.85		
10.	Pogram Peningkatan Kerjasama Pihak Ketiga																	
	Pembinaan BUMD dan Investasi Daerah				73,100,000					70,693,200					96.71			
	Peningkatan Promosi dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah				84,789,000					84,785,446					100.00			
	Koordinasi Peningkatan Kerjasama Pihak Ketiga				22,571,000					21,971,000					97.34			
11.	Program Kajian Pengembangan Potensi Daerah																	
	Kajian Pengembangan Potensi Perikanan dan Kelautan				125,625,000					124,420,723					99.04			
	Kajian Pengembangan Potensi Pertanian dan Perkebunan				150,000,000					148,905,000					99.27			

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1 2.	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBH CHT)																	
	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Cukai Palsu				118,871,030	47,153,025				117,692,834	47,153,025				99.01	100.00	-60%	-60%
1 3.	Koordinasi dan Fasilitasi Program Peningkatan Derajat Kesejahteraan Masyarakat																	
	Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Program Gratis					33,200,000					33,200,000					100.00		
	Koordinasi dan Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok					9,145,000					9,145,000					100.00		
	Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)					55,144,000					55,144,000					100.00		
1 4.	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBH-CHT)																	
	Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai					42,153,025					42,153,025					100.00		
	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN																	
1	Program Pelayanan Admistrasi Perkantoran		30,000,000	163,240,000	421,000,000	223,770,000	0											
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
	Rapat-rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	0	0	140,200,000	369,330,000	150,000,000	0	0	139,903,978	366,184,437	138,950,617	0.00	0.00	100.21	100.86	107.95	0.00	0.00
	Pelaksanaan penunjang administrasi perkantoran	0	46,441,495	44,800,000	83,270,000	68,770,000	0	42,516,376	29,224,199	66,155,689	68,225,000	0.00	109.23	153.30	125.87	100.80	0.00	0.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	145,000,000	100,000,000	182,000,000	500,050,000	0					0.00						
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0	22,000,000	0	0	0	0	21,700,000	0	0.00	0.00	0.00	101.38	0.00	0.00	0.00

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	113,500,000	0	0	0	0	101,900,000	0	0	0	0.00	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	10,000,000	0	0	0	0	3,716,730	0	0	0	0.00	269.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	18,924,000	0.00	0.00	0.00	0.00	105.69	0.00	0.00
	Pengelolaan/Pengoperasian Jaringan Internet LPSE	0	160,000,000	100,000,000	160,000,000	289,600,000	0	158,595,588	92,514,096	158,595,580	274,330,082	0.00	100.89	108.09	100.89	105.57	0.00	0.00
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	49,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	102.04	0.00	0.00
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	0	0	0	120,450,000	0	0	0	0	120,450,000	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Pengadaan Mebeleur	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	7,100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	140.85	0.00	0.00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	30,000,000	30,000,000	104,000,000	43,050,000	0					0.00						
	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	0	40,000,000	30,000,000	104,000,000	43,050,000	0	39,469,000	30,000,000	85,250,000	39,950,000	0.00	101.35	100.00	121.99	107.76	0.00	0.00
4	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Bidang Pembangunan	0	575,000,000	370,600,000	350,000,000	0	0				0	0.00						
	Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembinaan	0	30,000,000	0	0	0	0	29,031,470	0	0	0	0.00	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fasilitasi Penanganan Masalah Hukum	0	50,000,000	0	0	0	0	49,676,300	0	0	0	0.00	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dukungan Operasional Pokja	0	406,140,000	300,000,000	100,000,000	0	0	388,558,000	299,500,000	49,000,000		0.00	104.52	100.17	204.08	0.00	0.00	0.00
	Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan	0	30,000,000	0	0	0	0	29,166,820	0	0	0	0.00	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan SIPBJP	0	30,000,000	0	0	0	0	29,604,628	0	0	0	0.00	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pembinaan dan Operasional LPSE	0	30,000,000	20,000,000	0	0	0	29,316,560	5,600,000			0.00	102.33	357.14	0.00	0.00	0.00	0.00

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Penyebarluasan Informasi/Regulasi PBJP	0	25,000,000	0	0	0	0	24,667,328	0	0	0	0.00	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pengelolaan Data dan Informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Asisten dan Fasilitasi SPSE Kepada Stakeholder	0	20,000,000	0	0	0	0	6,562,800	0	0	0	0.00	304.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pembinaan dan Koordinasi TEPPA dan E- Monev	0	20,600,000	20,600,000	0	0	0	29,198,600	15,392,050	0	0	0.00	70.55	133.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sosialisasi Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	0	0	30,000,000	0	0	0	0	17,390,462	0	0	0.00	0.00	172.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	122,200,000	130,000,000	357,200,000	280,000,000	151,525,820	122,066,200	129,980,600	318,187,173	279,481,590	121,500,033	99.89	99.99	89.08	99.81	80.18	-98.76	-99.00
	a. Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	7,200,000	10,000,000	20,000,000	15,000,000	10,000,000	7,200,000	10,000,000	11,000,000	15,000,000	10,000,000	100.00	100.00	55.00	100.00	100.00	-98.61	-98.61
	b. Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	40,000,000	40,000,000	20,000,000	10,000,000		40,000,000	40,000,000	20,000,000	10,000,000		100.00	100.00	100.00	100.00		-100.00	100.00
	c. Pengadaan Buku Kerja	35,000,000	40,000,000	21,000,000			34,982,200	39,982,200	21,000,000			99.95	99.96	100.00			-100.00	100.00
	d. Pembuatan Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil (Id Card)	40,000,000	40,000,000	30,000,000	20,000,000	15,000,000	39,884,000	39,998,400	30,000,000	20,000,000	8,825,800	99.71	100.00	100.00	100.00	58.84	-99.63	-99.78
	e. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah			236,200,000	235,000,000	126,525,820			236,187,173	234,481,590	102,674,820			99.99	99.78	81.15	0.00	0.00
	f. Pengumpul Data Profil Pejabat Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar			30,000,000					0					0.00			0.00	0.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	40,000,000	50,000,000	26,000,000	55,000,000	25,000,000	39,996,000	50,000,000	26,000,000	55,000,000	24,400,000	99.99	100.00	100.00	100.00	97.60	-99.38	-99.39
	a. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	20,000,000	20,000,000		25,000,000		20,000,000	20,000,000		25,000,000		100.00	100.00		100.00		-100.00	100.00

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	10,000,000	20,000,000	20,000,000	25,000,000	20,000,000	9,996,000	20,000,000	20,000,000	25,000,000	20,000,000	99.96	100.00	100.00	100.00	100.00	-98.00	-98.00
	c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	10,000,000	10,000,000	6,000,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000	10,000,000	6,000,000	5,000,000	4,400,000	100.00	100.00	100.00	100.00	88.00	-99.50	-99.56
3	Program Ketatalaksanaan Perangkat Daerah			102,000,000	95,000,000	31,030,000			101,925,000	93,764,116	31,029,100			99.93	98.70	100.00	0.00	0.00
	a. Penyusunan Monitoring dan Evaluasi SOP	40,000,000	50,000,000	50,000,000	30,000,000	10,000,000	38,965,800	49,991,400	49,997,000	29,991,876	10,000,000	97.41	99.98	99.99	99.97	100.00	-99.75	-99.74
	b. Fasilitasi Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	40,000,000	45,000,000	20,000,000	50,000,000	21,030,000	40,000,000	44,936,200	19,928,000	49,897,240	21,029,100	100.00	99.86	99.64	99.79	100.00	-99.47	-99.47
	c. Fasilitasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal																0.00	0.00
	d. Penilaian Abdibakti Tani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Berprestasi Bidang Pertanian Kabupaten Kepulauan Selayar			12,000,000	15,000,000				12,000,000	13,875,000				100.00	92.50		0.00	0.00
	e. Penerapan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar			20,000,000					20,000,000					100.00			0.00	0.00
	f. Fasilitasi Monev Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	40,000,000					39,908,800					99.77					-100.00	-100.00
4	Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Selayar			15,000,000	70,000,000	22,920,000			15,000,000	69,199,300	17,205,000			100.00	98.86	75.07	0.00	0.00
	a. Evaluasi Pelaksanaan Roadmap Birokrasi Pemkab Kepulauan Selayar				50,000,000	12,920,000				49,199,300	7,225,000				98.40	55.92	0.00	0.00
	b. Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah			15,000,000	20,000,000	10,000,000			15,000,000	20,000,000	9,980,000			100.00	100.00	99.80	0.00	0.00
5	Program Penataan Kelembagaan Daerah		100,000,000	95,000,000		164,100,000		99,328,250	94,942,440		153,286,601		99.33	99.94		93.41	0.00	0.00
	a. Evaluasi Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah	100,000,000	100,000,000	60,000,000		40,000,000	99,413,229	99,328,250	59,979,497		33,698,056	99.41	99.33	99.97		84.25	-99.60	-99.66

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	b. Fasilitas Penyusunan Tupoksi SKPD	77,800,000					77,313,189					99.37					-100.00	-100.00
	c. Evaluasi SOTK OPD	75,000,000		35,000,000		25,000,000	74,629,254		34,962,943		24,865,445	99.51	99.89		99.46	-99.67	-99.67	
	d. Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah					99,100,000				94,723,100					95.58	0.00	0.00	
	e. Fasilitas Penyusunan Perubahan Pertama Peraturan Bupati Tentang Pakaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	25,000,000					24,932,800					99.73				-100.00	-100.00	
	f. Penyusunan Draf Rancangan Perda Kelembagaan	75,000,000					74,562,700					99.42				-100.00	-100.00	
	g. Penyusunan Naskah Akademik tentang Ranperda Kelembagaan	25,000,000					24,932,800					99.73				-100.00	-100.00	
6	Program Peningkatan Kualitas Aparatur		145,000,000	60,000,000	75,000,000	14,100,000		144,499,000	60,000,000	74,949,070	9,592,400	99.65	100.00	99.93	68.03	0.00	0.00	
	a. Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Setda		45,000,000	20,000,000	15,000,000			44,884,600	20,000,000	15,000,000		99.74	100.00	100.00		0.00	0.00	
	b. Fasilitas Penyusunan Pedoman dan Pemetaan Aparatur		100,000,000					99,614,400				99.61				0.00	0.00	
	c. Fasilitas Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan															0.00	0.00	
	d. Validasi Evaluasi Jabatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar			20,000,000					20,000,000					100.00		0.00	0.00	
	e. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja UPTD Kabupaten Kepulauan Selayar			20,000,000					20,000,000					100.00		0.00	0.00	
	f. Penyesuaian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar				60,000,000	14,100,000				59,949,070	9,592,400			99.92	68.03	0.00	0.00	
7	Program Peningkatan Pelayanan Aparatur		125,000,000	55,000,000				124,689,700	54,890,243			99.75	99.80			0.00	0.00	

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	a. Pembinaan dan Fasilitas Mutu Pelayanan Publik		45,000,000	20,000,000				44,945,300	19,927,300				99.88	99.64			0.00	0.00
	b. Evaluasi Penyusunan SOTK SKPD		80,000,000	35,000,000				79,744,400	34,962,943				99.68	99.89			0.00	0.00
	BAGIAN UMUM																	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	43,000,000	0	0	0	0	29,491,800	0	0	0	0	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	38,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Studio dan Komunikasi	10,000,000	0	0	0	0	3,380,000	0	0	0	0	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	Pengelolaan Komunikasi SSB/Telkomda/PABX	125,000,000	0	0	0	0	56,447,750	0	0	0	0	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	129,000,000	0	0	0	0	52,485,400	0	0	0	0	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	35,000,000	0	0	0	0	12,398,000	0	0	0	0	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10,000,000	0	0	0	0	1,825,000	0	0	0	0	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	BAGIAN PERLENGKAPAN																	
1	Program Pelayanan Administrasi																	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		155,450,000	100,000,000	77,000,000	60,000,000		104,358,000	100,000,000	75,000,000	60,000,000	0.00	67.13	100.00	97.40	100.00	0.00	0.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	45,000,000		200,000,000	300,000,000	305,000,000	45,000,000		200,000,000	250,000,000	237,881,074	100.00	0.00	100.00	83.33	77.99	-93.22	-94.71

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Kendaraan Dinas/Operasional																	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			90,000,000	60,000,000	45,000,000			90,000,000	60,000,000	45,000,000	0.00	0.00	100.000	100.000	100.000	0.00	0.00
	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	56,000,000	119,400,000	150,000,000	120,000,000	90,993,000	56,000,000	119,248,000	150,000,000	120,000,000	90,928,400	100.000	99.877	100.000	100.000	99.933	-98.38	-98.38
	Pelaksanaan HUT Proklamasi	100,000,000	100,000,000	100,000,000	119,000,000	-	100,000,000	100,000,000	99,849,000	110,000,000	-	100.000	100.000	99.85	92.44	0.00	0.00	0.00
	Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Umum Perlengkapan	138,000,000	150,000,000	100,000,000	166,000,000	174,870,460	138,000,000	130,000,000	90,000,000	156,000,000	172,429,450	100.000	86.677	90.000	93.988	98.600	-98.73	-98.75
	Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang			25,000,000	47,000,000	12,094,000			24,874,000	40,000,000	12,089,000	0.00	0.00	99.50	85.11	99.96	0.00	0.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Publik		50,000,000	50,000,000	50,000,000	15,000,000		50,000,000	49,845,200	50,000,000	9,113,000	0.00	100.000	99.69	100.000	60.75	0.00	0.00
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor			35,000,000	45,500,000	-			34,977,600	45,500,000	-	0.00	0.00	99.94	100.000	0.00	0.00	0.00
	Penunjang Kegiatan Pemerintah Daerah			50,000,000	60,000,000	57,435,000			49,880,000	60,000,000	57,432,500	0.00	0.00	99.76	100.000	100.000	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1,441,300,000	1,295,000,000	200,000,000	547,000,000	1,200,000,000	1,441,300,000	1,290,000,000	199,946,500	547,000,000	1,074,800,000	100.000	99.61	99.97	100.000	89.57	-99.17	-99.25
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	210,000,000	280,000,000	400,000,000	312,250,000	78,064,300	210,000,000	280,000,000	399,883,875	312,250,000	77,816,100	100.000	100.000	99.97	100.000	99.68	-99.63	-99.63
	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas				387,750,000	102,776,000				387,750,000	102,425,600	0.00	0.00	0.00	100.000	99.66	0.00	0.00
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	68,700,000	365,950,000	200,000,000	195,000,000	162,300,000	68,700,000	365,950,000	199,737,500	195,000,000	157,764,000	100.000	100.000	99.87	100.000	97.21	-97.64	-97.70
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	80,000,000	123,000,000	75,000,000	100,000,000	50,000,000	80,000,000	123,000,000	74,203,250	100,000,000	35,000,000	100.000	100.000	98.94	100.000	70.00	-99.38	-99.56
	Pengadaan Meubilier		319,500,000	100,000,000	140,000,000	97,000,000		319,500,000	100,000,000	140,000,000	97,000,000	0.00	100.000	100.000	100.000	100.000	0.00	0.00

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Pengadaan Mesin			600,000,000	-	-					-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	175,000,000	225,000,000	250,000,000	345,000,000	390,000,000	175,000,000	225,000,000	250,000,000	345,000,000	389,994,700	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-97.77	-97.77
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	110,000,000	225,000,000	350,000,000	435,000,000	343,000,000	110,000,000	200,000,000	350,000,000	435,000,000	320,843,000	100.00	88.89	100.00	100.00	93.54	-96.88	-97.08
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas	50,000,000	97,500,000	200,000,000	175,000,000	75,636,900	50,000,000	97,500,000	200,000,000	175,000,000	75,524,720	100.00	100.00	100.00	100.00	99.85	-98.49	-98.49
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	80,000,000	50,000,000	90,000,000	50,000,000	30,000,000	80,000,000	50,000,000	90,000,000	50,000,000	26,981,950	100.00	100.00	100.00	100.00	89.94	-99.63	-99.66
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan Dinas			100,000,000	100,000,000	63,498,500			100,000,000	100,000,000	63,491,500	0.00	0.00	100.00	100.00	99.99	0.00	0.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			50,000,000	30,000,000	10,600,000			49,910,000	30,000,000	5,450,000	0.00	0.00	99.82	100.00	51.42	0.00	0.00
	Pelayanan Sound System	69,000,000	75,000,000	75,000,000	100,000,000	31,382,100	69,000,000	75,000,000	74,988,750	100,000,000	31,382,100	100.00	100.00	99.99	100.00	100.00	-99.55	-99.55
	Pengadaan Bahan/Material Kegiatan dan Sewa Peralatan	80,000,000	-	150,000,000	267,000,000	72,000,000	80,000,000	-	150,000,000	267,000,000	72,000,000	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	-99.10	-99.10
	Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Singgah Pemkab Selayar di Bira		35,000,000	100,000,000	86,000,000	-		35,000,000	99,995,800	86,000,000	-	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	Pemeliharaan Gedung/Kantor Perwakilan Kep. Selayar di Jakarta		55,000,000	50,000,000	20,000,000	20,000,000		55,000,000	50,000,000	20,000,000	19,995,000	0.00	100.00	100.00	100.00	99.98	0.00	0.00
	Penataan Taman/Pemeliharaan Rutin Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Rumah Jabatan/Dinas		95,000,000	50,000,000	125,000,000	45,289,496		95,000,000	50,000,000	125,000,000	45,289,496	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	Pelayanan Tamu PEMDA	48,200,000	75,000,000	450,000,000	115,000,000	89,753,900	48,200,000	74,890,000	450,000,000	115,000,000	89,731,900	100.00	99.85	100.00	100.00	99.98	-98.14	-98.14
	Pemeliharaan Tribun dan Lapangan Pemuda Benteng	100,000,000	100,000,000	50,000,000	90,000,000	20,000,000	90,000,000	90,000,000	50,000,000	90,000,000	19,995,000	90.00	90.00	100.00	100.00	99.98	-99.80	-99.78
	Pemeliharaan Tempat Parkir Kantor	-	-	25,000,000	25,000,000	15,000,000	-	-	25,000,000	25,000,000	15,000,000	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	Penataan Taman/Pemeliharaan Rutin Kantor Bupati	-	-	100,000,000	284,365,000	110,000,000	-	-	100,000,000	284,365,000	110,000,000	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Penyediaan Alat Kebersihan	-	-	75,000,000	61,000,000	35,000,000	-	-		61,000,000	35,000,000	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Pelangi	-	-	100,000,000	95,000,000	13,222,500	-	-	100,000,000	95,000,000	13,222,500	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala GOW	-	75,000,000	100,000,000	85,000,000	45,000,000	-	75,000,000	100,000,000	85,000,000	44,999,500	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Adat Benteng Somba Opu Makassar			75,000,000	50,000,000	-			74,998,400	50,000,000	-	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung DWP/Sekretariat Kabupaten Sehat			50,000,000	135,000,000	20,040,800			50,000,000	130,000,000	20,032,200	0.00	0.00	100.00	96.30	99.96	0.00	0.00
	Pemeliharaan Rumah Dinas dan Sarana Pemerintah Lainnya			150,000,000	175,000,000	50,800,000			150,000,000	170,000,000	50,793,500	0.00	0.00	100.00	97.14	99.99	0.00	0.00
	Pemeliharaan Interior Mess Pemda			150,000,000	65,000,000	36,603,500			149,998,400	65,000,000	36,602,250	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	Pengadaan Sound System			190,000,000	-	35,000,000			190,000,000	-	35,000,000	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung PKK			135,000,000	90,000,000	30,900,000			135,000,000	90,000,000	30,899,500	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	Pemeliharaan Baruga Rumah Jabatan Bupati			150,000,000	-	-				-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Mess Pemda			302,000,000	50,000,000	12,000,000			300,650,000	50,000,000	12,000,000	0.00	0.00	99.55	100.00	100.00	0.00	0.00
	Penyediaan Sarana dan Prasaran Takziah			2,800,000,000	-	-			2,795,296,000	-	-	0.00	0.00	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	Penunjang Operasional Peralatan dan Mesin		35,600,000	100,000,000	50,000,000	10,500,000		35,600,000	100,000,000	50,000,000	10,500,000	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	Penyediaan Sarana Rumah Jabatan/Dinas			250,000,000	325,000,000	290,000,000			250,000,000	325,000,000	289,998,375	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	Pengadaan Plakat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar			25,000,000	-	-			25,000,000	-	-	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pengadaan Mesin Genset				200,000,000	30,000,000				200,000,000	30,000,000	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Perwakilan Kepulauan Selayar di Jakarta		30,000,000					30,000,000				0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Rehabilitasi Pendopo Rumah Jabatan Bupati		-					-				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pemeliharaan Dapur Rumah Jabatan Bupati		50,000,000					50,000,000				0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bimbingan Tekhnis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	0	0	10,000,000	0	0	0	0	9,453,600	-		0.00	0.00	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Program Ketatalaksanaan Daerah											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Penyusunan Data ANJAB, EVJAB dan SOP	0	0	20,000,000	0	15,000,000	0		19,970,000	-	15,000,000	0.00	0.00	99.85	0.00	100.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Program Pengembangan Nilai Budaya											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Hari Jadi Selayar	260,000,000	400,000,000	500,000,000	400,000,000	0	260,000,000	400,000,000	499,692,500	350,000,000	-	100.00	100.00	99.94	87.50	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inventarisasi Barang Setda	15,000,000	64,605,000	30,000,000	35,000,000	30,000,000	15,000,000	64,605,000	30,000,000	35,000,000	29,678,000	100.00	100.00	100.00	100.00	98.93	-98.00	-98.02
	Penyusunan RKBU dan RKPBU Setda	15,000,000	20,000,000	25,000,000	20,000,000	15,000,000	15,000,000	20,000,000	25,000,000	20,000,000	15,000,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-99.00	-99.00
	Penyusunan Standar Harga Satuan Barang	43,800,000	53,000,000	70,000,000	149,000,000	40,000,000	40,000,000	53,000,000	69,906,000	149,000,000	40,000,000	91.32	100.00	99.87	100.00	100.00	-99.09	-99.00
	Penyusunan Rencana Kerja/Renstra dan Lakip	0	0	10,000,000	30,000,000	10,000,000	0	0	7,992,000	30,000,000	10,000,000	0.00	0.00	79.92	100.00	100.00	0.00	0.00

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Bagian Umum dan Perlengkapan																	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Bagian umum dan Perlengkapan	0	0	25,000,000	0	10,000,000	0	0	24,960,000	0	9,972,500	0.00	0.00	99.84	0.00	99.73	0.00	0.00
	BAGIAN KEUANGAN																	
	Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	10,000,000	11,000,000	61,821,250	73,000,000	62,000,000.0	5,068,250	10,032,950	33,907,750	72,074,600	61,688,200.0	50.68	91.21	54.85	98.73	99.50	-93.80	-87.83
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	24,000,000	0	25,000,000	0	0	0	0	24,525,000	0	0	0.00	0.00	98.10	0.00	0.00	-100.00	0.00
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	50,000,000	43,660,000	59,900,000	68,000,000	22,181,429.0	43,640,000	38,950,000	57,033,000	58,434,120	22,181,428.0	87.28	89.21	95.21	85.93	100.00	-99.56	-99.49
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25,000,000	36,300,000	42,860,000	42,860,000	20,000,000.0	0	27,314,342	30,577,455	41,824,747	19,994,000.0	0.00	75.25	71.34	97.58	99.97	-99.20	0.00
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	55,000,000	80,500,000	0	0	0	36,120,000	77,899,500	0	0	0	65.67	96.77	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	Penyusunan Laporan Program dan Perencanaan	55,000,000	75,000,000	0	0	0	22,230,000	74,745,000	0	0	0	40.42	99.66	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	46,000,000	15,440,000	75,000,000	0	0	9,800,000	13,500,000	73,904,180	0	0	21.30	87.44	98.54	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	55,000,000	80,500,000	0	0	0	22,320,000	77,730,000	0	0	0	40.58	96.56	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	65,000,000	71,500,000	0	0	0	0	71,296,000	0	0	0	0.00	99.71	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	20,000,000	30,800,000	25,000,000	22,540,000	10,000,000.0	0	21,496,250	30,577,455	16,933,110.0	9,994,000.00	0.00	69.79	122.31	75.12	99.94	-99.50	0.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15,000,000	25,300,000	20,000,000	10,000,000	3,000,000.00	0	16,750,000	24,088,550	9,444,000.00	2,940,000.00	0.00	66.21	120.44	94.44	98.00	-99.80	0.00
	Koordinasi Pengelolaan, Pelaporan, dan Verifikasi	80,000,000	130,000,000	57,178,750	77,360,000	20,900,000.0	27,960,000	126,930,500	55,866,000	76,293,350.0	20,546,300.0	34.95	97.64	97.70	98.62	98.31	-99.74	-99.27

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	BAGIAN HUMAS, PROTOKOL DAN PDE																	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	30,000,000	50,000,000	30,000,000	46,670,000	50,000,000	905,000	49,985,000	3,000,000	46,670,000	50,000,000	3.02	99.97	10.00	100.00	100.00	-98.33	-44.75
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	20,000,000	15,600,000	0	35,000,000	35,000,000	4,129,000	15,600,000	0	35,000,000	34,993,000	20.65	100.00	0.00	100.00	99.98	-98.25	-91.53
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00
	Pengumpulan Data dan Pengelolaan Informasi	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00
	Pengelolaan/Pengoperasian Transponder Bandwidth/Satelit	90,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00
	Pengelolaan/Pemeliharaan Website Pemkab Kepulauan Selayar	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	802,900,000	0	0	80,000,000	0	250,752,923	0	0	78,493,414	0	31.23	0.00	0.00	98.12	0.00	-	100.00
	Penerbitan Kliping Pers	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00
	Jumpa Pers	30,000,000	25,000,000	30,000,000	30,000,000	25,000,000	0	18,400,000	21,628,000	29,992,000	0	0.00	73.60	72.09	99.97	0.00	-99.17	0.00
	Peningkatan Pelayanan Kehumasan	40,000,000	90,000,000	50,000,000	65,000,000	80,000,000	2,835,000	89,824,210	44,725,600	64,113,450	78,155,000	7.09	99.80	89.45	98.64	97.69	-98.00	-72.43
	Pertemuan Periodik Bakohumas	10,000,000	15,000,000	25,000,000	20,000,000	0	0	15,000,000	25,000,000	20,000,000	0	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	-	100.00
	Penerbitan Buku Himpunan Sambutan Bupati	20,000,000	90,000,000	0	15,000,000	0	0	90,000,000	0	15,000,000	0	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-	100.00
	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	40,000,000	99,400,000	25,000,000	85,119,400	87,439,800	5,328,300	98,798,402	24,442,000	84,821,600	86,134,300	13.32	99.39	97.77	99.65	98.51	-97.81	-83.83
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	241,000,000	100,000,000	100,000,000	50,000,000	0	239,500,000	99,600,000	99,600,000	49,950,000	0.00	99.38	99.60	99.60	99.90	0.00	0.00
	Penyebaran Informasi Pembangunan	0	719,000,000	60,000,000	0	232,500,000	0	717,703,900	59,880,418	0	221,019,200	0.00	99.82	99.80	0.00	95.06	0.00	0.00
	Focus Grup Discussion	0	5,000,000	0	0	0	0	19,050,000	0	0	0	0.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	55,000,000	20,000,000	25,000,000	25,000,000	0	55,000,000	20,000,000	25,000,000	25,000,000	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	Pendidikan dan pelatihan Formal	0	30,000,000	20,000,000	30,000,000	12,750,000	0	27,718,500	13,500,000	29,324,200	5,154,400	0.00	92.40	67.50	97.75	40.43	0.00	0.00
	Pengadaan Buku Himpunan Sambutan Bupati	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	Peningkatan Pelayanan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Staf di lingkungan Setda	0	0	35,000,000	25,000,000	15,000,000	0	0	34,602,000	24,492,870	6,025,000	0.00	0.00	98.86	97.97	40.17	0.00	0.00
	Penyusunan Sambutan Bupati/Wakil Bupati	0	0	25,000,000	0	0	0	0	15,450,000	0	0	0.00	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	Peningkatan Pelayanan Kunjungan Kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	0	0	75,000,000	25,000,000	35,000,000	0	0	75,000,000	24,834,457	20,872,800	0.00	0.00	100.00	99.34	59.64	0.00	0.00
	Kerja sama peliputan dan pemberitaan Melalui Media Cetak dan elektronik	0	0	550,000,000	850,000,000	994,455,000	0	0	550,000,000	850,000,000	994,455,000	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	Peliputan dan penerbitan kegiatan dan pemerintah daerah	0	0	75,000,000	50,000,000	65,000,000	0	0	74,315,530	49,872,500	64,144,746	0.00	0.00	99.09	99.75	98.68	0.00	0.00
	Pelaksanaan Publikasi dan Iklan, Advetorial melalui media cetak	0	0	50,000,000	420,000,000	410,000,000	0	0	50,000,000	420,000,000	410,000,000	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	Pengadaan Kalender pemerintah kabupaten kepulauan selayar tahun 2019	0	0	75,000,000	68,550,000	150,000,000	0	0	75,000,000	68,550,000	149,616,000	0.00	0.00	100.00	100.00	99.74	0.00	0.00
	Penyusunan Buku Pemerintah	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	80,000,000	79,350,000	0	0.00	0.00	100.00	99.19	0.00	0.00	0.00
	Humas Expo	0	0	0	59,160,600	0	0	0	59,160,600	0	0	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	Bimtek Jumalistik Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah	0	0	0	74,955,386	0	0	0	70,124,770	0	0	0.00	0.00	0.00	93.56	0.00	0.00	0.00
	Bimtek Protokol aparatut pemerintah daerah	0	0	0	0	12,560,200	0	0	0	12,553,200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	99.94	0.00	0.00

No	URAIAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi

Dari Tabel 2.2 di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik pada kegiatan pelaksanaan penunjang administrasi perkantoran yang mengalami rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 38,57% dan rata-pertumbuhan realisasi anggaran sebesar 42,11%. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah

1. Adanya perubahan kebijakan dan penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan kegiatan.
2. Pada tahun 2020 terjadi penyebaran wabah Covid-19 sehingga Anggaran mengalami *refocusing* yang menyebabkan hanya kegiatan yang dianggap prioritas yang terlaksana

Selain hal tersebut di atas yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan adalah minimnya sumber daya manusia yang berkualitas yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga dibutuhkan adanya pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Tantangan dan Peluang Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan dapat berjalan selaras dengan sasaran yang ditetapkan pada RPJMD, Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Telaahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

2.4.1 Analisis terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri yang sejalan dengan Visi dan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, serta 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, disusun dengan arah kebijakan dan strategi untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Di dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 disebutkan bahwa sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi Poros jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam 5 (lima) tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam visi, yaitu ; *“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.*

Untuk mewujudkan visi tersebut Kementerian Dalam Negeri dalam Dokumen Renstra merumuskan 3 (tiga) tujuan strategis, yaitu :

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.

3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri.

Maka dari uraian di atas dapat dianalisis bahwa Renstra Kemendagri memiliki keselarasan dengan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini dapat dilihat dari kesamaan sasaran dan tujuan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Sehingga dengan adanya keselarasan tersebut memberikan peluang sinergitas program kegiatan antara pusat dan daerah yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.4.2. Analisis terhadap Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara keseluruhan, yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap, terarah, dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya ekonomi, politik, ideologi serta bersifat komprehensif bagi masyarakat.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu pelayanan dan pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memilih peran strategis untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat dinamis yang harus berkembang dalam meningkatkan kinerja pelayanan pembangunan sebagai lembaga pemerintah yang baik.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menghadapi berbagai tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Sekretariat

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Tantangan :

- a. Koordinasi dengan *stakeholders* terkait dalam pengendalian tingkat inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih intensif;
- b. Peran serta BUMN dan BUMD dalam pembangunan daerah melalui program CSR dan PKBL lebih ditingkatkan;
- c. Optimalisasi kinerja Perusda Sulawesi Selatan;
- d. Penyaluran kredit kepada koperasi dan UMKM masih memerlukan fasilitasi dan koordinasi yang lebih intensif;
- e. Belum adanya wadah yang berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan secara partisipatif yang dapat mewujudkan kebersamaan untuk menyelesaikan problem UMKM;
- f. Permasalahan kelengkapan dan validasi data dalam konteks pembangunan masih menjadi permasalahan prioritas di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- g. Masih tingginya Penduduk Sulawesi Selatan yang tidak bisa baca tulis Al-Quran;
- h. Tingginya resiko masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obat terlarang lainnya;
- i. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan sarana dan prasarana, tidak sebanding dengan jumlah SDM ASN yang harusnya dipenuhi dalam menjalankan tugas dan fungsi Biro serta sarana dan prasarana yang mendukung program dan kegiatan, namun tetap maksimal dalam memberikan pelayanan;

- j. Penyelenggaraan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Sulawesi Selatan belum terlaksana dengan baik disebabkan oleh budaya (*culture set*) dan pola pikir (*mind set*) ASN terkait komitmen dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi secara baik;
- k. Seiring dengan penguatan serta perubahan regulasi dan kondisi di masa yang akan datang maka perlu pula dilakukan penguatan untuk memaksimalkan pengelolaan dan pencatatan data asset yang tersusun secara sistematis, akurat berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- l. Saat ini pemerintah menghadapi era globalisasi dan perkembangan pembangunan yang sangat cepat sehingga perlu pula ditunjang dengan asset daerah yang tertata baik dalam menunjang pembangunan daerah;
- m. Tuntutan pelayanan publik yang prima, kapabel, bersih, dan akuntabel.

2. Peluang :

- a. Adanya rencana terbentuknya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sehingga diharapkan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang lebih independent;
- b. Sinergitas program Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
- c. Keunggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pintu Gerbang Kawasan Ekonomi di Indonesia Timur;
- d. Sarana dan prasarana yang telah tersedia sangat mendukung sehingga akan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara;

- e. Terkait pengembangan pegawai, terdapat beberapa lembaga Pendidikan dan pelatihan di Provinsi Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah antara lain Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (PKP2A LAN RI), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Provinsi Sulawesi Selatan, serta kantor-kantor unit regional lainnya;
- f. Program penataan asset daerah tertuang dalam program unggulan ke-6 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
- g. Adanya dukungan dari unsur pendukung tindak lanjut penyelesaian kebijakan dengan melibatkan unsur KPK (rencana aksi), Kejaksaan Tinggi (MoU) dan DJKN;
- h. Cukup banyak asset daerah yang merupakan peluang untuk dapat dioptimalkan dalam menunjang pendapatan asli daerah;
- i. Semakin berkembangnya dukungan regulasi dan system informasi pengelolaan asset daerah.

2.4.3. Analisis terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah

Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sektor unggulan kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata, dan pertanian serta pertambangan sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari dan maritim. Kebijakan penataan ruang, terdiri atas :

1. Penanganan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;
2. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;

3. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konversi serta mitigasi bencana;
4. Pemanjapan fungsi kawasan lindung;
5. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah;
6. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
7. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
8. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata;
9. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional;
10. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional;
11. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokasi sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritime di wilayah kabupaten; dan
12. Pengembangan aspek pertanian dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten.

2.4.4. Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Percepatan pertumbuhan jumlah penduduk selalu diimbangi dengan percepatan pembangunan, dan percepatan pembangunan berbanding lurus dengan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian maka pembangunan yang tidak mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan tentu akan mempengaruhi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH). Lingkungan hidup adalah modal pembangunan, modal pembangunan harus dikaitkan dengan daya dukung dan daya tampung agar kualitas dan kuantitas Sumber Daya Alamnya tetap terjaga dengan baik.

Daya dukung lingkungan merupakan batas kondisi kemampuan dari lingkungan untuk dapat menunjang kehidupan manusia. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktifitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Berdasarkan Telaahan KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, Hasil identifikasi pencapaian indikator SDGs/TPB, Kabupaten Kepulauan Selayar hanya melaksanakan 17 tujuan yang terbagi dalam 196 indikator dari 220 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi kewenangan Kabupaten, dengan gambaran sebagai berikut : a) 46% indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (90 indikator); b) 26% indikator yang sudah dilaksanakan dan

belum mencapai target nasional (51 indikator); c) 9% indikator yang belum memiliki data (38 indikator).

Indikator TPB yang telah dilaksanakan dan tersedia data hanya 72% yang terdiri atas 141 indikator, sehingga masih terdapat 28 % atau sekitar 55 indikator yang belum dilaksanakan dan belum ada data. Hal ini menunjukkan kinerja pencapaian TPB di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah cukup baik, sehingga diupayakan dapat dipertahankan pada periode selanjutnya.

Berdasarkan pada rumusan isi prioritas KLHS RPJMD direkomendasikan beberapa kebijakan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun kebijakan strategis tersebut antara lain :

1. Resiko Bencana;
2. Kemiskinan;
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Air Bersih dan Sanitasi;
4. Pekerjaan Layak;
5. Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan;
6. Aksesibilitas dan Infrastruktur; dan
7. Tata Kelola Pemerintahan.

Sesuai pengintegrasian KLHS ke dalam RPJMD, maka dapat dikemukakan bahwa terdapat beberapa Perangkat Daerah yang berhubungan langsung terhadap KLHS, sedangkan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak secara langsung mengakomodir kebijakan yang ada pada KLHS. melainkan hanya sebatas koordinasi terhadap ruang lingkup kegiatan pelaksanaan KLHS.

2.4.5. Tantangan dan Peluang

Dengan mengacu pada analisis Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Sekretariat Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka Tantangan dan Peluang Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain:

1. Tantangan

- a. Kurang disiplin dan budaya kerja yang rendah;
- b. Pelayanan dianggap sebagai sesuatu yang rutinitas;
- c. Kurang tertibnya administrasi, transparansi dan akuntabilitas;
- d. Stabilitas perekonomian yang tidak menentu;
- e. Mutasi sumber daya aparatur yang telah terlatih ke instansi lain.

2. Peluang

- a. Peningkatan kinerja Aparatur PNS;
- b. Mewujudkan pelayanan public yang prima;
- c. Adanya keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintah yang baik;
- d. Peningkatan perekonomian daerah dan Kerjasama dengan pihak ketiga;
- e. Dukungan potensi SDM yang kompeten terhadap pelaksanaan program/kegiatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pemenuhan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar tentang Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Sistem koordinasi pelaksanaan tugas-tugas OPD belum maksimal	Kurangnya koordinasi pelaksanaan tugas-tugas OPD terkait	Kurangnya pemahaman terhadap prosedur koordinasi
2	Masih rendahnya penyusunan kebijakan	Kurangnya SDM yang berkompeten di bidangnya sehingga kebijakan yang dihasilkan masih belum maksimal	1. SDM kurang terlatih dalam proses perumusan kebijakan 2. Kurangnya tingkat efektivitas suatu kebijakan

3	Belum jelasnya sistem dan prosedur kerja	Sistem dan prosedur kerja yang diterapkan kurang jelas sehingga pencapaian target tujuan dan sasaran program kegiatan belum optimal	Semua pihak tidak memahami proses atau tahapan dengan baik.
4	Belum optimalnya pembinaan administrasi dan aparat pemerintah daerah	Keterbatasan SDM, baik kuantitas maupun kualitas	Belum terakomodasinya jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan
5	Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan belum dilakukan secara terstruktur	Belum maksimalnya pemahaman terhadap pedoman pemantauan dan evaluasi yang menjadi acuan/panduan
6	Pembagian tugas dalam organisasi tidak merata	Kurangnya pemahaman dan tanggungjawab terhadap tugas dan fungsi	Rendahnya efektifitas kinerja aparatur disebabkan pembagian tugas yang tidak tepat

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang berbasis pada sumberdaya maritime serta memperhatikan rumusan visi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025, maka visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 adalah

“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

- a. *Bandar Maritim* adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan

- b. *Kawasan Timur Indonesia* menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Penjelasan visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026:

“Bandar Maritim” mengandung pengertian seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri.

“Kawasan Timur Indonesia” berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hubungan) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini:

- a. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”
- b. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
- c. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Dengan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut :

- a. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
- b. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
- c. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
- d. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021 – 2026, yaitu :

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa menuju, serta segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa.

3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan

Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan sosial dan Keagamaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa Kontribusi Sekretariat Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 akan mengambil peran pada misi Ke-1 “Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan” dan misi ke-5 “Meningkatkan Kehidupan Sosial dan Keagamaan”, Untuk lebih jelasnya dapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia					
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor		Bagian
			Penghambat	Pendorong	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya akuntabilitas perangkat daerah • Kurang tertibnya administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan pegawai yang masih rendah • Penyelesaian laporan keuangan & aset daerah belum tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang ada melalui bimbingan teknis dan diklat • Meningkatkan kapasitas SDM sejalan dengan menyusun pedoman teknis disamping melengkapi sarana prasarana pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Tata Pemerintahan, • Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, • Bagian Perekonomian & Sumber Daya Alam, • Bagian Administrasi Pembangunan, • Bagian Pengadaan Barang/Jasa, • Bagian Perencanaan & Keuangan, • Bagian Umum &

Visi: Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia					
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor		Bagian
			Penghambat	Pendorong	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Protokol, • Bagian Organisasi
2	Misi 5 : Meningkatkan Kehidupan Sosial dan Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengelolaan data-data guru mmengaji, imam masjid, marbot, muballiqliq dan pemandi jenazah disetiap wilayah kecamatan, kelurahan dan desa • Belum optimalnya koordinasi komunikasi dan konsultasi baik secara eksternal terkait kehidupan social dan keagamaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen untuk berubah masih sangat lemah • Kemampuan pegawai untuk mengelola data masih sangat rendah (profesionalisme rendah) • Tingkat kedisiplinan masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen pimpinan untuk berubah cukup baik • Jumlah personil memadai • Sarana dan fasilitas perkantoran tersedia • Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kuantitas SDM yang ada melalui bimbingan teknis dan diklat 	Bagian Kesejahteraan Rakyat

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Sekretariat Daerah

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

1. Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

a. Visi

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden :

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Kementerian Dalam Negeri memiliki visi sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi gambaran menyeluruh terkait tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Adapun visi Kementerian Dalam Negeri adalah :

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.”

Tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 adalah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di

bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- 3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
- 6) Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 7) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- 8) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
- 9) Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
- 10) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka ditetapkan misi Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :

- 1) Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengalaman terhadap Pancasila, UUD 1945, kebinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
- 2) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat daerah, menciptakan ketemtraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
- 3) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;

- 4) Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan public.

3.3.2. Telaahan terhadap Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

1. Visi

Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah :

**“SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF,
PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF DAN
BERKARAKTER.”**

Dimana makna visi diatas dijabarkan secara terperinci sebagai berikut :

a. Inovatif

Kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru dan layanan baru yang memberikan nilai tambah yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. Kompetitif

Kemampuan menghasilkan SDM, produk barang, dan jasa yang mampu terserap oleh pasar;

c. Produktif

Kemampuan untuk menghasilkan produk dan jasa

berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;

d. Inklusif

Kondisi system dan lingkungan yang ramah untuk semua tanpa hambatan dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat tanpa terkecuali.

e. Berkarakter

Spirit pembangunan berdasarkan agama dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Provinsi Sulawesi Selatan dirumuskan misi sebagai berikut :

a. Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif;

b. Peningkatan infrakstruktur yang berkualitas dan aksesibel;

c. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif;

d. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif;

e. Peningkatan produktifitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan urusan Penunjang Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi di Bagian Tata Pemerintahan,

Hukum, Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang/Jasa, Organisasi, Umum dan Protokol, serta perencanaan dan Keuangan. Sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Disamping itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang sedianya memuat tiga pilar pembangunan daerah, sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi Perda.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program atau kegiatan.

Berdasarkan pada rumusan isi prioritas KLHS RPJMD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, direkomendasikan beberapa kebijakan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun kebijakan strategis tersebut antara lain :

1. Resiko Bencana;
2. Kemiskinan;
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Air Bersih dan Sanitasi;
4. Pekerjaan Layak;

5. Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan;
6. Aksesibilitas dan Infrastruktur; dan
7. Tata Kelola Pemerintahan.

Setelah melakukan telaahan terhadap KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, maka dapat dikemukakan bahwa tidak terdapat rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program atau kegiatan di renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Secara teknis kinerja Sekretariat Daerah tidak terkait secara langsung dengan penerapan dokumen KLHS Pemerintah Daerah, namun berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah tetap berperan dalam pengoordinasian terhadap implementasi kebijakan Pemerintah Daerah yang dimuat di dalam dokumen dan perumusan kebijakan-kebijakan strategis tentang pelaksanaan KLHS di Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan baik bagi organisasi perangkat daerah maupun bagi masyarakat secara umum di masa yang akan datang.

Beberapa Isu Strategis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah

sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan dimasa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya untuk memperbaiki tata pemerintahan juga dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, laporan dan pertanggungjawaban).

2. Peningkatan Koordinasi Administratif

Salah satu tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan Tugas perangkat daerah. Maka berdasarkan dengan tupoksi tersebut Sekretariat Daerah dituntut untuk meningkatkan fungsi koordinasi secara vertikal dalam hal ini kepada Bupati Kepulauan Selayar sebagai pimpinan tertinggi

penyelenggaraan pemerintahan. Dengan berjalan efektifnya koordinasi tersebut maka Sekretariat Daerah diharapkan akan mampu menghadapi tantangan Birokrasi ke depannya.

3. Optimalisasi Pelayanan Publik

Otonomi Daerah dalam hal ini memberikan wewenang kepada daerah untuk secara mandiri menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, maka otonomi daerah hakikatnya berorientasi pada tujuan pelayanan kepada masyarakat. Salah tugas dan fungsi dari Sekretariat Daerah adalah melakukan pelayanan administratif. Di era globalisasi ini, kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat sangat beragam dan meningkat. Sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah juga dituntut merespon isu strategis tersebut dengan melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia demi terwujudnya optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Memberikan pelayanan publik yang prima merupakan tujuan setiap pemerintah daerah. Pemerintah daerah saat ini berlomba-lomba menerapkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk dapat membantu mewujudkannya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, dan sistem manajemen. Perkembangan teknologi informasi serta penerapan konektivitas internet ke dalam tata kelola pemerintah diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan melalui peningkatan efisiensi, inovasi,

produktivitas, perluasan jangkauan dan penghematan biaya.

Pelayanan publik yang prima bukan sekedar mengikuti *trend global*, melainkan diarahkan untuk mewujudkan good governance, yakni tata pemerintahan yang baik, transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Penerapan teknologi informasi juga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif serta efisien terhadap masyarakat, tentu ini merupakan langkah yang strategis untuk setiap organisasi perangkat daerah. Dengan pemanfaatan teknologi dan informasi akan memudahkan proses pelayanan administratif baik bagi unsur organisasi perangkat daerah maupun untuk masyarakat.

5. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan asset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai pelayan masyarakat. Selain hal itu, sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen

pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kabupaten dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah Kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara Negara dalam rangka mewujudkan good governance.

Isu-isu strategis diatas diatas diberi skot/bobot berdasarkan skor kriteria penentuan isu-isu strategis yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan penilaian isu strategis. Skor kriteria penentuan isu-isu strategis dan nilai skala kriteria dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel. 3.3

Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20

4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20
TOTAL		100

Tabel. 3.4
 Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total
		1	2	3	4	5	6	Skor
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Optimalisasi pelayanan public		10	20	10			40
2	Peningkatan koordinasi Administratif		10		10			20
3	Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi	20	10	20				50
4	Pemanfaatan teknologi informasi		10	20				30
5	Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah	20		20				40

Tabel. 3.5

Rata-rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Optimalisasi pelayanan publik	40	0,4
2	Peningkatan koordinasi Administratif	20	0,2
3	Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi	50	0,5
4	Pemanfaatan teknologi informasi	30	0,3
5	Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah	40	0,4

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 yang dirumuskan berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
2. Meningkatkan kehidupan sosial dan keagamaan
3. Mengkoordinasikan, menselaraskan, mengharmoniskan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintah yang telah didesentralisasikan ke pemerintah kabupaten.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang Sekretariat Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar menetapkan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Meningkatnya koordinasi ketatalaksanaan bidang perekonomian & pembangunan;
- 3) Meningkatnya koordinasi ketatalaksanaan bidang pemerintahan & kesejahteraan rakyat.

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodic setiap tahun melalui serangkaian program di mana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang mendukung capaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat • Meningkatnya nilai SAKIP • Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks kepuasan masyarakat non SPM • Nilai SAKIP OPD • Laporan keuangan OPD yang tersaji sesuai SAP 	<p>≥ 60</p> <p>CC Sesuai</p>	<p>≥ 65</p> <p>B Sesuai</p>	<p>≥ 70</p> <p>B Sesuai</p>	<p>≥ 75</p> <p>BB Sesuai</p>	<p>≥ 80</p> <p>BB Sesuai</p>
2.	Mengkoordinasikan, menselaraskan, mengharmoniskan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan ke pemerintah kabupaten.	Realisasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang pemerintahan & kesra • Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang perekonomian & pembangunan • Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang pemerintah & kesra • Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang perekonomian & pembangunan • Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang administrasi 	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4.2.
Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Setda	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks reformasi Birokrasi Setda 	55 (CC)	61 (CC)	66 (B)	72 (B)	76 (A)
			<ul style="list-style-type: none"> Indeks kepuasan masyarakat non SPM 	60	65	70	75	80
			<ul style="list-style-type: none"> Nilai SAKIP OPD 	CC	B	B	BB	BB
			<ul style="list-style-type: none"> Laporan keuangan OPD yang tersaji sesuai SAP 	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.	Mengkoordinasikan, menselaraskan, mengharmoniskan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan ke pemerintah kabupaten.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang pemerintahan dan kesra Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang perekonomian & pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah 	100%	100%	100%	100%	100%
			<ul style="list-style-type: none"> Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang pemerintahan dan kesra 	100%	100%	100%	100%	100%
			<ul style="list-style-type: none"> Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang perekonomian & pembangunan 	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam program dan kegiatan.

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/ tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran pelayanan, permasalahan, isu strategi, serta pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths/kekuatan, Weaknesses/kelemahan, Opportunities/pejuang, dan Threats/tantangan*). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan Peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan tantangan (*Threats*).

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah dipengaruhi oleh 2 (dua) factor, yaitu factor internal dan factor eksternal, yang meliputi :

Tabel 5.1.
Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan
Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Faktor Internal		Faktor Eksternal	
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantangan (<i>Threats</i>)
1. Tugas pokok dan fungsi yang jelas;	4. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya;	1. Peningkatan kinerja Aparatur PNS;	1. Kurang disiplin dan budaya kerja yang rendah;
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur;	2. Kurang optimalnya kinerja SDM aparatur;	2. Mewujudkan pelayanan public yang prima;	2. Pelayanan dianggap sebagai sesuatu yang rutinitas;
3. Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan;	3. Kurangnya koordinasi antar SKPD;	3. Adanya keinginan kuat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;	3. Kurang tertibnya administrasi, transparansi, dan akuntabilitas;
4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai.	4. Kurang optimalnya penggunaan sarana dan prasarana.	4. Peningkatan perekonomian daerah dan Kerjasama dengan pihak ketiga.	4. Stabilitas perekonomian yang tidak menentu.
5. Memiliki SDM Aparatur yang terlatih dan kompeten	5. Kurangnya penguasaan teknologi informasi (IT) oleh sumber daya aparatur	5. Dukungan potensi SDM yang kompeten terhadap pelaksanaan program/kegiatan.	5. Mutasi sumber daya aparatur yang telah terlatih ke instansi lain.

Berdasarkan analisis factor internal dan factor eksternal di atas, dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*), maka sasaran strategi yang akan dicapai dirumuskan kedalam formulasi sebagaimana berikut ini:

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO);
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan menghadapi tantangan (ST);
3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO);
4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi tantangan (WT).

Uraian diatas jika diklarifikasikan dan dipetakan dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini :

Tabel 5.2

Pemetaan Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal

INTERNAL EKSTERNAL		Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
		1. Tugas pokok dan fungsi yang jelas; 2. Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur; 3. Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan; 4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai. 5. Memiliki SDM Aparatur yang terlatih dan kompeten	1. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya; 2. Kurang optimalnya kinerja SDM aparatur; 3. Kurangnya koordinasi antar SKPD; 4. Kurang optimalnya penggunaan sarana dan prasarana. 5. Kurangnya penguasaan teknologi informasi (IT) oleh sumber daya aparatur
Peluang (O)		(S) + (O)	(W) + (O)
1. Peningkatan kinerja Aparatur PNS; 2. Mewujudkan pelayanan public yang prima; 3. Adanya keinginan kuat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik; 4. Peningkatan perekonomian daerah dan kerja sama dengan pihak ketiga. 5. Dukungan potensi SDM yang kompeten terhadap pelaksanaan program/kegiatan.	1. Mendayagunakan sumber daya manusia aparatur untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kerjasama pihak ketiga(S2 + O4) 2. Mengoptimalkan adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mewujudkan pelayanan public yang prima (S3,4 + O2) 3. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang jelas serta adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan kinerja Aparatur PNS (S1,3 + O1,2)	1. Meningkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi serta mengintensifkan koordinasi antar SKPD untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (W1,3 + O3) 2. Mengoptimalkan kinerja SDM aparatur dan dukungan sarana dan prasarana yang ada untuk mewujudkan pelayanan prima (W2,3 + O2) 3. Meningkatkan penguasaan teknologi informasi (IT) oleh sumber daya aparatur untuk mewujudkan pelayanan public yang prima (W3 + O2)	
Tantangan (T)		(S) + (T)	(W) + (T)
1. Kurang disiplin dan budaya kerja yang rendah; 2. Pelayanan dianggap sebagai sesuatu yang rutinitas; 3. Kurang tertibnya administrasi, transparansi, dan akuntabilitas; 4. Stabilitas perekonomian yang tidak menentu. 5. Mutasi sumber daya aparatur yang telah terlatih ke instansi lain.	1. Mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi yang jelas untuk mengatasi kurang tertibnya administrasi, transparansi dan akuntabilitas (S1 + T2) 2. Mendayagunakan SDM aparatur dan adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan untuk mengatasi kurangnya disiplin dan budaya kerja yang rendah (S2,3 + T1)	1. Meminimalkan kurangnya pemahaman tupoksi dan mengintensifkan koordinasi antar SKPD untuk dapat terhindar dari kurang stabilitasnya perekonomian (W1,3 + T4) 2. Meningkatkan kinerja SDM aparatur dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana untuk menghindari pelayanan dianggap sebagai sesuatu yang rutinitas (W2,4 + T3)	

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka ditentukan strategi dan arah kebijakan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan pencapaian visi dan misi agar tantangan yang ada dapat teratasi sehingga unit kerja lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menghasilkan kinerja pelayanan yang lebih baik dari periode sebelumnya.

Adapun Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran pada Unit Kerja lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas SDM sejalan dengan menyusun pedoman teknis disamping melengkapi sarana prasarana pelayanan dan penguatan koordinasi termasuk pelibatan pihak ketiga;
2. Meningkatnya kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang ditunjang perangkat teknologi informasi yang baik;
3. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

1. Penyediaan sarana dan prasarana;
2. Pelatihan teknis bagi aparat pemberi layanan;
3. Penyusunan pedoman teknis;
4. Monitoring & Evaluasi;
5. Peningkatan koordinasi dan penyusunan Kerjasama dengan pihak ketiga;
6. Peningkatan disiplin dan kapsitas sumber daya aparatur;

Hasil analisis di atas dapat dilihat melalui tabel 5.3 dibawah ini :

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Sekretariat Daerah Kepulauan Selayar

VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia			
MISI 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya akuntabilitas • Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat • Meningkatnya nilai SAKIP • Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas SDM sejalan dengan menyusun pedoman teknis disamping melengkapi sarana prasarana pelayanan • Meningkatnya kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang ditunjang perangkat teknologi informasi yang baik; • Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana prasarana, 2. Pelatihan teknis bagi aparat pemberi layanan, 3. Penyusunan pedoman teknis, 4. Monitoring & Evaluasi, 5. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur. 6. Peningkatan koordinasi dan penyusunan Kerjasama dengan pihak ketiga
Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan kapasitas SDM sejalan dengan menyusun pedoman teknis disamping melengkapi sarana prasarana pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana prasarana, 2. Pelatihan teknis bagi aparat pemberi layanan, 3. Penyusunan pedoman teknis, 4. Monitoring & Evaluasi, 5. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur. 6. Peningkatan koordinasi dan penyusunan Kerjasama dengan pihak ketiga

MISI 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kebijakan Bidang Pemerintahan & Kejahteraan Rakyat	Meningkatnya koordinasi ketatalaksanaan bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat	Meningkatkan kapasitas SDM, dan penguatan koordinasi termasuk pelibatan pihak ketiga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengetahuan dan pelatihan teknis, 2. Peningkatan koordinasi dan penyusunan kerjasama dengan pihak ketiga, 3. Perkuatan koordinasi, monitoring & evaluasi

Tabel 5.4
Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Sekretariat Daerah Kepulauan Selayar

VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia			
MISI 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Setda	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas SDM sejalan dengan menyusun pedoman teknis disamping melengkapi sarana prasarana pelayanan • Meningkatnya kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang ditunjang perangkat teknologi informasi yang baik; • Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana prasarana, 2. Pelatihan teknis bagi aparat pemberi layanan, 3. Penyusunan pedoman teknis, 4. Monitoring & Evaluasi, 5. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur. 6. Peningkatan koordinasi dan penyusunan Kerjasama dengan pihak ketiga

MISI 4 : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengkoordinasikan, menselaraskan, mengharmoniskan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan ke pemerintah kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang pemerintahan dan kesra - Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan 	Penguatan sistem teknologi informasi untuk mendukung percepatan tercapainya tujuan dan sasaran serta meningkatkan kapasitas SDM, dan penguatan koordinasi termasuk pelibatan pihak ketiga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor ekonomi kecil dan menengah 2. Peningkatan pengetahuan dan pelatihan teknis, 3. Peningkatan koordinasi dan penyusunan kerjasama dengan pihak ketiga; Perkuatan koordinasi, monitoring & evaluasi

Sebagaimana digambarkan pada Visi, Misi, Program Bupati/Wakil Bupati terpilih, Program Prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Tiga Pilar Pembangunan dan Satu Program Unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim.

Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Pusat Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata; dan
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT).

Program Pendukung yaitu :

Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Dengan mengacu pada Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah pada Tabel 5.1 di atas, peran Sekretariat Daerah dalam mendukung Tiga Pilar Pembangunan dan Satu Program Unggulan dari segi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif antara lain:

1. Dukungan Sekretariat Daerah dalam Pembangunan Pusat Distribusi Logistik (PDL) adalah mendorong efisiensi arus distribusi logistik melalui penetapan kebijakan antara lain Rancangan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dan penyusunan konsep kerjasama pengembangan SDM dan Pembangunan Ekonomi Daerah.
2. Dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, Sekretariat Daerah mendukung akselerasi pembangunan keparawisataan dengan melakukan koordinasi lintas sektoral dan regional dan integrasi kebijakan secara intensif. Program Sekretariat Daerah dalam mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Parawisata antara lain pelaksanaan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan bantuan gratis/atau hibah, Rancangan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah, penyusunan konsep Kerjasama Pengembangan SDM dan Pembangunan Ekonomi Daerah, pelaksanaan koordinasi pembuatan konsep Penataan

Kawasan Perkotaan Benteng, dan pelaksanaan koordinasi konsep pembangunan Mesjid Pantai Benteng.

3. Dari segi dukungan terhadap Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT), Sekretariat Daerah memiliki peran melalui penetapan kebijakan antara lain Rancangan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dan penyusunan konsep kerjasama pengembangan SDM dan Pembangunan Ekonomi Daerah, sehingga KIPT di harapkan dapat menjadi kawasan dimana pengelolaan perikanan terpadu dapat diwujudkan dalam rangka upaya pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan nelayan.
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbangsari) adalah program unggulan sebagai penguat atau penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Gerbangsari adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan. Sekretariat Daerah dalam mendukung program Gerbangsari mempunyai peran dalam penetapan kebijakan terkait peningkatan ekonomi pedesaan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI Renstra Perangkat Daerah menyajikan rencana program dan kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mendukung visi misi Bupati Kepulauan Selayar. Rencana program selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan serta penganggaran. Penyusunan program dan kegiatan berdasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana program dilengkapi dengan indikator atau outcome program beserta target capaiannya dan pagu indikatif yang mencerminkan kebutuhan anggaran dalam melaksanakan program yang direncanakan. Sedangkan untuk rencana kegiatan juga dilengkapi dengan indikator atau output kegiatan beserta target capainya dan pagu indikatif. Indikator atau outcome program merupakan suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran dan juga mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa:

1. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi,
2. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis

- Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD,
3. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program,
 4. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
 5. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). 59. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. 60. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
 6. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun rencana program, kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan :

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan :

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan :

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan :

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan :

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan :

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Aset tetap Lainnya
- Pengadaan Aset Tak Berwujud
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan :

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan :

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Penyediaan JasaPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan :

Administrasi Keuangan dan operasional kepala Daerah dan wakil kepala daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah
- Pelaksanaan MedicalCheck Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah

Kegiatan :

Fasilitas kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

Kegiatan :

Penataan Organisasi

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan
- Fasilitas pelayanan publik dan tata laksana
- Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Kegiatan :

Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Keprotokolan
- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
- Pendokumentasian Tugas Pimpinan

1.2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kegiatan :

Administrasi Tata Pemerintahan

Sub Kegiatan:

- Penataan administrasi pemerintahan
- Pengelolaan administrasi kewilayahan
- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Kegiatan :

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pengelolaan bina mental spiritual
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

Kegiatan :

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- Fasilitasi Bantuan Hukum
- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Kegiatan :

Fasilitasi Kerjasama Daerah

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Kerjasama dalam Negeri

1.3. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Kegiatan :

Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
- Pengendalian dan distribusi perekonomian
- Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil

Kegiatan :

Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Sub Kegiatan:

- Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Kegiatan :

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Sub Kegiatan:

- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan :

Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Sub Kegiatan:

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Rencana program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Sekretariat Daerah			38,988,111,000		39,758,516,073		40,965,982,207		42,128,187,122		43,281,656,885		43,281,656,885	
X	X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%	31,639,114,633	100%	32,264,303,538	100%	33,244,170,437	100%	34,187,307,552	100%	35,123,356,033	100%	35,123,356,033	
X	X	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	35.696.516	100%	64,114,193	100%	108,653,597	100%	151,523,466	100%	194,071,124	100%	194,071,124	
X	X	2.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	1 Dokumen	15,348,258	1 Dokumen	29,557,096	1 Dokumen	51,826,799	1 Dokumen	73,261,733	1 Dokumen	94,535,562	1 Dokumen	94,535,562	
X	X	2.01 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
X	X	2.01 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
X	X	2.01 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	2022-2026										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Peringkat Daerah Penanggung jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
X	X	X	2.001	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD														
X	X	X	2.001	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Tercapainya hasil kinerja perangkat daerah kab/kota	100%	100%	20,348,258	100%	34,557,096	100%	56,826,799	100%	78,261,733	100%	99,535,562	100%	99,535,562
					- Terlaksananya penyusunan SPM dan SOP	100%	2 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok	
X	X	X	2.001	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
X	X	X	2.002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	13,289,335,915	100%	13,317,753,593	100%	13,362,292,997	100%	13,405,162,866	100%	13,447,710,524	100%	13,447,710,524
X	X	X	2.002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketepatan waktu pemberian gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	13,237,730,258	100%	13,251,939,096	100%	13,274,208,799	100%	13,295,643,733	100%	13,316,917,562	100%	13,316,917,562
X	X	X	2.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
X	X	X	2.002	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD yang dilaksanakan	100%	3 Dokumen	51,605,658	3 Dokumen	65,814,496	3 Dokumen	88,084,199	3 Dokumen	109,519,133	3 Dokumen	130,792,962	3 Dokumen	130,792,962
X	X	X	2.002	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
X	X	X	2.002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Peringkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
X	X	2	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
X	X	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD														
X	X	2	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
X	X	2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	106,914,973	100%	149,541,489	100%	216,350,596	100%1	280,655,399	100%	344,476,886	100%	344,476,886
X	X	2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun	100%	1 Dokumen	20,126,458	1 Dokumen	34,335,296	1 Dokumen	56,604,999	1 Dokumen	78,039,933	1 Dokumen	99,313,762	1 Dokumen	99,313,762
X	X	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
X	X	2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
X	X	2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik Daerah	100%	100%	52,948,258	100%	67,157,096	100%	89,426,799	100%	110,861,733	100%	132,135,562	100%	132,135,562
X	X	2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Peringkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Milik Daerah pada SKPD															
X	X X 0 3	2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%	33,840,258	100%	48,049,096	100%	70,318,799	100%	91,753,733	100%	113,027,562	100%	113,027,562		
X	X X 0 3	2 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD															
X	X X 0 4	2 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah															
X	X X 0 4	2 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah															
X	X X 0 4	2 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah															
X	X X 0 4	2 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah															
X	X X 0 4	2 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah															
X	X X 0 4	2 Pengolahan Data Retribusi Daerah															
X	X X 0 4	2 Penetapan Wajib Retribusi Daerah															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Peringkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
X	X	2															
		0	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
X	X	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peresentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	124,946,515	100%	153,364,193	100%	197,903,597	100%	240,773,466	100%	283,321,124	100%	283,321,124
X	X	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
X	X	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya yang diadakan	100%	100%	20,348,258	100%	34,557,096	100%	56,826,799	100%	78,261,733	100%	99,535,562	100%	99,535,562
X	X	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
X	X	2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
X	X	2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
X	X	2	Pemulangan Pegawai yang Pensiun														
X	X	2	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas														
X	X	2	Pemindahan Tugas ASN														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
X	X	2 0 5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	6 orang	104,598,258	6 orang	118,807,096	6 orang	141,076,799	6 orang	162,511,733	6 orang	183,785,562	6 orang	183,785,562	
X	X	2 0 5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
X	X	2 0 5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
X	X	2 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	3,701,189,261	100%	3,814,859,971	100%	3,993,017,589	100%	4,164,497,064	100%	4,334,687,697	100%	4,334,687,697	
X	X	2 0 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	5 Jenis	21,548,258	5 Jenis	35,757,096	5 Jenis	58,026,799	5 Jenis	79,461,733	5 Jenis	100,735,562	5 Jenis	100,735,562	
X	X	2 0 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	166,485,158	100%	180,693,996	100%	202,963,699	100%	224,398,633	100%	245,672,462	100%	245,672,462	
X	X	2 0 6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	12 Bulan	168,845,758	12 Bulan	183,054,596	12 Bulan	205,324,299	12 Bulan	226,759,233	12 Bulan	248,033,062	12 Bulan	248,033,062	
X	X	2 0 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	510,349,258	12 Bulan	524,558,096	12 Bulan	546,827,799	12 Bulan	568,262,733	12 Bulan	589,536,562	12 Bulan	589,536,562	
X	X	2 0 6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	61,912,258	12 Bulan	76,121,096	12 Bulan	98,390,799	12 Bulan	119,825,733	12 Bulan	141,099,562	12 Bulan	141,099,562	
X	X	2 0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Peringkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	06	Perundang-undangan															
X	X X 0 6	2 Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan Material	12 Bulan	12 Bulan 58,908,058	12 Bulan	73,116,896	12 Bulan	95,386,599	12 Bulan	116,821,533	12 Bulan	138,095,362	12 Bulan	138,095,362		
X	X X 0 6	2 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang di fasilitasi	100%	134 Kali 53,314,258	135 Kali	67,523,096	135 Kali	89,792,799	135 Kali	111,227,733	135 Kali	132,501,562	135 Kali	132,501,562		
X	X X 0 6	2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang diselenggarakan	1500 kali	2,659,826,258	1600 kali	2,674,035,096	1500 kali	2,696,304,799	1700 kali	2,717,739,733	1800 kali	2,739,013,562	1800 kali	2,739,013,562		
X	X X 0 6	2 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
X	X X 0 6	2 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															
X	X X 0 7	2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terkoordinasinya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100% 2,455,468,930	100%	2,512,304,285	100%	2,601,383,094	100%	2,687,122,832	100%	2,772,218,148	100%	2,772,218,148		
X	X X 0 7	2 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	5 Unit 635,348,258	7 Unit	649,557,096	7 Unit	671,826,799	7 Unit	693,261,733	7 Unit	714,535,562	7 Unit	714,535,562		
X	X X 0 7	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
X	X X 0 7	2 Pengadaan Alat Besar															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Kondisi Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Peringkat Daerah Penanggung jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
X	X	2.07	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor															
X	X	2.07	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	100%	13 Unit	72,692,058	14 unit	86,900,896	15 unit	109,170,599	16 unit	130,605,533	17 unit	151,879,362	17 unit	151,879,362	
X	X	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	100%	20 Unit	351,848,258	20 Unit	366,057,096	20 Unit	388,326,799	20 Unit	409,761,733	20 Unit	431,035,562	20 Unit	431,035,562	
X	X	2.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya															
X	X	2.07	Pengadaan Aset Tak Berwujud															
X	X	2.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
X	X	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
X	X	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang diadakan	100%	36 Unit	1,395,580,358	36 Unit	1,409,789,196	36 Unit	1,432,058,899	36 Unit	1,453,493,833	36 Unit	1,474,767,662	36 Unit	1,474,767,662	
X	X	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	5,081,582,995	100%	5,124,209,511	100%	5,191,018,618	100%	5,255,323,421	100%	5,319,144,908	100%	5,319,144,908	
X	X	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100%	100%	75,348,258	100%	89,557,096	100%	111,826,799	100%	133,261,733	100%	154,535,562	100%	154,535,562	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Kondisi Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Peringkat Daerah Penanggung jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
X	X	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	100%	12 Bulan	1,223,568,258	12 Bulan	1,237,777,096	12 Bulan	1,260,046,799	12 Bulan	1,281,481,733	12 Bulan	1,302,755,562	12 Bulan	1,302,755,562	
X	X	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa peralatan dan perlengkapan kantor														
X	X	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	3,782,666,480	100%	3,796,875,318	100%	3,819,145,021	100%	3,840,579,955	100%	3,861,853,784	100%	3,861,853,784	
X	X	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	12 Bulan	12 Bulan	2,441,281,981	12 Bulan	2,540,743,852	12 Bulan	2,696,631,768	12 Bulan	2,846,676,309	12 Bulan	2,995,593,113	12 Bulan	2,995,593,113	
X	X	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan	100%	100%	879,004,258	100%	893,213,096	100%	915,482,799	100%	936,917,733	100%	958,191,562	100%	958,191,562	
X	X	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	451,144,667	100%	465,353,505	100%	487,623,208	100%	509,058,142	100%	530,331,971	100%	530,331,971	
X	X	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perang kat Dae rah Pen ang gun g jaw ab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	09	Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar															
X	X X 0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor															
X	X X 0 9	Pemeliharaan Mebel															
X	X X 0 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	100%	100%	51,203,258	100%	65,412,096	100%	87,681,799	100%	109,116,733	100%	130,390,562	100%	130,390,562	
X	X X 0 9	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya di peliharaan	100%	100%	295,483,227	100%	309,692,065	100%	331,961,768	100%	353,396,702	100%	374,670,531	100%	374,670,531	
X	X X 0 9	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud															
X	X X 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara	100%	2 Unit	450,038,058	2 Unit	464,246,896	2 Unit	486,516,599	2 Unit	507,951,533	2 Unit	529,225,362	2 Unit	529,225,362	
X	X X 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara	100%	100%	188,178,258	100%	202,387,096	100%	224,656,799	100%	246,091,733	100%	267,365,562	100%	267,365,562	
X	X X 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara	100%	100%	126,230,258	100%	140,439,096	100%	162,708,799	100%	184,143,733	100%	205,417,562	100%	205,417,562	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Peringkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
X	X	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah														
X	X	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD														
X	X	2.10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
X	X	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase kebutuhan pelaksanaan kegiatan kepala daerah dan wakil daerah yang terpenuhi	100%	100%	1,075,463,973	100%	1,118,090,489	100%	1,184,899,596	100%	1,249,204,399	100%	1,313,025,886	100%	1,313,025,886
X	X	2.11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	235.038.258	100%	249.247.096	100%	271.516.799	100%	292.951.733	100%	314.225.562	100%	314.225.562
X	X	2.11	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	132 Stel	410.148.258	132 Stel	424.357.096	132 Stel	446.626.799	132 Stel	468.061.733	132 Stel	489.335.562	132 Stel	489.335.562
X	X	2.11	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Medical Check up kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	8 Orang	30.277.458	8 Orang	44.486.296	8 Orang	66.755.999	8 Orang	88.190.933	8 Orang	109.464.762	8 Orang	109.464.762
X	X	2.11	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	2022										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
X	X	2	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Daerah	12 Bulan	12 Bulan	680,696,515	12 Bulan	709,14,193	12 Bulan	753,653,597	12 Bulan	796,523,466	12 Bulan	839,071,124	12 Bulan	839,071,124	
X	X	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga kepala daerah	100%	12 Bulan	370,348,258	12 Bulan	384,557,096	12 Bulan	406,826,799	12 Bulan	428,261,733	12 Bulan	449,535,562	12 Bulan	449,535,562	
X	X	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	100%	12 Bulan	310,348,258	12 Bulan	324,557,096	12 Bulan	346,826,799	12 Bulan	368,261,733	12 Bulan	389,535,562	12 Bulan	389,535,562	
X	X	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah															
X	X	2	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Daerah yang sesuai	100%	100%	299,616,288	100%	370,660,482	100%	482,008,993	100%	589,183,665	100%	695,552,811	100%	695,552,811	
X	X	2	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	- Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Tugas dan Fungsi Jabatan	37 Buah Perbup	37 Buah Perbup	68,223,258	37 Buah Perbup	82,432,096	37 Buah Perbup	104,701,799	37 Buah Perbup	126,136,733	37 Buah Perbup	147,410,562	37 Buah Perbup	147,410,562	
				- Penyusunan Profil kelembagaan Perangkat Daerah	1 Buah Dokumen	1 Buah Dokumen		1 Buah Dokumen		1 Buah Dokumen								
				- Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah	62 Buah Perbup	62 Buah Perbup		62 Buah Perbup		62 Buah Perbup								
				- Penyusunan standar Kompetensi Jabatan,	1 Buah Perbup	1 Buah Perbup		1 Buah Perbup		1 Buah Perbup								

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		- Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	1 Buah Perbup	1 Buah Perbup	1 Buah Perbup		1 Buah Perbup		1 Buah Perbup		1 Buah Perbup		1 Buah Perbup		1 Buah Perbup			
		- Revisi Perda tentang Perangkat Daerah	-	1 Perda	1 Perda		1 Perda		1 Perda		1 Perda		1 Perda		1 Perda			
		- Fasilitasi penginputan SIMONA	-	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			
		- Fasilitasi penginputan E-Formasi	-	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			
		- Fasilitasi Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN	-	37 OPD	37 OPD		37 OPD		37 OPD		37 OPD		37 OPD		37 OPD			
X	X	2.13	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	- Penyusunan pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja, Prosedur Kerja, dan pola hubungan kerja	1 Buah Perbup	1 Buah Perbup	1 Buah Perbup		1 Buah Perbup		1 Buah Perbup		1 Buah Perbup		1 Buah Perbup			
		- Bimbingan Teknis di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik		37 OPD	37 OPD	37 OPD	60,348,258	37 OPD	74,557,096	37 OPD	96,826,799	37 OPD	118,261,733	37 OPD	139,535,562	37 OPD	139,535,562	
		- sosialisasi dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik		37 OPD	37 OPD	37 OPD		37 OPD		37 OPD		37 OPD		37 OPD		37 OPD		
		- Fasilitasi penyusunan standar operasional prosedur yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah		37 OPD	37 OPD	37 OPD		37 OPD		37 OPD		37 OPD		37 OPD		37 OPD		
		- koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik		37 OPD	37 OPD	37 OPD		37 OPD		37 OPD		37 OPD		37 OPD		37 OPD		
		- Fasilitasi Penyusunan Peta Proses Bisnis	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
X	X	2.	Peningkatan Kinerja dan	- koordinasinya dan Fasilitasi pelaksanaan Reformasi birokrasi	37 OPD	37 OPD	60,348,258	37 OPD	74,557,096	37 OPD	96,826,799	37 OPD	118,261,733	37 OPD	139,535,562	37 OPD	139,535,562	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Peringkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		13	Reformasi Birokrasi														
			- Pengadaan Aplikasi E-Sakip	-	1 Aplikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- Pemeliharaan Operasional Aplikasi E-Sakip	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
			- Penyusunan Pedoman pelaksanaan Budaya kerja	-	1 Buah Perbup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Budaya kerja	37 OPD	37 OPD	37 OPD	37 OPD	37 OPD	37 OPD	37 OPD	37 OPD	37 OPD	37 OPD	37 OPD	37 OPD	37 OPD	37 OPD
			- Pendampingan Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
X	X	2.1.3	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	37 OPD	37 OPD	55,348,258	37 OPD	69,557,096	37 OPD	91,826,799	37 OPD	113,261,733	37 OPD	134,535,562	37 OPD	134,535,562	
X	X	2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	55,348,258	1 Dokumen	69,557,096	1 Dokumen	91,826,799	1 Dokumen	113,261,733	1 Dokumen	134,535,562	1 Dokumen	134,535,562	
			- Coaching Clinic Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	37 OPD	37 OPD		37 OPD		37 OPD		37 OPD		37 OPD		37 OPD		
X	X	2.1.4	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	100%	2,346,920,773	100%	2,389,547,289	100%	2,456,356,396	100%	2,520,661,199	100%	2,584,482,686	100%	2,584,482,686	
X	X	2.1.4	Fasilitasi Keprotokolalan	100%	100%	1,850,134,258	100%	1,864,343,096	100%	1,886,612,799	100%	1,908,047,733	100%	1,929,321,562	100%	1,929,321,562	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Peringkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		- Terlaksananya penerimaan kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga pemerintah non departemen/Luar Negeri	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		- Terlaksananya penerimaan Tamu-tamu Pemda	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		-Terlaksananya tata ke protokolalan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
X	X X X	2 . 1 4 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			360,313,258		374,522,096		396,791,799		418,226,733		439,500,562		439,500,562		
X	X X X	2 . 1 4 Pendokumentasian Tugas Pimpinan			136,473,258		150,682,096		172,951,799		194,386,733		215,660,562		215,660,562		
4	1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT															
		Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	5,256,112,333	100%	5,359,973,113	100%	5,522,755,496	100%	5,679,436,070	100%	5,834,939,030	100%	5,834,939,030		
4	1	2 . 0 1 Administrasi Tata Pemerintahan			1,206,507,000	100%	1,237,665,234	100%	1,286,499,949	100%	1,333,504,121	100%	1,380,155,009	100%	1,380,155,009		
4	1	2 . 0 1 Penataan Administrasi Pemerintahan															
		- Terlaksananya koordinasi terkait administrasi pemerintahan ke pemerintah provinsi	12 Kali	12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali	
		- Terlaksananya Forum Group discusion unsur pimpinan daerah	12 Kali	12 Kali	210,532,333	12 Kali	220,918,411	12 Kali	237,196,650	12 Kali	252,864,707	12 Kali	268,415,003	12 Kali	268,415,003		
		- Terlaksananya forum Sekretaris Daerah	1 Kali	1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Kondisi Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Peringkat Daerah Penganggung jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		- Terlaksananya penyusunan presensi kegiatan Bupati /Wakil Bupati	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan					
4	1	2 0 1	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	- Terverifikasinya Rupa Bumi dalam Wilayah Kepulauan Selayar	100%	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
				- Data Profil dan luas Wilayah Kecamatan se Kabupaten Kepulauan Selayar	100%	1 Dokumen	95,532,333	1 Dokumen	105,918,411	1 Dokumen	122,196,650	1 Dokumen	137,864,707	1 Dokumen	153,415,003	1 Dokumen	153,415,003	
4	1	2 0 1	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	- Tersusunnya Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
				- Tersusunnya Dokumen LPPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
				- Tersusunnya Dokumen LKPJ	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
				- Tersusunnya Dokumen SOP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
				- Terlaksananya Bimtek LPPD	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali		
4	1	2 0 2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kegiatan tentang Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	2,928,848,000	100%	2,960,006,234	100%	3,008,840,949	100%	3,055,845,121	100%	3,102,496,009	100%	3,102,496,009	
4	1	2 0 2	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Pengelolaan Bina Mental Spiritual yang difasilitasi	100%	100%	496,183,333	100%	506,569,411	100%	522,847,650	100%	538,515,707	100%	554,066,003	100%	554,066,003	
4	1	2 0 2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	100%	100%	1,320,532,333	100%	1,330,918,411	100%	1,347,196,650	100%	1,362,864,707	100%	1,378,415,003	100%	1,378,415,003	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Peringkat Daerah Penanggung jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
4	1	2 0 2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	1,112,132,333	100%	1,122,518,411	100%	1,138,796,650	100%	1,154,464,707	100%	1,170,015,003	100%	1,170,015,003	
4	1	2 0 3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Meningkatnya Proses Pengelolaan Produk Hukum Daerah dan Penyelesaian Bantuan Hukum Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	100%	100%	1,015,225,000	100%	1,046,383,234	100%	1,095,217,949	100%	1,142,222,121	100%	1,188,873,009	100%	1,188,873,009	
4	1	2 0 3	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Peningkatan Jumlah Produk Hukum	-	10 Ranperda	352,492,333	16 Ranperda	362,878,411	23 Ranperda	379,156,650	32 Ranperda	394,824,707	43 Ranperda	410,375,003	43 Ranperda	410,375,003	
4	1	2 0 3	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Jumlah Bantuan Hukum yang Ditindaklanjuti	-	2 Kasus	387,132,333	4 Kasus	397,518,411	6 Kasus	413,796,650	8 Kasus	429,464,707	10 Kasus	445,015,003	10 Kasus	445,015,003	
4	1	2 0 3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Tersampainya Produk Hukum Daerah yang Terbit di Masyarakat	-	50 Produk Hukum Daerah	275,600,333	100 Produk Hukum Daerah	285,986,411	150 Produk Hukum Daerah	302,264,650	200 Produk Hukum Daerah	317,932,707	250 Produk Hukum Daerah	333,483,003	250 Produk Hukum Daerah	333,483,003	
4	1	2 0 4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase terselenggaranya Kerjasama Dalam Negeri	100%	100%	105,532,333	100%	115,918,411	100%	132,196,650	100%	147,864,707	100%	163,415,003	100%	163,415,003	
4	1	2 0 4	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	- Terealisasinya pembayaran iuran epkasi	1 Kali	1 Kali	105,532,333	1 Kali	115,918,411	1 Kali	132,196,650	1 Kali	147,864,707	1 Kali	163,415,003	1 Kali	163,415,003	
				- Tercapaiannya kerjasama lembaga daerah	30 Dokumen	30 Dokumen		30 Dokumen		30 Dokumen		30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen		
4	1	2 0 4	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Kondisi Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Peringkat Daerah Penganggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
4	1	204	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
4	1		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	MENINGKATNYA KINERJA DAN KUALITAS PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	100%	100%	2,092,884,033	100%	2,134,239,422	100%	2,199,056,273	100%	2,261,443,500	100%	2,323,361,823	100%	2,323,361,823
4	1	201	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah kebijakan dan program kebijakan yang dilaksanakan (dilaporkan,dikoordinasikan/dievaluasi serta difasilitasi)	10 Dokumen	11 Kebijakan	645,439,833	11 Kebijakan	655,778,680	11 Kebijakan	671,982,893	11 Kebijakan	687,579,700	11 Kebijakan	703,059,281	11 Kebijakan	703,059,281
4	1	201	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Rekomendasi kebijakn peningkatan kinerja BUMD dan BLUD	4 Kebijakan	5 Kebijakan	161,152,611	5 Kebijakan	164,598,893	5 Kebijakan	170,000,298	5 Kebijakan	175,199,233	5 Kebijakan	180,359,094	5 Kebijakan	180,359,094
4	1	201	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	- Jumlah Kebijakan Pengendalian distribusi perekonomian yang di laksanakan (dievaluasi, difasilitasi atau di koordinasikan)	3 Kebijakan	3 Kebijakan	182,343,611	3 Kebijakan	185,789,893	3 Kebijakan	191,191,298	3 Kebijakan	196,390,233	3 Kebijakan	201,550,094	3 Kebijakan	201,550,094
-																	
4	1	201	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah kebijakan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang dievaluasi, difasilitasi atau di koordinasikan	3 Kebijakan	3 Kebijakan	301,943,611	3 Kebijakan	305,389,893	3 Kebijakan	310,791,298	3 Kebijakan	315,990,233	3 Kebijakan	321,150,094	3 Kebijakan	321,150,094
4	1	201	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Peringkat Daerah Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Pembentukan BLUD															
4	1	2 0 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD														
4	1	2 0 4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Kebijakan Sumber Daya Alam yang dievaluasi, difasilitasi, dan dikoordinasikan	10 Kebijakan	10 Kebijakan	207,684,833	10 Kebijakan	218,023,680	10 Kebijakan	234,227,893	10 Kebijakan	249,824,700	10 Kebijakan	265,304,281	10 Kebijakan	265,304,281
4	1	2 0 4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	- Jumlah kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan yang dievaluasi, difasilitasi atau di koordinasikan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	69,943,611	5 Kebijakan	73,389,893	5 Kebijakan	78,791,298	5 Kebijakan	83,990,233	5 Kebijakan	89,150,094	5 Kebijakan	89,150,094
4	1	2 0 4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	- Jumlah Kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup yang dievaluasi, difasilitasi atau dikoordinasikan	3 Kebijakan	3 Kebijakan	49,797,611	3 Kebijakan	53,243,893	3 Kebijakan	58,645,298	3 Kebijakan	63,844,233	3 Kebijakan	69,004,094	3 Kebijakan	69,004,094
4	1	2 0 4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	- Jumlah Kebijakan energi dan air yang dievaluasi, difasilitasi atau dikoordinasikan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	87,943,611	2 Kebijakan	91,389,893	2 Kebijakan	96,791,298	2 Kebijakan	101,990,233	2 Kebijakan	107,150,094	2 Kebijakan	107,150,094
4	1	2 0 2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kelancaran Proses Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	100%	100%	487,963,533	100%	498,302,380	100%	514,506,593	100%	530,103,400	100%	545,582,981	100%	545,582,981
4	1	2 0 2	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Kebijakan Pembangunan yang di susun (Pedoman APBD)	1 Dokumen	1 Dokumen	41,965,611	1 Dokumen	45,411,893	1 Dokumen	50,813,298	1 Dokumen	56,012,233	1 Dokumen	61,172,094	1 Dokumen	61,172,094

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Kondisi Kinerja										Peringkat Daerah Penanggung jawab				
				2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
4	1	202	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	- Jumlah kegiatan/Proyek Pembangunan di kecamatan daratan dan kepulauan yang di Movev	10 Lap	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
			- Jumlah Lokakarya Mini (LOKMIN) Pembangunan yang dilaksanakan	1 Laporan		361,219,311	1 Laporan	364,665,593	1 Laporan	370,066,998	1 Laporan	375,265,933	1 Laporan	380,425,794	1 Laporan	380,425,794		
			- Jumlah Evaluasi pengendalian kegiatan DAK Yang dilaksanakan	4 Laporan			4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan			
			- Jumlah Evaluasi Kegiatan Pengawasan Pembangunan yang dilaksanakan (Rakorbang)	4 Laporan			4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan			
4	1	202	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	- Jumlah Laporan Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan/RFK yang terevaluasi	24 Lap	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		
			- Jumlah laporan Pengawasan dan Realisasi Anggaran APBD yang dilaporkan	12 Laporan		84,778,611	12 Laporan	88,224,893	12 Laporan	93,626,298	12 Laporan	98,825,233	12 Laporan	103,985,094	12 Laporan	103,985,094		
4	1	203	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatkan Kapasitas tata Kelola Pemerintahan di Bidang Layanan Pengadaan Barang/Jasa	100%	100%	751,795,833	100%	762,134,680	100%	778,338,893	100%	793,935,700	100%	809,415,281	100%	809,415,281	
4	1	203	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	- Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan di bidang layanan pengadaan barang dan jasa	100%	100%	107,688,611	100%	111,134,893	100%	116,536,298	100%	121,735,233	100%	126,895,094	100%	126,895,094	
			- Meningkatkan pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui SPSE (Sistem pengadaan secara elektronik)	100%		100%	107,688,611	100%	111,134,893	100%	116,536,298	100%	121,735,233	100%	126,895,094	100%	126,895,094	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Peringkat Daerah Penanggung jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
4	1	2 0 3	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Terlaksananya pengumuman lelang dan proses pengadaan secara elektronik	100%	100%	464,843,611	100%	468,289,893	100%	473,691,298	100%	478,890,233	100%	484,050,094	100%	484,050,094	
4	1	2 0 3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien	100%	100%	179,263,611	100%	182,709,893	100%	188,111,298	100%	193,310,233	100%	198,470,094	100%	198,470,094	

Tabel 6.2
*Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar
(Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889)*

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Sekretariat Daerah				35,127,286,681		35,608,179,236		36,499,451,962		37,375,073,814		38,266,843,076		38,266,843,076		
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Setda	Meningkatnya Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah			Indeks reformasi birokrasi setda	n/a	55		61		66		72		76		76			
				Nilai Sakip OPD	0	CC		B		B		BB		BB		BB			
				Laporan keuangan OPD yang tersaji sesuai SAP	0	Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai			
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah	0	60		65		70		75		80		80			

Tujuan	Sasaran	Kode			Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase Capaian Kinerja (%)	50.91	63.03	29,113,863,681	70.28	29,512,432,475	70.53	30,251,128,660	71.51	30,976,853,236	72.31	31,715,960,954	72.31	31,715,960,954	Setda	Benteng
		0	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	32,840,808	100%	57,702,773	100%	98,874,774	100%	136,371,080	100%	175,609,367	100%	175,609,367		
		0	1	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	14,120,411	2 Dokumen	26,601,386	2 Dokumen	47,162,387	2 Dokumen	65,935,560	2 Dokumen	86,027,361	10 Dokumen	86,027,361		
		0	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															

Tujuan	Sasaran	Kode			Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		0103	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
		0104	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD															
		0105	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	18,720,397	1 Laporan	31,101,386	1 Laporan	51,712,387	1 Laporan	70,435,520	1 Laporan	89,582,006	5 Laporan	89,582,006		
		0107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
		0102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	12,232,067,243	100%	11,985,978,233	100%	12,159,686,628	100%	12,064,646,580	100%	12,038,581,212	100%	12,038,581,212		
		0102	Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	130 org/bulan	130 org/bulan	12,178	130 org/bulan	11,926	130 org/bulan	12,079	130 org/bulan	11,966	130 org/bulan	11,985,225,806	650 org/bulan	11,985,225,806		

Tujuan	Sasaran	Kode			Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
					Tunjangan ASN	dan Tunjangan ASN			,711,837			,745,186			,530,007			,079,360					
		01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
		01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	53,355,406	3 Dokumen	59,233,046	3 Dokumen	80,156,621	3 Dokumen	98,567,220	3 Dokumen	53,355,406	15 Dokumen	53,355,406				
		01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
		01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan																	

Tujuan	Sasaran	Kode			Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		012	2.06	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan															
		012	2.07	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD															
		012	2.08	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran															

Tujuan	Sasaran	Kode			Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		013	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/laporan pengelolaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	98,361,775	100%	134,587,339	100%	196,879,043	100%	252,589,860	100%	310,029,197	100%	310,029,197		
		013	2.01	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	18,516,341	1 Dokumen	30,901,766	1 Dokumen	51,510,549	1 Dokumen	70,235,940	1 Dokumen	89,382,386	5 Dokumen	89,382,386		
		013	2.02	0	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD															
		013	2.03	0	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		01304	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan 48,712,397	1 Laporan 60,441,386	1 Laporan 81,378,387	1 Laporan 99,775,560	1 Laporan 118,922,006	5 Laporan 118,922,006								
		01305	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															
		01306	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan 31,133,037	1 Laporan 43,244,186	1 Laporan 63,990,107	1 Laporan 82,578,360	1 Laporan 101,724,806	5 Laporan 101,724,806								
		01307	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD															

Tujuan	Sasaran	Kode			Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		014	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%														
		014	2.01	0	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah															
		014	2.04	0	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah															
		014	2.04	0	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah															

Tujuan	Sasaran	Kode			Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		014	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah															
		014	2.05	04	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah															
		014	2.06	04	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah															
		014	2.07	04	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah															
		015	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	100%	100%	114,950,794	100%	138,027,773	100%	180,092,274	100%	216,696,120	100%	254,989,012	100%	254,989,012		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		01501	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai															
		01502	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	18,720,397	1 Paket	31,101,386	1 Paket	51,712,387	1 Paket	70,435,560	1 Paket	89,582,006	5 Paket	89,582,006		
		01503	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
		01504	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian															
		01505	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				Kinerja Pegawai															
		0105	206	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan														
		0105	207	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas														
		0105	208	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan														
		0105	209	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	5 orang	96,230,397	5 orang	106,926,386	5 orang	128,379,887	5 orang	146,260,560	5 orang	165,407,006	25 orang	165,407,006	
		0105	210	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		0105	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang											15 orang			
		0106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100%	100%	3,405,094,120	100%	3,907,933,275	100%	3,633,646,009	100%	3,956,323,826	100%	4,069,572,360	100%	4,069,572,360		
		0106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19,824,397	1 Paket	32,181,386	1 Paket	52,804,387	1 Paket	71,515,560	1 Paket	90,662,006	5 Paket	90,662,006		
		0106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	153,166,345	1 Paket	162,624,596	1 Paket	184,696,966	1 Paket	201,958,770	1 Paket	221,105,216	5 Paket	221,105,216		
		0106	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	155,338,097	1 Paket	164,749,136	1 Paket	186,845,112	1 Paket	204,083,310	1 Paket	223,229,756	5 Paket	223,229,756		
		0106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	1 Paket	1 Paket	469,521,317	1 Paket	472,102,286	1 Paket	497,613,297	1 Paket	511,436,460	1 Paket	530,582,906	5 Paket	530,582,906		

Tujuan	Sasaran	Kode			Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
					Kantor yang Disediakan																
		0106	205	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	56,959,277	1 Paket	68,508,986	1 Paket	89,535,627	1 Paket	107,843,160	1 Paket	126,989,606	5 Paket	126,989,606		
		0106	206	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen													
		0106	207	0	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	54,195,413	1 Paket	65,805,206	1 Paket	86,801,805	1 Paket	105,139,380	1 Paket	124,285,826	5 Paket	124,285,826		
		0106	208	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	49,049,117	1 Laporan	60,770,786	1 Laporan	81,711,447	1 Laporan	100,104,960	1 Laporan	119,251,406	5 Laporan	119,251,406		
		0106	209	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2,447,040,157	1 Laporan	2,881,190,890	1 Laporan	2,453,637,367	1 Laporan	2,654,242,226	1 Laporan	2,633,465,639	5 Laporan	2,633,465,639		

Tujuan	Sasaran	Kode			Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
		01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															
		01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD	100%	100%	2,259,031,416	100%	2,261,073,856	100%	2,367,258,617	100%	2,418,410,550	100%	2,494,996,333	100%	2,494,996,333		
		01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit	1 Unit	584,520,397	4 Unit	584,601,386	4 Unit	611,362,387	4 Unit	623,935,560	4 Unit	643,082,006	17 Unit	643,082,006		
		01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	15 Unit														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				atau Lapangan	Lapangan yang Disediakan														
		0103	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan															
		0104	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan															
		0105	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	9 Unit	66,876,693	9 Unit	78,210,806	9 Unit	99,345,245	9 Unit	117,544,980	9 Unit	136,691,426	45 Unit	136,691,426		
		0106	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	10 Unit	15 Unit	323,700,397	15 Unit	329,451,386	15 Unit	353,377,387	15 Unit	368,785,560	15 Unit	387,932,006	75 Unit	387,932,006		
		0107	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan															
		0108	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan															
		0109	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan															

Tujuan	Sasaran	Kode			Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
					Bangunan Lainnya	Lainnya yang Disediakan															
		017	200	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan															
		017	201	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	30 Unit	1,283,933,929	30 Unit	1,268,810,276	30 Unit	1,303,173,598	30 Unit	1,308,144,450	30 Unit	1,327,290,896	150 Unit	1,327,290,896		
		018	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	4,675,056,356	100%	4,611,788,559	100%	4,722,760,488	100%	4,729,791,080	100%	4,787,230,417	100%	4,787,230,417		
		018	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	69,320,397	2 Laporan	80,601,386	2 Laporan	100,695,932	2 Laporan	119,935,560	2 Laporan	139,082,006	10 Laporan	139,082,006		

Tujuan	Sasaran	Kode			Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		018	2.02	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan 1,125,682,797	1 Laporan	1,113,999,386	1 Laporan	1,146,642,587	1 Laporan	1,153,333,560	1 Laporan	1,172,480,006	5 Laporan	1,172,480,006			
		018	2.03	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan													
		018	2.04	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan 3,480,053,162	6 Laporan	3,417,187,786	6 Laporan	3,475,421,969	6 Laporan	3,456,521,960	6 Laporan	3,475,668,406	6 Laporan	3,475,668,406			
		019	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Tujuan	Sasaran	Kode			Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		019	2.01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	20 unit 808,683,917	20 unit	20 unit 803,891,786	20 unit	20 unit 833,089,347	20 unit	20 unit 843,225,960	20 unit	20 unit 862,372,406	240 unit	862,372,406			
		019	2.02	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	48 Unit 415,053,094	48 Unit	48 Unit 418,818,155	48 Unit	48 Unit 443,737,119	48 Unit	48 Unit 458,152,328	48 Unit	48 Unit 477,298,774	40 Unit	477,298,774			
		019	2.03	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		01904	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	Unit													
		01905	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit		12 Unit		12 Unit		12 Unit		12 Unit		60 Unit			
		01906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	2 Unit	2 Unit	47,106,997	2 Unit	58,870,886	2 Unit	79,790,437	2 Unit	98,205,060	2 Unit	117,351,506	10 Unit	117,351,506		
		01907	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya di pemeliharaan	5 Unit	5 Unit	271,844,569	5 Unit	278,722,859	5 Unit	302,085,209	5 Unit	318,057,032	5 Unit	337,203,478	25 Unit	337,203,478		
		01908	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara															
		01909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara	4 Unit	4 Unit	414,035,013	4 Unit	417,822,206	4 Unit	442,730,105	4 Unit	457,156,380	4 Unit	476,302,826	4 Unit	476,302,826		

Tujuan	Sasaran	Kode			Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara	25 Unit	25 Unit	173,123,997	25 Unit	182,148,386	25 Unit	204,437,687	25 Unit	221,482,560	25 Unit	240,629,006	125 Unit	240,629,006		
		01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara	32 Unit	32 Unit	116,131,837	32 Unit	126,395,186	32 Unit	148,065,007	32 Unit	165,729,360	32 Unit	184,875,806	160 Unit	184,875,806		
		01	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	M ²	M ²													
		01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Fasilitas Peningkatan Pelayanan BLUD															
		01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan															

Tujuan	Sasaran	Kode			Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		011	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	989,426,855	100%	1,006,281,439	100%	1,078,258,633	100%	1,124,283,960	100%	1,181,723,297	100%	1,181,723,297		
		011	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/bulan	2 Orang/bulan	216,235,197	2 Orang/bulan	224,322,386	2 Orang/bulan	247,080,287	2 Orang/bulan	263,656,560	2 Orang/bulan	282,803,006	10 Orang/bulan	282,803,006		
		011	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	377,336,397	1 Paket	381,921,386	1 Paket	406,430,387	1 Paket	421,255,560	1 Paket	440,402,006	5 Paket	440,402,006		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		01103	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	8 Orang 27,855,261	8 Orang	40,037,666	8 Orang	60,747,959	8 Orang	79,371,840	8 Orang	98,518,286	8 Orang	98,518,286			
		01104	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang 368,000,000	2 Orang	360,000,000	2 Orang	364,000,000	2 Orang	360,000,000	2 Orang	360,000,000	2 Orang	360,000,000			
		01102	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	100% 626,240,794	100%	638,202,773	100%	685,824,774	100%	716,871,120	100%	755,164,012	100%	755,164,012			
		01102	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket 340,720,397	1 Paket	346,101,386	1 Paket	370,212,387	1 Paket	385,435,560	1 Paket	404,582,006	5 Paket	404,582,006			

Tujuan	Sasaran	Kode			Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		012	2.12	0	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	285,520,397	1 Paket	292,101,386	1 Paket	315,612,387	1 Paket	331,435,560	1 Paket	350,582,006	5 Paket	350,582,006		
		012	2.13	0	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan															
		013	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Fasilitas Penataan Organisasi	100%	100%	275,646,985	100%	333,594,432	100%	438,628,185	100%	530,265,300	100%	625,997,529	100%	625,997,529		
		013	2.13	0	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	3 Dokumen	62,765,397	3 Dokumen	74,188,886	3 Dokumen	95,278,637	3 Dokumen	113,523,060	3 Dokumen	132,669,506	15 Dokumen	132,669,506		
		013	2.13	0	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	3 Laporan	55,520,397	3 Laporan	67,101,386	3 Laporan	88,112,387	3 Laporan	106,435,560	3 Laporan	125,582,006	15 Laporan	125,582,006		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		0130	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	55,520,397	1 Dokumen	67,101,386	1 Dokumen	88,112,387	1 Dokumen	106,435,560	1 Dokumen	125,582,006	5 Dokumen	125,582,006		
		0134	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	50,920,397	1 Dokumen	62,601,386	1 Dokumen	83,562,387	1 Dokumen	101,935,560	1 Dokumen	121,082,006	5 Dokumen	121,082,006		
		0135	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50,920,397	1 Dokumen	62,601,386	1 Dokumen	83,562,387	1 Dokumen	101,935,560	1 Dokumen	121,082,006	5 Dokumen	121,082,006		
		0144	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	100%	2,159,167,111	100%	2,150,592,559	100%	2,235,284,321	100%	2,268,595,080	100%	2,326,034,417	100%	2,326,034,417		
		0144	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	1 Laporan	1,702,123,517	1 Laporan	1,677,908,786	1 Laporan	1,716,817,647	1 Laporan	1,717,242,960	1 Laporan	1,736,389,406	5 Laporan	1,736,389,406		

Tujuan	Sasaran	Kode			Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi						
								2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp								
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
		014	202	0	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan	331,48	8,197	1 Laporan	337,06	9,886	1 Laporan	361,08	0,537	1 Laporan	376,40	4,060	1 Laporan	395,55	0,506	5 Laporan	395,55	0,506		
		014	203	0	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan	125,55	5,397	1 Laporan	135,61	3,886	1 Laporan	157,38	6,137	1 Laporan	174,94	8,060	1 Laporan	194,09	4,506	5 Laporan	194,09	4,506		
Mengoordinasikan, menselaraskan, mengharmoniskan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan telah didesentralisasikan ke pemerintah kabupaten	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang pemerintahan & kesra	012	022		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase urusan bidang pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi (%)	100%	100%	4,483,938,800		100%	4,545,323,922		100%	4,659,093,380		100%	4,770,865,030		100%	4,884,697,870		100%	4,884,697,870			
						Persentase urusan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi (%)	100%	100%			100%			100%			100%			100%			100%				
		012	021		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Administrasi Tata	100%	100%	1,041,774,269		100%	1,041,362,227		100%	1,070,907,805		100%	1,102,497,236		100%	1,127,907,408		100%	1,127,907,408			

Tujuan	Sasaran	Kode				Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
									2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
						Pemerintahan																			
		01	02	20	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	3 Dokumen	178,952,483	3 Dokumen	177,127,428	3 Dokumen	179,000,000	3 Dokumen	146,000,000	3 Dokumen	225,468,603	15 Dokumen	225,468,603					
		01	02	20	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	2 Dokumen	97,445,803	2 Dokumen	90,030,649	2 Dokumen	103,867,153	2 Dokumen	108,000,000	2 Dokumen	97,445,803	10 Dokumen	97,445,803					
		01	02	20	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	765,375,983	3 Dokumen	774,204,149	3 Dokumen	788,040,653	3 Dokumen	848,497,236	3 Dokumen	804,993,003	15 Dokumen	804,993,003					
		01	02	20	02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	2,489,520,799	100%	2,516,005,298	100%	2,557,514,808	100%	2,597,468,353	100%	2,606,096,648	100%	2,606,096,648					
		01	02	20	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan	6 Dokumen	6 Dokumen	421,755,833	6 Dokumen	430,583,999	6 Dokumen	444,420,503	6 Dokumen	457,738,351	6 Dokumen	465,415,443	30 Dokumen	465,415,443					

Tujuan	Sasaran	Kode				Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
						Bina Mental Spiritual																
		01202	0202			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	2 Dokumen	1,122,452,483	2 Dokumen	1,131,280,649	2 Dokumen	1,145,117,153	2 Dokumen	1,158,435,001	2 Dokumen	1,157,868,603	10 Dokumen	1,157,868,603		

Tujuan	Sasaran	Kode				Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		01202	0203			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 Dokumen	3 Dokumen	945,312,483	3 Dokumen	954,140,649	3 Dokumen	967,977,153	3 Dokumen	981,295,001	3 Dokumen	982,812,603	15 Dokumen	982,812,603		
		01202	0204			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan															

Tujuan	Sasaran	Kode				Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
						Kelompok Masyarakat																
		01202	0202	2.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																
		01203	0203	2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	100%	862,941,249	100%	889,425,748	100%	930,935,258	100%	970,888,803	100%	998,653,328	100%	998,653,328			
		01203	0203	2.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	10 Dokumen	5 Dokumen	299,618,483	5 Dokumen	308,446,649	5 Dokumen	322,283,153	5 Dokumen	335,601,001	5 Dokumen	344,715,003	25 Dokumen	344,715,003			

Tujuan	Sasaran	Kode				Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		01203	203	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	3 Kasus	329,062,483	3 Kasus	337,890,649	3 Kasus	351,727,153	3 Kasus	365,045,001	3 Kasus	373,812,603	15 Kasus	373,812,603			
		01203	203	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	50 Dokumen	50 Dokumen	234,260,283	100 Dokumen	243,088,449	150 Dokumen	256,924,953	200 Dokumen	270,242,801	250 Dokumen	280,125,723	750 Dokumen	280,125,723			
		01204	204		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	100%	89,702,483	100%	98,530,649	100%	99,735,510	100%	100,010,638	100%	152,040,487	100%	152,040,487			
		01204	204	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	89,702,483	1 Dokumen	98,530,649	1 Dokumen	99,735,510	1 Dokumen	100,010,638	1 Dokumen	152,040,487	5 Dokumen	152,040,487			
		01204	204	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	Dokumen														
		01204	204	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	Dokumen	Dokumen														

Tujuan	Sasaran	Kode				Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
						Pelaksanaan Kerja Sama																
Mengoordinasikan, menselaraskan, mengharmoniskan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan telah didesentralisasikan ke pemerintah kabupaten	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang perekonomian & pembangunan	4	0	0		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi (%)	100%	100%	1,529,484,200	100%	1,550,422,839	100%	1,589,229,922	100%	1,627,355,548	100%	1,666,184,252	100%	1,666,184,252		
		0	0	2				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100%	100%	471,171,078	100%	471,983,430	100%	480,669,866	100%	491,933,180	100%	506,202,683	100%	506,202,683
		0	0	2	0	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	5 Dokumen	117,641,406	5 Dokumen	120,157,192	5 Dokumen	124,100,218	5 Dokumen	127,895,440	5 Dokumen	129,858,548	25 Dokumen	129,858,548		

Tujuan	Sasaran	Kode				Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		013202	0301	2.0	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan	133,110,836	3 Laporan	135,626,622	3 Laporan	139,569,648	3 Laporan	143,364,870	3 Laporan	145,116,068	15 Laporan	145,116,068		
		013203	0301	2.0	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	3 Dokumen	3 Dokumen	220,418,836	3 Dokumen	216,199,616	3 Dokumen	217,000,000	3 Dokumen	220,672,870	3 Dokumen	231,228,068	15 Dokumen	231,228,068		
		013204	0301	2.0	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Dokumen	Dokumen													
		013205	0301	2.0	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	Dokumen													
		013204	0301	2.0		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Fasilitasi Pemantauan Kebijakan	100%	100%	151,609,928	100%	159,157,286	100%	168,468,716	100%	182,372,030	100%	191,019,083	100%	191,019,083		

Tujuan	Sasaran	Kode				Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
									2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
						Sumber Daya Alam																			
		01304	0201			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	5 Dokumen	51,058,836	5 Dokumen	53,574,622	5 Dokumen	55,000,000	5 Dokumen	61,312,870	5 Dokumen	64,188,068	5 Dokumen	64,188,068					
		01304	0202			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral,	3 Dokumen	3 Dokumen	36,352,256	3 Dokumen	38,868,042	3 Dokumen	42,811,068	3 Dokumen	46,606,290	3 Dokumen	49,682,948	15 Dokumen	49,682,948					

Tujuan	Sasaran	Kode				Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
						Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian																
		01304	2.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	12 Dokumen	64,198,836	12 Dokumen	66,714,622	12 Dokumen	70,657,648	12 Dokumen	74,452,870	12 Dokumen	77,148,068	60 Dokumen	77,148,068			
		01302	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%	100%	357,892,236	100%	362,923,808	100%	375,589,815	100%	386,975,481	100%	392,819,747	100%	392,819,747			
		01302	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	32,313,753	1 Dokumen	32,313,753	1 Dokumen	37,093,708	1 Dokumen	40,888,930	1 Dokumen	44,043,908	5 Dokumen	44,043,908			

Tujuan	Sasaran	Kode				Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
						Program Pembangunan Daerah																
		01302	2.02	0	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	10 Laporan	10 Laporan	263,690,097	10 Laporan	266,205,883	10 Laporan	270,148,909	10 Laporan	273,944,131	10 Laporan	273,906,572	50 Laporan	273,906,572			
		01302	2.03	0	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	61,888,386	12 Laporan	64,404,172	12 Laporan	68,347,198	12 Laporan	72,142,420	12 Laporan	74,869,268	60 Laporan	74,869,268			
		01303	2.03	0	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Fasilitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	548,810,958	100%	556,358,316	100%	564,501,525	100%	566,074,857	100%	576,142,739	100%	576,142,739			
		01303	2.03	0	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.796 Dokumen	2.296 Dokumen	78,612,686	1.796 Dokumen	81,128,472	1.796 Dokumen	85,071,498	1.796 Dokumen	88,866,720	1.796 Dokumen	91,364,468	9.480 Dokumen	91,364,468			

Tujuan	Sasaran	Kode				Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		01302	03	203	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.796 Dokumen	2.296 Dokumen	339,335,836	1.796 Dokumen	341,851,622	1.796 Dokumen	345,794,648	1.796 Dokumen	349,589,870	1.796 Dokumen	348,516,068	9.480 Dokumen	348,516,068		
		01303	03	203	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	11 Orang	11 Orang	130,862,436	11 Orang	133,378,222	11 Orang	133,635,379	11 Orang	127,618,267	11 Orang	136,262,204	11 Orang	136,262,204		

Tabel 6.3
Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar
(Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penerima Anggaran	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Sekretariat Daerah								36,49 9,451, 962		37,37 5,073, 814		38,266,84 3,076		38,26 6,843, 076		
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Setda	Meningkatnya Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah			Indeks reformasi birokrasi setda	n/a	55	61	66		72		76		76					
				Nilai Sakip OPD	0	CC	B	B		BB		BB		BB					
				Laporan keuangan OPD yang tersaji sesuai SAP	0	Sesuai	Sesuai	Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai					
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Sekretariat daerah	0	60	65	70		75		80		80					

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2022		2023		2024		2025		2026					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		x	xx	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase Capaian Kinerja (%)	63.03					70.53	30,251,128,660	71.51	30,976,853,236	72.31	31,715,960,954	72.31	31,715,960,954	Setda	Benteng
		x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100%					100%	98,874,774	100%	136,371,080	100%	175,609,367	100%	175,609,367		
		x	xx	01	2.01	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen					2 Dokumen	47,162,387	2 Dokumen	65,935,560	2 Dokumen	86,027,361	10 Dokumen	86,027,361		
		x	xx	01	2.01	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil															

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
										2022		2023		2024		2025		2026								
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
							Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
		x	x	0	2	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
		x	x	1	0	03																				
		x	x	0	2	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																		
		x	x	1	0	04																				
		x	x	0	2	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen																		
		x	x	1	0	05																				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
							Perubahan DPA-SKPD																		
		x	x	0	2	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan					1 Laporan	51,71 2,387	1 Laporan	70,43 5,520	1 Laporan	89,582,00 6	5 Laporan	89,58 2,006				
		x	x	0	2	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		x x 0 1 2 0 2	Administrasi Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%					100%	12,159,686,628	100%	12,064,646,580	100%	12,038,581,212	100%	12,038,581,212		
		x x 0 1 2 0 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 org/bulan					130 org/bulan	12,079,530,007	130 org/bulan	11,966,079,360	130 org/bulan	11,985,225,806	650 org/bulan	11,985,225,806		
		x x 0 1 2 0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
		x x 0 1 2 0 2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen					3 Dokumen	80,156,621	3 Dokumen	98,567,220	3 Dokumen	53,355,406	15 Dokumen	53,355,406		
		x x 0 1 2 0 2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan															

Tujuan	Sasaran	Kode						Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026							
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
								Akuntansi SKPD																		
		x	x	0	2	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
		x	x	0	2	00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan																		
		x	x	0	2	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi																		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
							Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD																		
		x	x	0	2	00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
		x	x	0	2	00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/laporan pengelolaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	100%																
		x	x	0	2	00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen																
		x	x	0	2	00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
										2022		2023		2024		2025		2026						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
		x	x	0	2	00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																
				0	2	00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan				1 Laporan	81,378,387	1 Laporan	99,775,560	1 Laporan	118,922,006	5 Laporan	118,922,006				
		x	x	0	2	00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		x	x	0	2	00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan					1	63,990,107	1	82,578,360	1	101,724,806	5	101,724,806		
		x	x	0	2	00	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD															
		x	x	0	2	00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%														
		x	x	0	2	00	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah															
		x	x	0	2	00	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan															

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2022		2023		2024		2025		2026					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							Retribusi Daerah	Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah															
		x	x	0	2	00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah															
		x	x	0	2	00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah															
		x	x	0	2	00	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah															

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
										2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		x	x	0	2	00	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah																
		x	x	0	2	00	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah																
		x	x	0	2	00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	100%															
		x	x	0	2	00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																
		x	x	0	2	00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket															
		x	x	0	2	00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan																

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026							
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
							Administrasi Kepegawaian																		
		x	x	0	2	00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
		x	x	0	2	00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
		x	x	0	2	00	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan																	
		x	x	0	2	00	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam																	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
										2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
							Melaksanakan Tugas																			
		x	x	0	2	00	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan																		
		x	x	0	2	00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang					5 orang	128,379,887	5 orang	146,260,560	5 orang	165,407,006	25 orang	165,407,006					
		x	x	0	2	00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
		x	x	0	2	00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang											15 orang						

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
										2022		2023		2024		2025		2026						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
		x	x	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100%						100%	3,633,646,009	100%	3,956,323,826	100%	4,069,572,360	100%	4,069,572,360		
		x	x	0	2	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket						1 Paket	52,804,387	1 Paket	71,515,560	1 Paket	90,662,006	5 Paket	90,662,006		
		x	x	0	2	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket						1 Paket	184,696,966	1 Paket	201,958,770	1 Paket	221,105,216	5 Paket	221,105,216		
		x	x	0	2	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket						1 Paket	186,845,112	1 Paket	204,083,310	1 Paket	223,229,756	5 Paket	223,229,756		
		x	x	0	2	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket						1 Paket	497,613,297	1 Paket	511,436,460	1 Paket	530,582,906	5 Paket	530,582,906		
		x	x	0	2	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket						1 Paket	89,535,627	1 Paket	107,843,160	1 Paket	126,989,606	5 Paket	126,989,606		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
							Pengandaan yang Disediakan																		
		x	x	0	2	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen																
		x	x	0	2	00	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket				1 Paket	86,801,805	1 Paket	105,139,380	1 Paket	124,285,826	5 Paket	124,285,826					
		x	x	0	2	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan				1 Laporan	81,711,447	1 Laporan	100,104,960	1 Laporan	119,251,406	5 Laporan	119,251,406					
		x	x	0	2	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan				1 Laporan	2,453,637,367	1 Laporan	2,654,242,226	1 Laporan	2,633,465,639	5 Laporan	2,633,465,639					
		x	x	0	2	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip																	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Peningkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
										2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
							Dinamis pada SKPD																			
		x	x	0	2	00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
		x	x	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD	100%					100%	2,367,258,617	100%	2,418,410,550	100%	2,494,996,333	100%	2,494,996,333					
		x	x	0	2	00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit					4 Unit	611,362,387	4 Unit	623,935,560	4 Unit	643,082,006	17 Unit	643,082,006					
		x	x	0	2	00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 Unit																	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Peralang Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026							
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
							yang Disediakan																		
		x	x	0	2	00	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan																	
		x	x	0	2	00	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan																	
		x	x	0	2	00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit				9 Unit	99,345,245	9 Unit	117,544,980	9 Unit	136,691,426	45 Unit	136,691,426					
		x	x	0	2	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	10 Unit				15 Unit	353,377,387	15 Unit	368,785,560	15 Unit	387,932,006	75 Unit	387,932,006					
		x	x	0	2	00	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan																	
		x	x	0	2	00	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan																	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
										2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		x	x	0	2	00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan																
		x	x	0	2	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan																
		x	x	0	2	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit					30 Unit	1,303,173,598	30 Unit	1,308,144,450	30 Unit	1,327,290,896	150 Unit	1,327,290,896			
		x	x	0	2	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%					100%	4,722,760,488	100%	4,729,791,080	100%	4,787,230,417	100%	4,787,230,417			
		x	x	0	2	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan	2 Laporan					2 Laporan	100,695,932	2 Laporan	119,935,560	2 Laporan	139,082,006	10 Laporan	139,082,006			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
							Jasa Surat Menyurat																		
		x	x	0	2	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan				1 Laporan	1,146,642,587	1 Laporan	1,153,333,560	1 Laporan	1,172,480,006	5 Laporan	1,172,480,006					
		x	x	0	2	00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan																
		x	x	0	2	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan				6 Laporan	3,475,421,969	6 Laporan	3,456,521,960	6 Laporan	3,475,668,406	6 Laporan	3,475,668,406					

Tujuan	Sasaran	Kode			Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
								2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
		x	x	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%						100%	2,453,934,912	100%	2,562,008,680	100%	2,696,033,801	100%	2,696,033,801		
		x	x	01	209	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit						20 unit	833,089,347	20 unit	843,225,960	20 unit	862,372,406	240 unit	862,372,406		
		x	x	01	209	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit						48 Unit	443,737,119	48 Unit	458,152,328	48 Unit	477,298,774	40 Unit	477,298,774		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026							
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		x	x	0	2	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya																	
		x	x	0	2	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit																
		x	x	0	2	00	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit				12 Unit		12 Unit		60 Unit								
		x	x	0	2	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	2 Unit				2 Unit	79,790,437	2 Unit	98,205,060	2 Unit	117,351,506	10 Unit	117,351,506					
		x	x	0	2	00	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya di peliharaan	5 Unit				5 Unit	302,085,209	5 Unit	318,057,032	5 Unit	337,203,478	25 Unit	337,203,478					

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		x	x	0	2	00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara																	
		x	x	0	2	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara	4 Unit				4 Unit	442,730,105	4 Unit	457,156,380	4 Unit	476,302,826	4 Unit	476,302,826					
		x	x	0	2	00	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara	25 Unit				25 Unit	204,437,687	25 Unit	221,482,560	25 Unit	240,629,006	125 Unit	240,629,006					
		x	x	0	2	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara	32 Unit				32 Unit	148,065,007	32 Unit	165,729,360	32 Unit	184,875,806	160 Unit	184,875,806					
		x	x	0	2	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan	M ²																

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
							Pemeliharaan/Rehabilitasi																		
		x	x	0	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Fasilitas Peningkatan Pelayanan BLUD																	
		x	x	0	2	00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan																	
		x	x	0	2		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%				100%	1,078,258,633	100%	1,124,283,960	100%	1,181,723,297	100%	1,181,723,297					
		x	x	0	2	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil	2 Orang/bulan				2 Orang/bulan	247,080,287	2 Orang/bulan	263,656,560	2 Orang/bulan	282,803,006	10 Orang/bulan	282,803,006					

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
							Kepala Daerah																		
		x	x	0	2	00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket					1 Paket	406,430,387	1 Paket	421,255,560	1 Paket	440,402,006	5 Paket	440,402,006				
		x	x	0	2	00	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang					8 Orang	60,747,959	8 Orang	79,371,840	8 Orang	98,518,286	8 Orang	98,518,286				
		x	x	0	2	00	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil	2 Orang					2 Orang	360,000,000	2 Orang	360,000,000	2 Orang	360,000,000	2 Orang	360,000,000				

Tujuan	Sasaran	Kode				Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
									2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
						Kepala Daerah																			
		x	x	0	2		Fasilitasi Kerumahtan ggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtan ggaan Sekretariat Daerah	100%					100%	685,824,774	100%	716,871,120	100%	755,164,012	100%	755,164,012				
		x	x	0	2	00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket					1 Paket	370,212,387	1 Paket	385,435,560	1 Paket	404,582,006	5 Paket	404,582,006				
		x	x	0	2	00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket					1 Paket	315,612,387	1 Paket	331,435,560	1 Paket	350,582,006	5 Paket	350,582,006				
		x	x	0	2	00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga																	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
							Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah yang Disediakan																	
		x	x	0	2		Penataan Organisasi	Persentase Fasilitas Penataan Organisasi	100%					100%	438,628,185	100%	530,265,300	100%	625,997,529	100%	625,997,529				
		x	x	0	2	00	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen					3 Dokumen	95,278,637	3 Dokumen	113,523,060	3 Dokumen	132,669,506	15 Dokumen	132,669,506				
		x	x	0	2	00	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan					3 Laporan	88,112,387	3 Laporan	106,435,560	3 Laporan	125,582,006	15 Laporan	125,582,006				
		x	x	0	2	00	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen					1 Dokumen	88,112,387	1 Dokumen	106,435,560	1 Dokumen	125,582,006	5 Dokumen	125,582,006				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		x	x	0	2	00	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen					1 Dokumen	83,56 2,387	1 Dokumen	101,9 35,56 0	1 Dokumen	121,082,0 06	5 Dokumen	121,0 82,00 6		
		x	x	0	2	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen					1 Dokumen	83,56 2,387	1 Dokumen	101,9 35,56 0	1 Dokumen	121,082,0 06	5 Dokumen	121,0 82,00 6		
				0	2		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %					100%	2,235, 284,3 21	100%	2,268, 595,0 80	100%	2,326,034 ,417	100%	2,326, 034,4 17		
				0	2	00	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan					1 Laporan	1,716, 817,6 47	1 Laporan	1,717, 242,9 60	1 Laporan	1,736,389 ,406	5 Laporan	1,736, 389,4 06		

Tujuan	Sasaran	Kode				Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
									2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
				01	2114	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan					1 Laporan	361,080,537	1 Laporan	376,404,060	1 Laporan	395,550,506	5 Laporan	395,550,506		
				01	2114	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan					1 Laporan	157,386,137	1 Laporan	174,948,060	1 Laporan	194,094,506	5 Laporan	194,094,506		
Mengoordinasikan, menselaraskan, mengharmoniskan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan telah didesentralisasikan pemerintah kabupaten	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang pemerintahan & kesra	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase urusan bidang pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi (%)	100%					100%	4,659,093,380	100%	4,770,865,030	100%	4,884,697,870	100%	4,884,697,870		
								Persentase urusan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi (%)	100%					100%		100%		100%		100%			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		4	0	0	2		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan	100%					100%	1,070,907,805	100%	1,102,497,236	100%	1,127,907,408	100%	1,127,907,408		
		4	0	0	2	00	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen					3 Dokumen	179,000,000	3 Dokumen	146,000,000	3 Dokumen	225,468,603	15 Dokumen	225,468,603		
		4	0	0	2	00	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen					2 Dokumen	103,867,153	2 Dokumen	108,000,000	2 Dokumen	97,445,803	10 Dokumen	97,445,803		
		4	0	0	2	00	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen					3 Dokumen	788,040,653	3 Dokumen	848,497,236	3 Dokumen	804,993,003	15 Dokumen	804,993,003		
		4	0	0	2		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%					100%	2,557,514,808	100%	2,597,468,353	100%	2,606,096,648	100%	2,606,096,648		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		4	0	0	2	00	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6 Dokumen					6 Dokumen	444,420,503	6 Dokumen	457,738,351	6 Dokumen	465,415,443	30 Dokumen	465,415,443		
		4	0	0	2	00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,	2 Dokumen					2 Dokumen	1,145,117,153	2 Dokumen	1,158,435,001	2 Dokumen	1,157,868,603	10 Dokumen	1,157,868,603		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
										2022		2023		2024		2025		2026									
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
		4	0	0	2	00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																			
		4	0	0	2	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Peningkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
										2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		4	0	0	2		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%						100%	930,935,258	100%	970,888,803	100%	998,653,328	100%	998,653,328		
		4	0	0	2	00	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	10 Dokumen						5 Dokumen	322,283,153	5 Dokumen	335,601,001	5 Dokumen	344,715,003	25 Dokumen	344,715,003		
		4	0	0	2	00	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus						3 Kasus	351,727,153	3 Kasus	365,045,001	3 Kasus	373,812,603	15 Kasus	373,812,603		
		4	0	0	2	00	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	50 Dokumen						150 Dokumen	256,924,953	200 Dokumen	270,242,801	250 Dokumen	280,125,723	750 Dokumen	280,125,723		
		4	0	0	2		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%						100%	99,735,510	100%	100,010,638	100%	152,040,487	100%	152,040,487		
		4	0	0	2	00	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama	1 Dokumen						1 Dokumen	99,735,510	1 Dokumen	100,010,638	1 Dokumen	152,040,487	5 Dokumen	152,040,487		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026							
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
							Dalam Negeri																		
		4	0	0	2	00	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen																
		4	0	0	2	00	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Dokumen																
Mengkoordinasikan, menselaraskan, mengharmoniskan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan telah didesentralisasikan ke pemerintah kabupaten	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan urusan lingkup koordinasi bidang perekonomian & pembangunan	4	0	0	2	00	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi (%)	100%					100%	1,589,229,922	100%	1,627,355,548	100%	1,666,184,252	100%	1,666,184,252				
		4	0	0	2	00	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100%					100%	480,669,866	100%	491,933,180	100%	506,202,683	100%	506,202,683				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		4	0	0	2	00	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen					5 Dokumen	124,100,218	5 Dokumen	127,895,440	5 Dokumen	129,858,548	25 Dokumen	129,858,548		
		4	0	0	2	00	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3 Laporan					3 Laporan	139,569,648	3 Laporan	143,364,870	3 Laporan	145,116,068	15 Laporan	145,116,068		
		4	0	0	2	00	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	3 Dokumen					3 Dokumen	217,000,000	3 Dokumen	220,672,870	3 Dokumen	231,228,068	15 Dokumen	231,228,068		
		4	0	0	2	00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	Dokumen														

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
										2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
							Pembentukan BLUD																				
		4	0	0	2	00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen																		
		4	0	0	2	00	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Fasilitas Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100%					100%	168,468,716	100%	182,372,030	100%	191,019,083	100%	191,019,083						
		4	0	0	2	00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,	5 Dokumen					5 Dokumen	55,000,000	5 Dokumen	61,312,870	5 Dokumen	64,188,068	5 Dokumen	64,188,068						

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
							Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja																		
		4	0	0	2	00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3 Dokumen					3 Dokumen	42,811,068	3 Dokumen	46,606,290	3 Dokumen	49,682,948	15 Dokumen	49,682,948				
		4	0	0	2	00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan	2 Dokumen					12 Dokumen	70,657,648	12 Dokumen	74,452,870	12 Dokumen	77,148,068	60 Dokumen	77,148,068				

Tujuan	Sasaran	Kode				Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Peningkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
									2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
						Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan																			
		4	0	0	2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%					100%	375,589,815	100%	386,975,481	100%	392,819,747	100%	392,819,747					
		4	0	0	2				00	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1 Dokumen					1 Dokumen	37,093,708	1 Dokumen	40,888,930	1 Dokumen	44,043,908	5 Dokumen	44,043,908		
		4	0	0	2				00	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	10 Laporan					10 Laporan	270,148,909	10 Laporan	273,944,131	10 Laporan	273,906,572	50 Laporan	273,906,572		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		400200	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan					12 Laporan	68,347,198	12 Laporan	72,142,420	12 Laporan	74,869,268	60 Laporan	74,869,268		
		400200	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%					100%	564,501,525	100%	566,074,857	100%	576,142,739	100%	576,142,739		
		400200	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.796 Dokumen					1.796 Dokumen	85,071,498	1.796 Dokumen	88,866,720	1.796 Dokumen	91,364,468	9.480 Dokumen	91,364,468		
		400200	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.796 Dokumen					1.796 Dokumen	345,794,648	1.796 Dokumen	349,589,870	1.796 Dokumen	348,516,068	9.480 Dokumen	348,516,068		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Peningkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		4	0	0	2	00	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	11 Orang					11 Orang	133,6 35,37 9	11 Orang	127,6 18,26 7	11 Orang	136,262,2 04	11 Orang	136,2 62,20 4		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu diketahui kinerjanya. Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada penyelenggaraan bidang urusan adalah kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah. Kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kab Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Kab Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Hal ini dimaksudkan agar indikator kinerja Sekretariat Daerah Kab Kepulauan Selayar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Sekretariat Daerah yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kab Kepulauan Selayar, Sekretariat Daerah berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD Tahun 2021- 2026 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun – 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase pelaksanaan kebijakan pemerintahan & KESRA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian & pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7.2
Perubahan Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun – 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Persentase urusan bidang pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase urusan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase urusan bidang perekonomian & pembangunan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tabel di atas disampaikan bahwa indikator nomor 1-3 adalah indikator kinerja tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam lima tahun mendatang yang mencerminkan dukungan Sekretariat Daerah dalam pencapaian target RPJMD Kab Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 yaitu visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu misi 1 RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 yaitu Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan dan misi 5 yaitu Meningkatkan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021– 2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini, memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program-program strategis yang merupakan rumusan keinginan dan upaya untuk mewujudkan kondisi yang dicita-citakan dalam pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain daripada itu, Renstra ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan bagi segenap unsur aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan, dan kemajuan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam pelaksanaannya, Perubahan Renstra dijabarkan kembali ke dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran di Sekretariat Daerah. Kemudian hasil capaian program dan kegiatan tersebut diinformasikan dan dilaporkan kepada *stakeholders*, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pelaksanaan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam hal ini Sekretaris Daerah terhadap eksistensi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggungjawabnya. Kemudian daripada itu untuk pelaksanaan setiap kegiatan yang tertuang di dalam

dokumen Renstra Sekretariat Daerah, maka diperlukan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama Bappelitbangda, hal ini dimaksudkan untuk menjamin agar setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra tersebut.

Keberhasilan dalam pelaksanaan renstra ini juga sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dari seluruh *stakeholders* secara harmonis di seluruh tingkatan. Peran pemerintah daerah lebih difokuskan sebagai fasilitator dan pelayanan, sedangkan penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat. Untuk itu, perlu adanya pemahaman dan komitmen bersama yang kuat dari semua pihak, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pembangunan.

Akhirnya sinergitas dan komitmen bersama akan menjadi penentu atas keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026.

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,**

Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19740626 199311 1002